



Transformasi Ekonomi Politik Sumber Daya Alam

Dari Kutukan Menjadi Kekuatan

Penulis :

Ir. Mohamad Bawazeer, IPU
Andi Kurniawan



TRANSFORMASI EKONOMI POLITIK SUMBER DAYA ALAM

(Dari Kutukan Menjadi Kekuatan)

Penulis:

Ir. Mohamad Bawazeer, IPU

Andi Kurniawan



TRANSFORMASI EKONOMI POLITIK SUMBER DAYA ALAM: Dari Kutukan Menjadi Kekuatan

Penulis :

Ir. Mohamad Bawazeer, IPU
Andi Kurniawan

Editor :

Dhiya Fauzia Romiza

Cover :

Deka Sugama

Penerbit : PT. Star Digital Publishing, Yogyakarta-Indonesia

Email : ptstardigitalpublishing@gmail.com

Website : www.stardigitalpublishing.com

Anggota IKAPI : No. 202/DIY/2024

ISBN : 978-634-7521-34-7

Copyright © 2025 PT. Star Digital Publishing

Cetakan Pertama, Januari 2026

Dilarang memperbanyak, mencetak ataupun menerbitkan sebagian maupun seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) di pidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (Satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dengan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini, yang berjudul *Transformasi Ekonomi Politik Sumber Daya Alam*, dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai hasil pemikiran dan kerja sama antara berbagai penulis yang terlibat dalam proyek ini. Dengan penulisan yang melibatkan beragam perspektif, buku ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai peran sumber daya alam dalam ekonomi politik global.

Dalam era globalisasi yang semakin pesat, sumber daya alam tidak hanya menjadi pilar utama dalam perekonomian banyak negara, tetapi juga berperan penting dalam dinamika politik internasional. Di tengah berbagai tantangan dan peluang yang dihadapi, buku ini mengajak pembaca untuk mengeksplorasi berbagai aspek yang membentuk ekonomi politik sumber daya alam, termasuk pengaruhnya terhadap kebijakan ekonomi, sosial, dan diplomasi antarnegara.

Semoga buku ini dapat memberikan wawasan baru dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, serta pembaca umum yang tertarik untuk memahami lebih jauh tentang hubungan antara sumber daya alam dan kekuatan politik global. Kami berharap buku ini dapat menginspirasi pembaca dalam merumuskan kebijakan yang bijaksana dalam pengelolaan sumber daya alam untuk kesejahteraan bangsa dan dunia.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik yang relevan.

Selamat membaca!

Jakarta, Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii

BAB 1 <i>ECONOMIC WEALTH AND POLITICAL POWER</i>: SUMBER DAYA ALAM DALAM EKONOMI POLITIK GLOBAL	1
A. Ruang Lingkup	1
B. Klasifikasi Sumber Daya Alam	3
C. Beberapa Konsep Umum	5
D. Sumber Daya Alam, Sumber Kekuatan Lunak (<i>Soft Power</i>) ...	10
E. Studi Kasus	12

BAB 2 PARADOKS KEBERLIMPAHAN, <i>DUTCH DISEASE</i>, DAN KUTUKAN SUMBER DAYA ALAM	19
A. Asal Muasal Konsep	19
B. Definisi Konseptual	22
C. Keberhasilan Negara Arab Teluk	23
D. Paradoks Keberlimpaan di Benua Afrika	25

BAB 3 <i>SOVEREIGN FUND</i> DAN UPAYA MENGHINDARI <i>DUTCH DISEASE</i>: NORWEGIA, DAN ARAB SAUDI.....	37
A. Mengapa <i>Sovereign Wealth Fund</i> ?.....	37
B. SWF dalam Tinjauan Akademis	39
C. <i>Norway Government Pension Fund Global</i> : Aset SWF Terbesar Dunia	43
D. <i>Public Investment Fund & Saudi Vision 2030</i>	51

BAB 4 SUMBER DAYA MANUSIA: UPAYA MENGHINDARI <i>RESOURCE CURSE</i>.....	61
A. Penerimaan SDA & Tata Kelola Sektor Pendidikan	67
B. SDM dan Kolaborasi Inovasi	73

**BAB 5 PERTUMBUHAN HIJAU: EKONOMI RENDAH KARBON
DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN 80**

 A. *Green Growth: Konsep Pertumbuhan Ekonomi
 Berkelanjutan 82*

 B. Ekonomi Rendah Karbon.....88

 C. Pengelolaan SDA Berkelanjutan & Teknologi Hijau 91

BAB 6 PENUTUP 96

DAFTAR PUSTAKA..... 98

PROFIL PENULIS..... 126

BAB 1

ECONOMIC WEALTH AND POLITICAL POWER: SUMBER DAYA ALAM DALAM EKONOMI POLITIK GLOBAL

Bagian pendahuluan ini memperkenalkan pengertian dari ekonomi politik sumber daya alam, ruang lingkup, dan kontekstualisasinya dalam hubungan internasional. Para pembaca diharapkan dapat memiliki pemahaman mengenai sumber daya alam sebagai suatu kekuatan ekonomi politik di kancah internasional.

A. Ruang Lingkup

Ekonomi Politik Sumber Daya merupakan bagian dari kajian Ekonomi Politik Global yang menjadi salah satu elemen utama dalam studi Hubungan Internasional. Ekonomi Politik Global secara umum membahas tentang relasi antara negara sebagai institusi politik dengan pasar yang menjadi pusat kegiatan perekonomian. Relasi antara keduanya menjadi faktor penting yang menentukan dinamika global kita hingga hari ini.

Dalam *Routledge Handbook to Global Political Economy*, Vivares (2020) mengemukakan bahwa Ekonomi Politik Global menjadi alternatif perspektif dalam memahami perebutan kekuasaan dan kekayaan yang berimplikasi terhadap pembangunan dan konflik kepentingan di tingkat domestik, regional, dan internasional. Oatley (2019) menjelaskan bahwa studi ini membahas bagaimana politik, dalam arti kekuatan dan kekuasaan, dapat mempengaruhi perekonomian global, dan juga sebaliknya bagaimana situasi dan kondisi ekonomi global dapat berdampak terhadap politik internasional. Ruang lingkup pembahasannya akan fokus kepada

pertarungan politik antara para pemenang dengan para pecundang dalam beragam dimensi ekonomi global.

Dalam kajian Ekonomi Politik Sumber Daya Alam, para pembaca akan diajak berdiskusi dan mendalami interaksi kekuatan antar aktor negara, dan non-negara dalam alokasi dan distribusi sumber daya alam di pasar global. Beberapa pengertian telah diuraikan diantaranya dalam studi Haslam & Heidrich (2016) yang memfokuskan pembahasan Ekonomi Politik Sumber Daya Alam ke dalam evaluasi dan investigasi implikasi berbagai kebijakan terhadap pengelolaan sumber daya alam. Lebih lanjut, Hendrix & Noland (2014) menjelaskan bahwa kekayaan sumber daya alam merupakan salah satu faktor determinan dalam arus perdagangan dan investasi global. Selain itu, sifatnya yang cenderung terbatas dan ketersediannya secara geografis sangat spesifik pada lokasi dan wilayah tertentu menempatkan sumber daya alam sebagai salah satu faktor pemicu timbulnya konflik dan perebutan kuasa antar negara.

Berdasarkan beberapa pengertian ini, Ekonomi Politik Sumber Daya Alam (Ekopol SDA) merupakan suatu kajian yang sangat menarik dan menantang, terutama bagi negara-negara yang memiliki kekayaan berlimpah, seperti Indonesia. Selain diskusi seputar kebijakan SDA, pembahasan Ekopol SDA memberikan wawasan tentang perbedaan pertumbuhan ekonomi di negara-negara kaya SDA, kondisi kemiskinan dan pembangunan sumber daya manusia, konflik sumber daya alam antar negara, antara negara dengan perusahaan multinasional, antara perusahaan multinasional dengan organisasi masyarakat sipil internasional, serta SDA sebagai instrumen kekuatan politik luar negeri suatu negara di tingkat regional, dan internasional.

Sebagai pendahuluan, bab ini akan memperkenalkan klasifikasi sumber daya alam untuk lebih meningkatkan pemahaman terhadap karakteristik, dan sifat-sifat umum dari SDA. Kedua, bagian pendahuluan ini juga akan memberikan beberapa konsep populer dalam ekonomi politik sumber daya alam. Ketiga, sejumlah studi kasus akan dibahas dalam rangka memberikan ilustrasi kekuatan SDA yang

berkembang menjadi kekuatan politik suatu negara. Harapannya para pembaca dapat memiliki pemahaman awal terkait dengan pengertian ekonomi politik SDA, serta penting dan strategisnya pembahasan ini dalam hubungan internasional.

B. Klasifikasi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam secara umum dikelompokkan dalam dua klasifikasi yaitu:

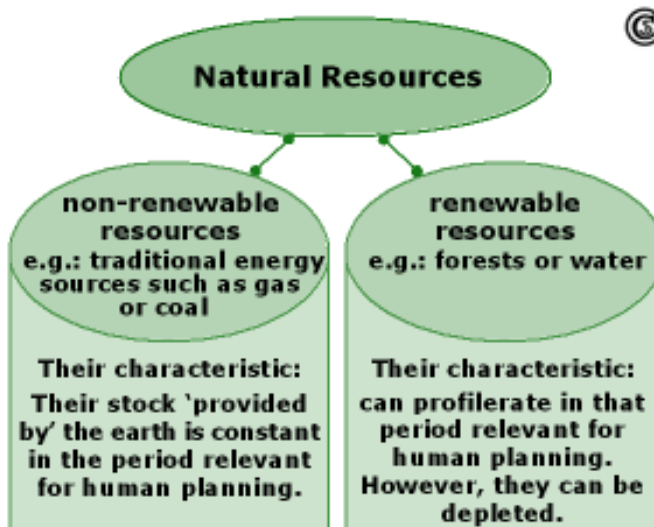
KARAKTER FISIK → Berdasarkan karakteristik fisiknya, sumber daya dapat dibagi menjadi sumber daya alam hayati, sumber daya mineral non-energi, energi, dan sumber daya lingkungan. Beberapa bentuk sumber daya hayati misalnya adalah hasil laut seperti ikan, serta produk pertanian dan perkebunan. Sementara itu, beberapa komoditas tambang populer masuk dalam klasifikasi mineral non-energi meliputi emas, bijih besi, dan berlian (Sweeney, 1993; Zwaan et al., 2023). Sumber daya energi meliputi minyak, gas, panas bumi, dan batu bara, sedangkan sumber daya lingkungan antara lain sumber daya air, udara, dan tanah.

SKALA WAKTU PROSES PENYESUAIAN → Berdasarkan kepada skala waktu yang dibutuhkan untuk proses penyesuaiannya, klasifikasi sumber daya alam dapat dibagi menjadi sumber daya alam yang tidak terbarukan (*non-renewable resources*) atau sering juga disebut sebagai *depletable resources* dan sumber daya alam yang terbarukan (*renewable resources*).

Secara umum semua sumber daya mineral dikategorikan sebagai sumber daya tidak terbarukan karena jumlahnya yang terbatas dan cenderung akan habis (*deplatable*) dengan semakin meningkatnya permintaan terhadap komoditas tersebut. Sifatnya yang tidak terbarukan dapat membuat harga komoditas seperti minyak dan batu bara melonjak tinggi di pasar internasional. Ditambah lagi dengan ketersediaan dan distribusi sumber daya alam yang tidak merata dapat memicu ketegangan antar negara seperti yang terjadi di Laut Cina Selatan antara China dengan beberapa negara di Asia Tenggara,

dan Kepulauan Senkaku antara Jepang dan China (Macaraig & Fenton, 2021; Macaulay, 2023)

Di sisi lain, sumber daya terbarukan merupakan sumber daya alam yang dapat tersedia kembali sejalan dengan siklus kehidupan mereka seperti ikan, tumbuhan dan pepohonan, serta air, angin dan matahari (Jowsey & Kellett, 1995). Istilah sumber daya alam terbarukan juga dikaitkan dengan sumber daya hayati berasal dari tumbuhan dan hewan yang dieksploitasi namun tidak membahayakan kelestarian hidup mereka, dan dapat tersedia kembali setelah melalui siklus biologisnya (Ebnesajjad, 2013).



Gambar 1.1 Pengelompokan Jenis Sumber Daya Alam

Sumber: Geolearning – Freie Universitat Berlin https://www.geo.fu-berlin.de/en/v/geolearning/glossary/natural_resources/index.htm

C. Beberapa Konsep Umum

a. *Oversupply*

Sektor SDA telah banyak berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi di banyak negara. Tingginya permintaan terhadap produk-produk olahan SDA di pasar global, ditambah lagi dengan karakteristik umum sebagian komoditas ini yang cenderung *depletable* memberikan potensi pendapatan yang menjanjikan kepada negara penghasil sumber daya alam. Harga dapat melonjak tinggi ketika permintaan meningkat secara signifikan, sementara produksi cenderung tidak bertambah. Hal ini sering juga disebut sebagai *scarcity issue*, yang menggambarkan suasana kelangkaan akibat ketidakseimbangan antara faktor *supply* dan *demand*. Sebaliknya, harga komoditas juga dapat melandai ketika permintaan melemah, sementara produksi berjalan secara konsisten. Akibatnya akan terjadi ketersediaan produk yang lebih banyak di pasar daripada permintaan terhadap komoditas tersebut. Fenomena ini diasosiasikan dengan istilah *oversupply*.

b. *Rostow's Stages of Economic Growth*

Komoditas migas dan batu bara merupakan contoh komoditas yang sangat strategis sebagai penyumbang devisa ekspor bagi beberapa negara. Industrialisasi dan sebagian besar kegiatan ekonomi dunia membutuhkan energi yang masih bersumber kepada energi fosil. Diperkirakan sekitar 80% konsumsi energi primer global masih bersumber kepada bahan bakar fosil (T. Ahmad & Zhang, 2020), utamanya adalah migas dan batu bara (Asdrubali & Desideri, 2019; Gasparotto & Da Boit Martinello, 2021).

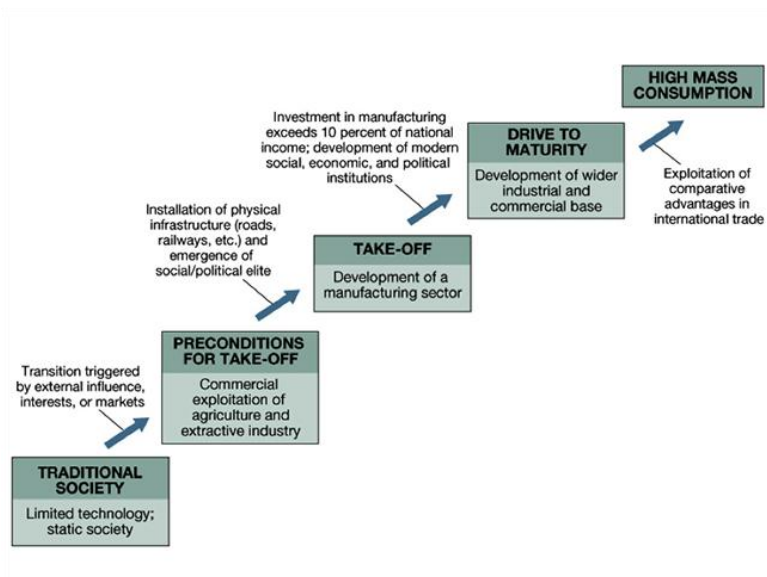
Di sisi lain, ketersediaannya semakin terbatas karena sifatnya yang tidak terbarukan, dan cadangan yang tersedia semakin berkurang. Hal ini berimplikasi terhadap tingginya harga energi fosil di pasar internasional, dan tentunya menguntungkan negara-negara produsen seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar yang menjadikan sumber daya alam migas sebagai salah satu penyumbang

sumber pendapatan utama dan membiayai pembangunan ekonomi di negara-negara tersebut (Aljarallah, 2020). Selain migas, komoditas batu bara adalah salah satu komoditas energi yang paling populer di pasar global karena harganya yang relatif murah dan banyak digunakan di beberapa industri strategis seperti industri besi dan baja, serta sektor pembangkit listrik (Jin & Kim, 2018). Negara eksportir batu bara terbesar diantaranya adalah Indonesia dan Australia. Sektor batu bara memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi melalui penerimaan devisa, dan penciptaan lapangan pekerjaan (Aimon et al., 2023).

Secara teoritis, salah satu pemikiran yang cukup populer dalam pembangunan global adalah *Rostow's Stages of Economic Growth Model*. Walt Whitman Rostow, seorang mantan penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, membuat satu garis linear untuk menggambarkan tingkat pertumbuhan negara. Menurut Rostow, terdapat lima tahapan pertumbuhan ekonomi negara yang masing-masing menggambarkan karakteristik dan perkembangannya, dimulai dari tingkat yang paling rendah yaitu masyarakat tradisional yang dicirikan dengan keterbatasan teknologi, kemudian pra-kondisi sebelum lepas landas yang dicirikan dengan eksploitasi dan komersialisasi hasil pertanian dan industri ekstraktif, dilanjutkan dengan kondisi lepas landas dimana negara telah masuk dalam pembangunan sektor manufaktur, lalu masuk tahapan yang lebih tinggi dimana negara menuju kearah kedewasaan disertai dengan karakteristik pembangunan industri dan aktivitas komersial yang lebih luas, dan tahapan terakhir adalah periode konsumsi massal dimana negara dapat bersaing dalam skala yang lebih luas di tingkat global melalui perdagangan internasional (Hunter, 2012; Willis, 2023).

Meski demikian, teori pertumbuhan ekonomi ini tidak dapat menjelaskan sepenuhnya fenomena kondisi ekonomi di negara-negara yang memiliki kekayaan SDA berlimpah. Sebagian berhasil mengakumulasi pendapatan dan memanfaatkannya untuk pembangunan infrastruktur, serta sarana dan prasarana lainnya yang

dibutuhkan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, sedangkan sebagian lainnya masih berupaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.



Gambar 1.2 Rostow's Stages of Economic Growth

Sumber: <https://www.e-education.psu.edu/geog128/node/719>

c. *Staple Theory*

Sementara itu, kontribusi SDA terhadap pembangunan ekonomi menjadi salah satu diskusi yang terus berkembang dengan beragam pandangan. Salah satunya adalah pandangan dalam *staple theory* yang menjelaskan bahwa negara dengan sumber daya alam berlimpah mendapat keuntungan ekonomi dari pertumbuhan ekspor. Dalam pandangan ini, pengertian bahan baku komoditas alam (*staple*) adalah hasil sumber daya alam yang diekstraksi tanpa membutuhkan pengolahan yang kompleks sebelum diekspor ke pasar global untuk bahan baku industri. Menurut tesis ini, keuntungan tidak hanya diperoleh dari penjualan ekspor, tetapi juga daya tarik investasi, dimana perusahaan-perusahaan besar membidik keuntungan dari investasi di sektor bahan baku ini.

d. *Resource Nationalism*

Kendati begitu, pendapat lain dalam teori ini juga menggarisbawahi potensi ketergantungan (*dependency*) yang ditimbulkan dari investasi ini, khususnya ketika mobilitas modal berasal dari perusahaan asing. Melalui penguasaan ekstraksi SDA, perusahaan asing dapat membeli bahan baku dan menjual kembali dalam bentuk yang sudah diolah dengan harga yang lebih tinggi (Gunton, 2003).

Dalam konteks kebijakan, sebagian negara menyikapi hal ini dengan pendekatan ekonomi yang cenderung ketat dan protektif. Penyebabnya adalah terdapat kekhawatiran perusahaan-perusahaan asing dapat menguasai sektor SDA strategis terutama di sektor migas menggunakan kapabilitas teknologi dan permodalan yang mereka miliki. Sebab itu, pemerintah menyusun serangkaian regulasi dan peraturan yang relatif membatasi ruang gerak perusahaan asing atau sebagian menyebutnya sebagai *resource nationalism*.

Konsep ini memberikan penjelasan mengenai perilaku negara-bangsa yang dianugerahi SDA berupa migas dan mineral berupaya untuk memaksimalkan kepentingan ekonomi nasional mereka melalui pengendalian sektor strategis ini. Seringkali konsep ini juga dikaitkan dengan pandangan geopolitik dimana SDA dianggap sebagai salah satu sumber kedaulatan dalam suatu wilayah negara yang secara bersamaan menjadi identitas nasional dan hak negara-bangsa (Koch & Perreault, 2019).

Salah satu fenomena paling populer terkait dengan penerapan nasionalisme SDA dalam kebijakan ekonomi adalah Venezuela, negara kaya minyak di kawasan Amerika Selatan. Pada masa kepemimpinan Hugo Chavez, nasionalisasi kebijakan SDA Venezuela tidak dilakukan secara konvensional dengan mengeliminasi hak-hak investasi asing, atau bahkan mengusirnya, melainkan dengan mengupayakan negosiasi ulang kepentingan domestik dalam kontrak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing. Hal ini dianggap sebagai bentuk perkembangan *hybrid resource nationalism*, di satu sisi perusahaan-perusahaan asing dipaksa untuk bersedia bernegosiasi ulang dengan

negara, sementara di sisi lain negara masih mencari peluang investasi asing masuk ke negaranya (Rosales, 2018). Terlepas dari kontroversi kebijakan radikal yang diterapkan oleh Hugo Chavez, Venezuela mengalami pertumbuhan ekonomi secara signifikan bersamaan dengan naiknya harga minyak dunia, yaitu sebesar 10 persen pada 2006, 8 persen pada 2007, dan sekitar 5 persen pada 2008. Meskipun kemudian diterpa dampak krisis finansial Amerika Serikat 2008 yang menyebabkan melemahnya pasar global dan juga harga minyak dunia (Mares, 2022).

e. *Resource Curse Theory*

Ketergantungan SDA tidak hanya dikaitkan dengan penguasaan perusahaan multinasional dalam satu sektor sumber daya alam, tetapi juga dihubungkan dengan ketergantungan suatu negara terhadap pendapatan dari hasil sektor ekstraktif tertentu. Mueller (2019) mendefinisikan bahwa *natural resource dependence* sebagai kecenderungan spesialisasi ekonomi yang berlebihan terhadap sumber daya alam dari suatu negara.

Dalam perkembangannya, konsep ini juga dikaitkan dengan *resource curse theory* yang secara luas digunakan untuk menjelaskan efek negatif dari eksploitasi SDA terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori kutukan sumber daya alam menceritakan tentang negara-negara yang kaya sumber daya alam, khususnya mineral dan komoditas bahan bakar, cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif lebih lambat daripada negara-negara yang memiliki sedikit kekayaan SDA. Ketergantungan ekonomi terhadap pendapatan dari hasil SDA menjadikan performa ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global, disertai dengan salah kelola kebijakan dan perilaku koruptif yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara (Murshed, 2018). Diskusi terkait dengan kutukan sumber daya alam akan dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya terutama dengan beberapa fakta empirik yang menjadi perhatian para akademisi.

D. Sumber Daya Alam, Sumber Kekuatan Lunak (*Soft Power*)

Sumber kekuatan politik negara secara umum dihubungkan dengan kapabilitas militer dan pertahanan suatu negara. Namun dalam perkembangannya, kekuatan suatu negara tidak hanya diukur dari kemampuan *hard power*, tetapi juga dari kekuatan lunak yang dimiliki termasuk hasil ekonomi dari sumber daya alam (SDA). Dalam hal ini, kontribusi ekonomi dari kekayaan SDA dapat diamati dalam perkembangan sebagian besar ekonomi negara-negara berkembang yang masih mengandalkan sektor primer seperti pertambangan, perikanan, dan perkebunan sebagai penggerak roda perekonomian.

Permintaan terhadap komoditas SDA di pasar global terus mengalami peningkatan, terutama dipicu laju pertumbuhan penduduk yang membutuhkan lebih banyak suplai bahan baku makanan, dan industrialisasi yang mengonsumsi lebih banyak energi fosil. Hal ini menempatkan sumber daya alam sebagai sumber kekuatan ekonomi di tengah masih tingginya permintaan dan kebutuhan masyarakat global terhadap berbagai komoditas hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta tambang dan energi. Aset kekayaan SDA telah memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian banyak negara melalui penciptaan lapangan pekerjaan, pembangunan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat (Peipei et al., 2023).

1. KONTRIBUSI PERTAMBANGAN MINERAL DAN ENERGI

Tingginya permintaan terhadap komoditas tambang dan energi di pasar dunia telah mendukung pertumbuhan industrialisasi di banyak negara. Hal ini merupakan salah satu bukti kongkrit peran sumber daya dalam perekonomian global. Beberapa studi telah memberikan hasil kajian empirik untuk mendukung argumentasi tersebut. Ericsson & Löf (2019) menggunakan *Mining Contribution Index WIDER (MCI-Wr)* untuk menggambarkan kontribusi hasil sumber daya alam terhadap perekonomian negara-negara penghasil SDA melalui indikator nilai produksi, ekspor mineral,

pengeluaran eksplorasi, dan rente mineral terhadap PDB. Berdasarkan indeks ini, terdapat beberapa negara di dunia yang menunjukkan kenaikan peringkat sangat positif pada periode 2016 dibandingkan dengan kondisi mereka pada periode 1996. Republik Demokratik Kongo, salah satunya, peringkatnya meningkat tajam dari urutan ke-29 pada tahun 1996 ke urutan pertama pada tahun 2016. Diikuti oleh Burkina Faso dan Mali yang juga naik peringkat secara signifikan ke urutan kedua dan ketiga.

Tabel 1.1 20 Besar Negara berdasarkan Mining Contribution Indeks WIDER (MCI-Wr)

Country	Rank 1996	MCI-Wr score 1996	Rank 2016	MCI-Wr score 2016	Change in rank
Congo, Dem. Rep.	29	72.2	1	93.0	↑
Burkina Faso	64	55.6	2	92.9	↑
Mali	57	59.4	3	91.6	↑
Papua New Guinea	3	89.5	4	91.1	↓
Eritrea	119	24.4	5	90.3	↑
Namibia	11	83.5	6	90.1	↑
Mauritania	9	84.9	7	89.5	↑
Suriname	42	66.5	8	89.3	↑
Peru	8	86.7	9	88.3	↓
Liberia	37	67.6	10	88.2	↑
Botswana	10	83.8	11	88.2	↓
Chile	4	88.6	12	87.8	↓
Zambia	5	87.5	13	87.3	↓
Guyana	2	90.8	14	87.2	↓
Sierra Leone	19	77.2	15	87.1	↑
Mongolia	27	72.8	16	86.0	↑
Australia	6	87.4	17	84.6	↓
Guinea	1	91.7	18	84.3	↓
Tanzania	41	66.9	19	83.4	↑
Kyrgyz Republic	20	77.0	20	83.2	↔

2. KONTRIBUSI PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Tidak hanya di sektor pertambangan dan energi, meningkatnya populasi dunia juga membutuhkan ketersediaan pangan dan bahan pokok yang memadai. Untuk itu, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan berkembang menjadi sektor industri penting di beberapa negara. Hal ini terjadi karena semakin

terbatasnya lahan yang tersedia untuk pengembangan, budidaya, dan produksi, serta tantangan kerusakan lingkungan dan perubahan iklim yang dapat berimplikasi terhadap persoalan ketersediaan dan ketahanan pangan.

Dalam konteks ketahanan pangan, berbagai studi telah menunjukkan peran strategis dari sektor pertanian dalam meningkatkan ketahanan pangan global. Tidak hanya negara-negara berkembang, negara-negara maju telah melakukan upaya serius melalui riset dan investasi di sektor pertanian dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan di negaranya (Pawlak & Kołodziejczak, 2020). Sektor perikanan juga menjadi komoditas pangan yang dianggap penting karena kontribusinya terhadap ketersediaan nutrisi protein bagi manusia. Berdasarkan data Organisasi Pangan Dunia FAO, kontribusi sektor akuakultur dan perikanan menyediakan 17% dari seluruh nutrisi hewani yang digunakan manusia. (Boyd et al., 2022).

E. Studi Kasus

1. Negara-negara Arab Teluk – Eksportir Minyak dan Gas

Arab Saudi dan Kekuatan OPEC

Meskipun pandangan negatif terhadap ekonomi berbasis SDA lebih populer dalam banyak pembahasan ekonomi politik, tidak berarti bahwa pandangan ini dapat sepenuhnya menjelaskan fenomena negara-negara dengan kekayaan SDA yang berlimpah. Beberapa kasus justru membuktikan sebaliknya, kekayaan SDA menjadi kekuatan yang mampu diterjemahkan sebagai kekuatan politik negara. Arab Saudi, misalnya, adalah salah satu negara dengan sumber minyak yang berlimpah dan menjadi salah satu negara kunci dalam organisasi negara-negara eksportir minyak OPEC.

Menurut data Badan Informasi Energi (EIA) Amerika Serikat, Arab Saudi merupakan produsen minyak mentah dan kondensat tertinggi ketiga di dunia, eksportir minyak mentah terbesar dunia, dan

produsen minyak mentah utama OPEC pada tahun 2022 (EIA.gov). Kekuatan migas ini telah memberikan ruang dan fleksibilitas bagi Arab Saudi untuk menjalin kerjasama luar negeri dan mempengaruhi isu-isu penting dunia. Demmelhuber (2019) menganggap Arab Saudi sebagai *an aspiring regional hegemon* untuk menggambarkan pengaruh negara kerajaan ini di kawasan Timur Tengah yang semakin mapan, dan secara bersamaan membangun independensi politik luar negerinya dari bayang-bayang Amerika Serikat. Sebelumnya, politik internasional Arab Saudi selalu diasosiasikan dengan pengaruh AS di kawasan, namun belakangan, setelah Raja Salman didaulat untuk melanjutkan pemerintahan upaya reformasi dan diversifikasi terus dilakukan termasuk dalam diversifikasi ekonomi dan kerjasama luar negeri.

Persatuan Emirat Arab. Sovereign Wealth Fund & Humanitarian Diplomacy

Demikian halnya dengan PEA, yang selama ini dikenal sebagai pusat perdagangan internasional untuk pasar Timur Tengah dan Afrika, pendapatan dari sektor migas telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi negara federasi emirat tersebut. Upaya diversifikasi dari ketergantungan terhadap sektor migas ditunjukkan dengan perkembangan pesat di berbagai sektor industri terutama sektor jasa perbankan, keuangan, investasi, dan juga pariwisata. Siapa yang tidak mengenal maskapai Emirate, salah satu perusahaan jasa penerbangan terbaik dunia, atau Drydocks World, salah satu perusahaan terbesar dunia di bidang jasa kelautan dan layanan lepas pantai di sektor minyak, gas, dan energi. Keberhasilan dalam pengelolaan ekonomi berbasis SDA migas ini telah mengantarkan PEA menjadi salah satu dari 40 negara dengan indeks tertinggi di bidang pembangunan manusia *Human Development Index* UNDP (Siddiqui & Afzal, 2022).

Keberhasilan pengelolaan ekonomi dan diversifikasi sektor industri berbasis SDA memberikan ruang gerak yang relatif fleksibel dan signifikan dalam penyelenggaraan politik luar negeri PEA.

Berdasarkan data Bank Dunia, di antara negara-negara anggota *Gulf Cooperation Council* (GCC), PEA berada di urutan paling rendah kedua setelah Bahrain terkait dengan persentase kontribusi hasil SDA terhadap PDB yaitu sebanyak 16,75 persen pada 2019. Sementara itu, Kuwait, Oman, dan Arab Saudi berada pada urutan tiga tertinggi yaitu masing-masing 42,65 persen, 26,67 persen, dan 24,08 persen.

Semakin berkurangnya pangsa sektor SDA dalam struktur ekonomi PEA dapat memberikan gambaran keberhasilan upaya diversifikasi negara federasi emirat tersebut (Shadab, 2023). Pendapatan perkapitanya meningkat secara signifikan dari US\$ 31,722 pada 2009 menjadi US\$ 53,708 pada 2022. Diversifikasi ekonomi dilakukan diantaranya dengan mendorong keterbukaan ekonomi salah satunya melalui kebijakan perdagangan luar negeri yang menempatkan PEA sebagai pusat pengolahan dan *re-export* produk-produk dari berbagai negara ke pasar Timur Tengah, Afrika, serta Eropa (Shadab, 2021). Pendirian zona perdagangan dan ekonomi bebas, seperti Jebel Ali Free Zone, dan Ras AlKhaimah Economic Zone, menempatkan peran dan posisi strategis PEA dalam geoekonomi Timur Tengah dan Afrika.



Gambar 1.3 Jabal Ali Free Zone (JAFZA) Persatuan Emirat Arab

Sumber: www.arabianbusiness.com

Dalam konteks politik luar negeri, kapabilitas ekonomi ini dimanfaatkan setidaknya dalam beberapa bentuk kekuatan lunak meliputi investasi dan bantuan luar negeri. *Abu Dhabi Investment Authority* (ADIA) merupakan kendaraan strategis yang dibentuk oleh Pemerintah PEA untuk mengelola *sovereign wealth funds* (SWF) sebagai salah satu instrumen investasi pemerintah di berbagai negara. ADIA berada pada peringkat ketiga dari 10 lembaga pengelola SWF terbesar dunia dengan aset mencapai US\$ 683 miliar pada 2020 (Jumaniyazov, 2021).

Penanaman modal dilakukan pada proyek-proyek strategis yang menguntungkan, memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara tujuan, serta sejalan dengan visi diversifikasi ekonomi PEA. Beberapa diantaranya seperti investasi pada proyek energi hijau di India, ADIA menargetkan investasi sebesar US\$ 200 juta pada Greenko Group, suatu grup perusahaan energi yang bermarkas di Hyderabad (Barman, 2016), investasi pada sektor properti komersil di Australia, ADIA menanamkan modal melalui Kualitas, salah satu perusahaan terdaftar di bursa saham Australia, untuk membiayai kredit dan ekuitas pribadi sebesar US\$ 449 juta (Jackson, 2023). Keberadaan investasi ini tidak hanya meningkatkan hubungan baik dengan negara-negara tujuan investasi, tetapi juga memperkuat citra PEA sebagai negara dengan kapabilitas ekonomi yang kuat di dunia.

Perluasan pengaruh global ini juga dilakukan melalui keterlibatan aktif dalam isu-isu pembangunan dan kemanusiaan global. Pemerintah PEA adalah salah satu negara yang aktif memberikan bantuan vaksin COVID-19 ke negara-negara berkembang di Asia dan Afrika. Di mulai dari dalam negeri, bantuan vaksin diberikan kepada para pekerja asing terutama mereka yang berasal dari negara-negara berkembang dan terimbas secara ekonomi akibat pembatasan mobilitas sosial ekonomi pada masa pandemi. Mobilitas bantuan vaksin kemudian diperluas ke negara-negara lain dengan memanfaatkan sarana dan prasarana transportasi laut dan udara yang

sebelumnya telah digunakan secara massif untuk aktivitas perdagangan internasional.

Tidak kalah pentingnya adalah strategi PEA dalam memperkuat citra negaranya melalui berbagai pendekatan kekuatan lunak dalam strategi politik luar negerinya. Hal ini antara lain diterjemahkan dengan membentuk Dewan Kekuatan Lunak (*Soft Power Council*) pada Mei 2017 yang telah mengantarkan PEA sebagai salah satu dari 10 negara dengan kekuatan lunak terbesar dunia dalam *Global Soft Power Index 2022* (Maini, 2022).

PEA dikenal masyarakat luas salah satunya menjadi sponsor klub bola ternama dunia Real Madrid yang berbasis di Spanyol (Ribé, 2020). Sejak kerjasama sponsorship dengan PEA pada 2011, klub Real Madrid termasuk salah satu yang paling populer di dunia sepak bola dengan 22 gelar juara. Sebab itu, pemasangan logo di baju pemain adalah hal yang strategis untuk para pelaku bisnis karena permainan sepak bola klub Real Madrid disaksikan oleh jutaan penonton dari seluruh dunia. Selain itu diperkirakan penjualan souvenir dan barang-barang berlogokan klub Real Madrid dan sponsor melalui portal penjualan daring Amazon mencapai US\$ 3,21 juta (Jonczyk-Gwizdala & Mauricio, 2022).

Qatar, News Power – Aljazeera, dan Diplomasi Olahraga

Qatar adalah contoh lain dari negara yang relatif berhasil mengkapitalisasi kekayaan sumber daya alamnya untuk meningkatkan kemampuan negara dalam kancah politik global. Meskipun berstatus sebagai salah satu negara dengan populasi terkecil, Qatar dikategorikan dalam negara-negara dengan tingkat pendapatan tinggi dunia. Berdasarkan data World Bank, PDB per kapita Qatar meningkat tajam dari US\$ 66.858 pada 2021 menjadi US\$ 87.661 pada 2022, jauh diatas rata-rata negara dengan pendapatan tinggi yaitu US\$ 49.557.

Dalam urutan negara-negara berpendapatan tinggi, Qatar berada pada peringkat ke-9 sebagai negara dengan pendapatan tertinggi versi

Bank Dunia (data.worldbank.org). Sebagian besar pendapatan ini masih disumbang oleh sektor minyak dan gas yang telah membiayai banyak proyek infrastruktur strategis, sehingga meningkatkan daya tarik Qatar sebagai salah satu negara destinasi investasi global paling menarik di wilayah Teluk (Kamrava, 2015).

Performa ekonomi tinggi ini merupakan modalitas strategis bagi negara-negara Teluk untuk menyelenggarakan politik luar negerinya di kancah dunia. Qatar, misalnya, mengkapitalisasi kemampuan ekonominya untuk mempengaruhi persepsi dunia dalam beragam isu global melalui stasiun televisi Al Jazeera (Álvarez-Ossorio & Rodríguez García, 2021). Sebagai stasiun televisi yang didanai oleh pemerintah, beberapa pemberitaan Al Jazeera dalam isu-isu di Timur Tengah, seperti peristiwa Musim Semi Arab, kejatuhan Presiden Husni Mubarak di Mesir, dan dukungan terhadap kelompok oposisi Presiden Syria Bashar Al-Asad, dianggap merefleksikan kepentingan politik Qatar (Al Nahed, 2015).

Kendati demikian, jangkauan global pemberitaan Al Jazeera dengan perwakilan kantor internasional di beberapa negara disertai dengan konten pemberitaan yang kritis dan tajam juga mendapatkan apresiasi global, salah satunya terpotret dalam 50 portal berita dengan pertumbuhan paling cepat ketiga setelah Times of Israel, dan Newsweek versi Press Gazette pada akhir 2023 (Majid, 2023). Perkembangan pesat ini tentunya tidak terlepas dari keterlibatan aktif pemerintah Qatar dalam memediasi konflik Israel dan Palestina yang dianggap sebagai tragedi kemanusiaan dan genosida.

Selain dalam bentuk bantuan kemanusiaan, kekuatan ekonomi negara-negara Arab Teluk juga dikapitalisasi dalam bidang olahraga yang banyak menjadi perhatian publik tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga masyarakat dunia yaitu sepak bola. Meskipun dibayangkan oleh krisis dan pelemahan ekonomi global pada masa pandemi, Qatar berhasil menjadi negara Arab pertama penyelenggara Piala Dunia 2022, dan untuk pertama kalinya di kawasan Timur Tengah (Jewell, 2022).

Piala Dunia merupakan salah satu program olah raga paling bergengsi yang disaksikan oleh jutaan penonton dari seluruh dunia. Kehadiran para pengunjung memberikan potensi signifikan terhadap perekonomian Qatar, termasuk dari mobilitas pengunjung, penginapan, hingga pembelian dan konsumsi mereka selama menetap untuk mengikuti pertandingan dari perwakilan negara masing-masing.

Di sektor penerbangan misalnya, Qatar Airways, sebagai maskapai milik pemerintah Qatar, melaporkan lonjakan pendapatan hingga 100 persen pada 2022. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah penumpang secara drastis pada saat penyelenggaraan Piala Dunia 2022, dimana Qatar Airways digandeng sebagai mitra resmi maskapai penerbangan oleh penyelenggara (Ward-Glenton, 2023). Secara umum, berdasarkan data Otoritas Statistik dan Perencanaan (PSA) pemerintah Qatar, pendapatan seluruh sektor keramahtamahan (*hospitality*) meningkat secara signifikan antara 106 persen dan 365 persen pada saat penyelenggaran Piala Dunia 2022 (Perumal, 2023).

BAB 2

PARADOKS KEBERLIMPAHAN, *DUTCH DISEASE*, DAN KUTUKAN SUMBER DAYA ALAM

Bab ini akan mendiskusikan salah satu pandangan yang cukup populer dalam studi ekonomi politik sumber daya alam yaitu *Resource Curse theory*, teori kutukan sumber daya alam. Teori ini banyak digunakan dalam studi ekonomi dan politik yang membahas kondisi negara-negara yang memiliki kekayaan alam berlimpah, namun berada dalam kondisi perekonomian yang kurang berkembang. Meskipun tidak dapat menjadi suatu generalisasi, pandangan ini menarik banyak perhatian akademisi dan peneliti, salah satunya karena gejala ekonomi ini masih terjadi di beberapa negara penghasil komoditas energi dunia. Sebab itu, bab ini berupaya untuk menguraikan beberapa hal mendasar terkait dengan tesis kutukan SDA, antara lain tentang asal-muasal konsep tersebut, definisi konseptual, serta fenomena yang terjadi di sejumlah negara dalam rangka memberikan gambaran yang lebih jelas tentang gejala ekonomi tersebut.

A. Asal Muasal Konsep

Pada bagian pertama ini, artikel ini mencoba menelusuri sejarah penggunaan istilah 'kutukan SDA' dalam pembahasan terdahulu untuk memahami latar belakang munculnya etimologi ini. Penggunaan ungkapan kutukan sumber daya alam (*resource curse*) seringkali dikaitkan dengan sebutan lainnya yaitu paradoks keberlimpahan (*paradox of plenty*). Pada dasarnya, kedua ungkapan ini memiliki maksud yang relatif sama yaitu ingin memberikan gambaran antara kekayaan SDA dengan kondisi perekonomian negara-negara penghasilnya yang cenderung kurang berkembang. Leibbrandt & Lynham (2018) memberikan pengertian sederhana tentang istilah

paradoks keberlimpahan bahwa ungkapan ini merupakan suatu hasil dari pengamatan terhadap negara-negara yang berlimpah dengan SDA tetapi kondisi ekonomi mereka lebih buruk daripada negara-negara yang kekurangan SDA.

Tidak hanya itu, ketidakmampuan negara-negara tersebut dalam mengelola pendapatannya dari SDA berimplikasi terhadap instabilitas sistem politik, lemahnya institusi-institusi dalam politik pemerintahan, hingga rendahnya kualitas pembangunan manusia khususnya dalam beberapa kasus yang terjadi di negara berkembang. Hal ini kemudian digambarkan sebagai suatu kutukan SDA (Cui et al., 2023). Pendapatan dari sumber daya alam yang seharusnya dapat mengakselerasi pembangunan ekonomi dan industrialisasi, sehingga dapat menguntungkan perekonomian suatu negara, dalam kenyataannya tidak sepenuhnya demikian. Sebab itu, ungkapan ini terus berkembang menjadi salah satu kacamata analisis untuk mendalami fenomena sosial ekonomi di negara-negara kaya SDA.

Namun demikian, sebelum pandangan ini digunakan secara luas dalam studi ekonomi politik SDA, istilah *Dutch Disease* (Penyakit Belanda) lebih dulu dikenal untuk pertama kalinya dalam koran *the Economist* edisi 26 November 1977 (Mien & Goujon, 2022). Penyakit Belanda merupakan ilustrasi kondisi perekonomian Belanda pada tahun 1970an yang mengalami ketidakseimbangan antara performa eksternalnya dengan kondisi di dalam negerinya. Dari segi eksternal, kinerja ekspor gas merupakan faktor yang memperkuat mata uang *guilder* dan berkontribusi terhadap ketersediaan cadangan devisa Belanda pada masa itu.

Sementara di dalam negeri, beberapa indikator makroekonomi dan industri justru menunjukkan kondisi sebaliknya, dimana produktivitas industri cenderung mengalami pelemahan, investasi korporasi mengalami penurunan signifikan, dan melonjaknya persentase pengangguran. Diantara faktor penyebabnya adalah meningkatnya ketergantungan terhadap pendapatan ekspor gas yang sebagian besar di jual ke beberapa negara Eropa lainnya termasuk

Jerman Barat, Belgia, Perancis, dan Italia, sedangkan industri non-migas di dalam negeri cenderung kurang mendapat perhatian. Selain itu, pendapatan ekspor dimanfaatkan diantaranya untuk berinvestasi di luar negeri, sehingga penciptaan lapangan kerja di dalam negeri semakin terbatas, ditambah dengan melonjaknya alokasi anggaran pemerintah hingga mendekati separuh dari total produk domestik bruto (PDB) Belanda pada periode 1973-1975 (The Economist, 1977).

Gejala Penyakit Belanda pada dasarnya terjadi antara lain karena tingginya potensi pendapatan dari hasil sumber daya alam sehingga menyebabkan peralihan prioritas kebijakan ekonomi yang lebih berorientasi kepada eksploitasi ekonomi berbasis komoditas SDA. Terdapat kecenderungan dimana negara-negara dengan keberlimpahan SDA berupaya untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari lonjakan harga komoditas SDA di pasar global. Hal ini berimplikasi terhadap melemahnya performa sektor manufaktur dan industri lainnya. Kenaikan harga komoditas minyak dunia, menurut beberapa hasil penelitian, telah memicu pelemahan ekspor produk non-sumber daya alam secara signifikan, dan penurunan nilai tambah dari sektor manufaktur di negara-negara kaya SDA (Taguchi & Khinsamone, 2018).

Selain itu, meningkatnya pendapatan ekspor dari sektor sumber daya alam juga berimplikasi terhadap menguatnya nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang asing, sehingga produk ekspor dari sektor lainnya cenderung menjadi lebih mahal sehingga tidak kompetitif di pasar internasional (Asiamah et al., 2022). Kondisi ini dapat dijumpai diantaranya di negara-negara Afrika yang memiliki keberlimpahan SDA namun seringkali dihadapkan kepada kerentanan fluktuasi harga komoditas global.

Nigeria misalnya, sebelum terjadi lonjakan harga minyak global pada 1970an, sektor pertanian merupakan penyumbang pendapatan ekspor utama bagi negara tersebut. Namun sejak terjadi lonjakan harga minyak dunia, ekspor minyak menjadi penghasil devisa terbesar Nigeria dan berimplikasi terhadap turunnya daya tarik investasi di

sektor lainnya. Alhasil, produktivitas sektor pertanian terus melemah dan tidak lagi menjadi sektor ekonomi utama dalam perekonomian Nigeria (Ike et al., 2023).

Dalam perkembangannya, konsep *resource curse* relatif lebih populer digunakan studi Ekopol SDA daripada *dutch disease*. Secara kuantitatif, penggunaan terminologi *resource curse thesis* dalam artikel ilmiah yang terindeks dalam basis data Google Scholar meningkat secara dramatis dari hanya 13 artikel pada 1995, menjadi 543 artikel pada 2005, dan 2.360 artikel pada 2015 (Papyrakis, 2017). Meski demikian, kedua hal ini tampaknya sulit untuk dipisahkan karena saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Istilah tesis kutukan sumber daya untuk pertama kalinya diperkenalkan dalam *Resource Curse Thesis* (1993) karya Richard Auty, seorang pakar geografi ekonomi (Ross, 2015). Konsep ini merujuk kepada kondisi sebagian negara kaya minyak khususnya di Afrika, Timur Tengah, dan Amerika Latin yang mengalami pertumbuhan ekonomi lebih rendah, daripada negara-negara dengan sedikit kekayaan SDA (Badeeb et al., 2017).

B. Definisi Konseptual

Pengertian ‘tesis’ dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan suatu pernyataan atau teori yang didukung oleh argumen dikemukakan dalam suatu karangan, naskah akademik, atau karya ilmiah. Tesis Kutukan Sumber Daya merujuk kepada suatu teori, premis, hipotesis yang menggambarkan seakan-akan bahwa kekayaan sumber daya alam menjadi suatu kutukan bagi negara-negara yang memilikinya. Kata ‘kutukan’ sendiri cenderung berkonotasi negatif yang menggambarkan suatu hinaan, celaan, dan cercaan terhadap negara-negara kaya sumber daya alam melalui keadaan sosial dan pembangunan ekonomi mereka.

Sebab itu, tesis ini dikaitkan dengan fenomena negatif dalam kondisi sosial politik di berbagai negara berkembang yang memiliki kekayaan alam berlimpah, namun mereka dianggap gagal memanfaatkan keberlimpahan ini untuk mencapai tingkat pembangunan ekonomi

yang berkelanjutan (Narh, 2023). Kendati demikian, 'kutukan' dalam istilah ini sesungguhnya tidak bermakna bahwa kekayaan alam memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam realitanya, fenomena yang terjadi adalah distorsi dalam pengelolaan ekonomi yang terkonsentrasi dalam eksploitasi SDA (Aljarallah & Angus, 2020).

Hasilnya terdapat dua potret yang saling bertolak belakang yaitu negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi lambat dan terbelakang, dan negara-negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat sehingga membawa mereka menjadi negara maju. Kontribusi signifikan sumber daya alam terhadap perekonomian sebagian besar terjadi di negara-negara maju, seperti Australia, Kanada, Norwegia, Amerika Serikat, dan Inggris, sedangkan situasi sebaliknya terjadi di sebagian negara berkembang yang memiliki kekayaan migas berlimpah (Ajide, 2022).

C. Keberhasilan Negara Arab Teluk

Meski demikian, beberapa negara berkembang berhasil memanfaatkan kekayaan sumber daya minyak untuk mempercepat pembangunan ekonomi, sehingga mereka berhasil masuk dalam kategori negara-negara dengan pendapatan perkapita tinggi dunia. Hal ini dapat diamati dalam perkembangan ekonomi negara Arab Teluk seperti Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab (PEA), Kuwait, dan Qatar. Arab Saudi, misalnya, adalah negara yang sangat populer dengan kekayaan migasnya. Sektor migas berkontribusi sekitar 50 persen terhadap total PDB Arab Saudi, dan mendominasi pendapatan ekspor sebesar 70 persen dari total ekspor (Hassan, 2020).

PEREKONOMIAN ARAB SAUDI --- Berdasarkan data World Bank, pada tahun 2022, pendapatan per kapita Arab Saudi menembus sekitar US\$ 30,500, melonjak lebih dari 100 persen dibandingkan nilai PDB per kapitanya sebesar US\$ 15,064 pada tahun 2009. Signifikansi pertumbuhan ekonomi ini dapat dihubungkan dengan penyelenggaraan kebijakan-kebijakan strategis oleh pemerintah Arab

Saudi dalam beberapa tahun terakhir, khususnya melalui Saudi Vision 2030.

Melalui visi jangka panjang ini, pemerintah Arab Saudi berupaya untuk terus mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap sumber pendapatan migas dengan berinvestasi di industri non-migas, dan membuka ruang kerjasama yang lebih luas dengan para investor global untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pemerataan pembangunan di negara tersebut. Hal ini dilakukan setidaknya untuk beberapa alasan antara lain mengantisipasi pertumbuhan penduduk usia produktif yang membutuhkan lebih banyak lapangan pekerjaan, mengatasi potensi dampak negatif dari fluktuasi harga minyak global, dan mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan salah satunya dengan mendorong sektor energi baru dan terbarukan, dan pembangunan ramah lingkungan yang dianggap sangat kritis dalam masa depan pembangunan ekonomi nasional suatu negara (Amran et al., 2020; Nurunnabi, 2017).



Gambar 2.1 Profil Ekonomi Negara Kaya Migas di kawasan Teluk Arab

Sumber: World Bank Data; Saudi Arabia Country Review – www.countrywatch.com

PEREKONOMIAN PERSATUAN EMIRAT ARAB (PEA) -- Di antara sepuluh negara penghasil minyak terbesar di dunia adalah Persatuan Emirat Arab (PEA), sebagai rumah bagi sekitar 96% dari sekitar 100 miliar barel cadangan minyak yang diketahui, menjadikannya negara keenam penghasil minyak terbesar dunia (Amran et al., 2020; Nurunnabi, 2017). Pendapatan perkapita PEA mencapai US\$43.422 pada tahun 2021 dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil antara 4-5 persen (International Monetary Fund. Middle East and Central Asia Dept., 2022; Jha & Tandon, 2019).

Dibandingkan negara anggota *Gulf Cooperation Council (GCC)*, PEA memiliki sumber pendapatan yang beragam. Hal ini terlihat dari sebagian besar pendapatan negara berasal dari perdagangan dan bisnis non-migas. Diversifikasi ekonomi merupakan kata kunci dalam pesatnya pertumbuhan ekonomi PEA. Keberhasilan diversifikasi ekonomi ditunjukkan dengan minimnya serapan tenaga kerja di sektor pertambangan yang hanya mempekerjakan 1% dari angkatan kerja pada tahun 2015, sementara industri seperti ritel, pariwisata, perhotelan, transportasi, maskapai penerbangan, dan perdagangan grosir tampaknya menjadi sektor yang menyerap banyak lapangan kerja dari mayoritas angkatan kerja. Strategi diversifikasi ekonomi dilakukan oleh pemerintah PEA dengan berinvestasi di sektor-sektor selain minyak, seperti real estate, keuangan, dan pariwisata, yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan ekonomi (Nasir et al., 2019).

D. Paradoks Keberlimpahan di Benua Afrika

Kendati sebagian negara berhasil mengolah hasil SDA untuk menunjang pertumbuhan ekonomi mereka, sebagian negara lainnya cenderung mengalami kondisi sebaliknya, dimana kemiskinan relatif masih tinggi, banyaknya pengangguran pada penduduk usia produktif, disertai dengan konflik internal yang berimbas negatif terhadap

stabilitas politik dan keamanan di dalam negeri. Di Afrika, salah satunya, kekayaan alam telah menjadi perebutan wilayah antar negara-negara kolonialisme Eropa sejak abad ke-19 yang disebut sebagai *the Scramble for Africa*. Pada masa itu, Afrika justru belum dianggap sebagai sumber pasokan utama komoditas hasil alam yang banyak dibutuhkan di pasar global seperti batu bara, besi, minyak bumi, kapas, dan tembaga. Hanya karet yang mendominasi eksploitasi sumber daya alam di Afrika, sedangkan mayoritas pasokan komoditas hasil alam berasal dari Melayu Britania dan Hindia Belanda.

Sekarang, Afrika adalah salah satu sumber utama pasokan energi, pertanian dan perkebunan, serta kekayaan mineral dan tambang dunia, seperti kromium, kobalt, platinum, kakao, dan kopi. Meskipun demikian, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi masih relatif rendah di negara-negara Afrika (Moti, 2019). Sebagian besar PDB per kapita negara-negara Afrika berada pada kelompok negara berpendapatan rendah. Bahkan, menurut Bank Dunia, PDB per kapita Afrika hanya menyumbang 3% dari pendapatan global. Selain itu, masalah kemiskinan terus melanda sebagian besar penduduk Afrika. Tidak hanya itu, kemiskinan dan kondisi ekonomi di Afrika juga dapat dikaitkan dengan rendahnya angka harapan hidup masyarakat di benua ini. Upaya pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan di kawasan ini belum membuahkan kemajuan yang berarti (العجوزة & ابوزيد, 2021).

Selain itu, lemahnya pengawasan terhadap regulasi dan supremasi hukum di tengah keberlimpahan sumber daya alam ikut berkontribusi terhadap peningkatan jumlah pelanggaran hukum seperti kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kerusakan lingkungan (Schorr & Damonte, 2021). Isu-isu ini tidak hanya berimplikasi terhadap aspek sosial ekonomi, dimana isu korupsi hasil sumber daya alam merugikan penerimaan negara, tetapi juga aspek politik keamanan, ketika penyimpangan regulasi, kerusakan lingkungan, dan pembagian hasil yang tidak adil telah memicu konflik di sejumlah negara kaya SDA (Kolstad & Søreide, 2009).

PENGERTIAN *PARADOX OF PLENTY* -- Kondisi ini dipertegas kembali dalam konsep *paradox of plenty* yang dipopulerkan oleh Terry Lynn Karl dalam karyanya '*the Perils of the Petro-State: Reflections on the Paradox of Plenty*.' Artikel ini mendiskusikan negara-negara kaya minyak seperti Iran, Venezuela, dan Nigeria yang masih menghadapi tantangan politik dan ekonomi serius, meskipun telah mengalami beberapa kali lonjakan harga minyak dunia yang seharusnya memberikan keuntungan dan stabilitas pembangunan ekonomi bagi negara-negara tersebut (Karl, 1999). Kata 'paradoks' menggambarkan situasi yang keliru dan bertentangan antara keadaan sebenarnya dengan keadaan seharusnya (Casti, n.d.). *Cambridge Dictionary* mendefinisikan kata 'paradoks' sebagai suatu situasi atau keadaan yang sepertinya mustahil atau sulit dimengerti karena berkaitan dengan dua kenyataan yang saling bertolak belakang (*Cambridge Dictionary*, 2013).

Tidak jauh berbeda, *Oxford English Dictionary* memberikan pengertian kata 'paradoks' sebagai suatu keadaan yang memiliki kenyataan saling berseberangan, sehingga menjadi aneh dan sulit dimengerti. Sementara itu, keberlimpahan (*plenty*) menunjukkan suatu jumlah yang memadai, bahkan lebih dari cukup, untuk digunakan dengan tujuan tertentu (*merriam-webster.com*). Pengertian serupa juga didefinisikan dalam *Britannica Dictionary*, keberlimpahan adalah sesuatu dalam jumlah banyak dan dianggap cukup untuk dimanfaatkan dalam keperluan tertentu (*Britannica*). Singkatnya, pengertian paradoks keberlimpahan menggambarkan situasi yang bertentangan antara yang seharusnya, yaitu kekayaan alam menjadi sumber kekuatan ekonomi negara, dengan kenyataan yang terjadi, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan permasalahan sosial ekonomi lainnya yang masih melanda negara-negara tersebut.

Benua Afrika dapat menjadi suatu studi kasus dalam mengkaji keterkaitan antara kekayaan SDA dengan pembangunan ekonomi. Dengan kekayaan SDA yang berlimpah, sebagian penduduk Afrika masih berada dalam kondisi kemiskinan ekstrem. Keberlimpahan SDA tidak memberikan dampak positif terhadap kemajuan ekonomi

sebagaimana yang diharapkan, tetapi justru mengarah pada perebutan kekuasaan dan konflik mengenai kekayaan alam yang terbatas (Muigua, 2020). Beberapa negara Afrika Sub-Sahara menjadi perhatian terkait sumber daya alam dan pembangunan ekonomi. Wilayah ini dianugerahi dengan kekayaan alam yang berlimpah dan beraneka ragam. Beberapa diantaranya adalah Republik Demokratik Kongo, Ghana, Angola, Guinea, Senegal, dan Uganda merupakan eksportir komoditas strategis global seperti tembaga, emas, lithium, dan migas. Kendati demikian, kekayaan alam ini tidak serta merta membuat pembangunan ekonomi negara-negara tersebut berkembang secara pesat, bahkan cenderung lebih rendah daripada negara-negara di belahan dunia lainnya.

Tabel 2.1 10 Negara dengan Persentase Ekspor BBM Terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan Rata-Rata PDB Perkapita Mereka

Negara	Ekspor BBM Terhadap Total Ekspor (%)	Rata-rata PDB Perkapita (US\$)			Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)
		1990- 2000	2001- 2010	2011- 2020	
Irak	100	1.541	2.452	5.392	NA
Venezuela	98	3.334	7.338	NA	NA
Aljazair	96	1.731	3.224	4.597	NA
Kuwait	96	14.821	34.409	36.386	NA
Angola	95	545	2.205	3.341	31,12
Libya	94	6.561	8.524	10.130	NA
Azerbaijan	93	493	2.767	5.776	NA
Nigeria	91	971	1.427	2.471	30,86
Guyana	88	763	2.455	5.872	NA
Qatar	87	17.837	51.594	74.806	NA

Sumber: data.worldbank.org (diolah), World Bank Poverty and Inequality Platform

KEMISKINAN NIGERIA – Negara ini acap kali menjadi rujukan studi kasus dalam menguraikan keterkaitan antara kekayaan SDA dengan pembangunan ekonomi (Dauvin & Guerreiro, 2017). Salah satu negara dengan kepemilikan cadangan dan produksi migas terbesar di dunia, Nigeria masih dikategorikan sebagai negara miskin dengan jumlah populasi terbanyak di benua Afrika, dan terbesar ketujuh di dunia. Bahkan dalam kurun waktu kurang dari setahun, terdapat kenaikan sekitar 3 juta penduduk Nigeria yang memiliki pendapatan kurang dari US\$ 1,90, dari 86,9 juta penduduk pada Juni 2018 menjadi 91 juta jiwa pada Februari 2019 (Aderounmu et al., 2021; Oniemola, 2016).

Kondisi kemiskinan ekstrem di Nigeria dikaitkan dengan tingginya angka pengangguran, dan kerusakan ekologi. Pembangunan industri migas tidak disertai dengan ketersediaan akses terhadap pendidikan yang memadai, sehingga banyak penduduk usia kerja menganggur karena tidak memiliki kecakapan dan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Sebab itu, tingkat pengangguran usia muda di daerah ini mengalami peningkatan dari 21 persen pada 2009 menjadi 24 persen pada 2016. Banyak perusahaan migas yang beroperasi di Delta Niger, wilayah utama penghasil migas Nigeria, tidak mempekerjakan karyawan lokal, tetapi mengambil tenaga kerja dari luar, bahkan dari luar Nigeria (Persson, 2018).

Secara bersamaan, ekspansi eksplorasi dan eksploitasi migas secara masif telah membawa dampak buruk terhadap lingkungan. Pertanian dan penangkapan ikan merupakan sumber pencaharian utama masyarakat Delta Niger sebelum ditemukannya sumber minyak di wilayah tersebut (Uchenna Bartholomew Nwokoma et al., 2022). Namun minimnya perhatian dan pengawasan terhadap potensi dampak negatif lingkungan dari operasional migas menyebabkan kerusakan ekologi serius yang berimbas langsung terhadap aktivitas pertanian masyarakat, dan ekosistem laut. Alhasil, banyak masyarakat kehilangan sumber mata pencaharian yang selama ini mereka tekuni, yaitu budidaya pertanian dan penangkapan ikan (Edeh & Udoikah, 2018).

Kemiskinan di Delta Niger diilustrasikan oleh badan utama PBB untuk pembangunan internasional UNDP sebagai ketidakmampuan masyarakat untuk membayar biaya pendidikan anak, memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari seperti makanan, tidak memiliki tempat tinggal, dan mengakses fasilitas kesehatan ketika sakit (Uchenna Bartholomew Nwokoma et al., 2022). Dalam aspek pendidikan, tidak hanya persoalan kemampuan finansial dari masyarakat, tetapi juga kurangnya ketersediaan fasilitas pendidikan di daerah Delta Niger yang membuat akses terhadap literasi dan ilmu pengetahuan semakin terbatas. Secara geografis, karakteristik daerah Delta Niger dicirikan dengan daerah pedesaan yang dipisahkan oleh anak sungai dan jalur perairan yang sulit dilintasi. Situasi ini membuat anak-anak harus menempuh jarak yang cukup jauh dengan keterbatasan sarana dan prasarana transportasi yang tersedia (Pepple, 2017).

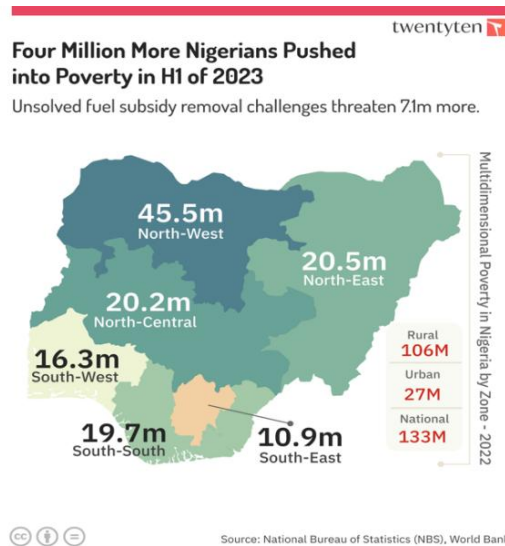
Dalam perkembangannya, pemerintah Nigeria terus berupaya untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan menyelenggarakan beragam program yang diharapkan dapat memberdayakan masyarakat miskin dan meningkatkan kondisi perekonomian mereka. Kebijakan pemerintah Nigeria ini meliputi *Structural Adjustment Program* (SAP) pada tahun 1986, *National Economic Empowerment Development Strategy* (NEEDS) pada tahun 2007, *Subsidy Reinvestment and Empowerment Programme* (SURE-P) dan *Community Services Women and Youth Employment* (CSWYE) pada tahun 2012. Tidak hanya itu, pemerintah Nigeria telah menerapkan sistem *One Stop Investment Center (OSIC)* sejak dua dekade terakhir dalam rangka mempercepat proses administrasi penanaman modal asing baik di sektor migas maupun non-migas. Selain itu, pemerintah juga memberikan kemudahan bagi perusahaan pribumi untuk berinvestasi dengan memberikan kelonggaran dalam fiskal (*fiscal term*) dan beberapa proyek strategis dengan tingkat risiko rendah.

Di bidang kelestarian lingkungan, pada awal tahun 2000an, pemerintah Nigeria menerapkan peraturan pelarangan pembakaran gas alam hasil dari ekstraksi produksi migas, atau yang dikenal dengan *No Flare Gas Policy*. Sebagai tindak lanjut dari pelarangan ini,

pemerintah Nigeria membentuk *aggregator company* yang bertugas untuk menampung *flare gas* dan menjualnya kepada konsumen baik dalam bentuk *lean gas* atau LNG. Hasil dari penjualan dari *flare gas* ini digunakan oleh pemerintah Nigeria untuk membayar sebagian besar hutang luar negerinya, bahkan hal ini mendapatkan apresiasi dunia, diantaranya berupa penghargaan dan contoh baik bagi perlindungan lingkungan (polusi) dari World Bank.

Kendati demikian, isu kemiskinan di Nigeria masih menjadi salah satu sorotan internasional karena kondisinya yang masih relatif memburuk. Besarnya kontribusi sektor migas dalam perekonomian menempatkan Nigeria sebagai salah satu negara yang rentan terhadap fluktuasi harga minyak global. Hal ini berpotensi untuk mempengaruhi indikator makroekonomi dan berkontribusi pada peningkatan tingkat kemiskinan dalam perekonomian. Sebagai contoh adalah ketika terjadi pemberhentian sanksi internasional terhadap Iran pada tahun 2015. Harga minyak dunia mengalami penurunan yang signifikan dari US\$ 105 per barel menjadi US\$ 37 per barel. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi Nigeria mengalami pelemahan yang mengarah kepada krisis ekonomi selama periode triwulan keempat 2016 hingga triwulan kedua 2017.

Kondisi makroekonomi ini semakin memperburuk situasi kemiskinan di Nigeria yang sudah berada dalam kondisi memprihatinkan sebelumnya (Agu & Nyatanga, 2020; Danaan, 2018). Studi Aderounmu et al. (2021) menunjukkan kemiskinan di Nigeria disebabkan karena tingginya angka pengangguran di negara tersebut. Tidak memiliki pekerjaan, penduduk miskin Nigeria berada dalam kondisi tidak memiliki penghasilan yang memadai untuk memenuhi kehidupan dasar mereka. Sektor ekonomi Nigeria masih terkonsentrasi pada bisnis migas, sehingga penciptaan lapangan pekerjaan pada sektor lainnya masih relatif terbatas. Untuk itu, banyak merekomendasikan agar diversifikasi ekonomi Nigeria dapat dilakukan secara optimal untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di negara tersebut.



Gambar 2.2 Kondisi Kemiskinan di Nigeria

Sumber: www.twentydaily.com

KEMISKINAN EKSTREM DI ANGOLA -- Kemiskinan merupakan salah satu isu utama dalam perkembangan sosial ekonomi Angola. Kekayaan alam berlimpah, tidak hanya minyak, tetapi termasuk antara lainnya berlian, emas, besi, dan uranium, tidak serta merta memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi Angola. Berdasarkan data World Bank, jumlah penduduk Angola dalam satu dekade terakhir bertambah secara signifikan sekitar 40 persen, dari 25,2 juta pada 2012 menjadi 35,6 juta pada 2022 (data.worldbank.org). Meski demikian, angka harapan hidup Angola berada termasuk yang paling rendah di benua Afrika yaitu 48,8 tahun untuk perempuan, dan 44,9 tahun untuk laki-laki. Ditambah dengan angka kematian anak di bawah umur 5 tahun yang cukup tinggi, yaitu 220 balita per seribu kelahiran hidup, malnutrisi ditengarai sebagai salah satu faktor penyebab kondisi gizi buruk yang berdampak terhadap kematian anak di Angola (García-Rodríguez et al., 2015).

Demikian pula pada aspek pendidikan, data Human Capital Index World Bank menunjukkan Angola masuk dalam urutan 10 negara

dengan indeks pembangunan manusia terendah yang mengkombinasikan asesmen terhadap aspek kesehatan dan pendidikan untuk memotret pembangunan manusia di suatu negara (data.worldbank.org). Sebab itu, World Economic Forum menempatkan Angola pada peringkat ke-135 dari 140 negara dalam pilar Pendidikan Dasar dan Kesehatan *Global Competitiveness Index 2022* (Garwi, 2023).

Minyak bumi telah menjadi sumber utama pendapatan nasional Angola terutama melalui aktivitas ekspor. Berdasarkan data World Bank, ekspor BBM masih mendominasi perdagangan luar negeri Angola sebesar 95 persen dari total ekspor, namun negara tersebut termasuk sebagai salah satu negara dengan kondisi kemiskinan ekstrim paling tinggi di dunia, yaitu sebanyak 31,12 persen dari total populasi. Kondisi relatif sama ditemui di Nigeria, dimana tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 30,86 persen dari jumlah keseluruhan penduduk. Padahal, besaran persentase ekspor BBM terhadap total ekspor berada pada urutan kedelapan terbesar di dunia yaitu 91 persen. Kondisi kemiskinan ekstrem ini merujuk kepada populasi yang hidup di bawah US\$ 2,15 per hari, sebagai standar garis kemiskinan internasional.

Angola dan Nigeria merupakan bagian dari negara-negara penghasil minyak terbesar di benua Afrika. Kedua negara tersebut mampu memproduksi minyak antara 1-1,5 juta barel per hari, dan menjualnya di pasar ekspor yang kemudian menjadi salah satu penghasil devisa utama serta membiayai anggaran pemerintah (Bashiru et al., 2022; García-Rodríguez et al., 2015). Penghasilan dari minyak adalah sumber daya utama anggaran pemerintah untuk mendukung program-program strategis pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Sektor minyak masih menjadi primadona ekonomi bagi kedua negara, meskipun upaya untuk mendiversifikasi ekonomi terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kontribusi ekonomi dari industri non-migas.

Untuk meningkatkan investasi asing di sektor migas, pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki iklim investasi di dalam negeri salah satunya dengan menyesuaikan beragam masukan dari lembaga keuangan internasional seperti *International Monetary Fund (IMF)* yang telah memberikan dana tambahan ke Pemerintah Angola sebesar US\$ 4,5 milyar sejak 2018. Pentingnya memastikan aturan penanaman modal yang ramah terhadap investor asing adalah untuk menjamin produktivitas sektor minyak dapat berjalan secara optimal, karena tingginya biaya yang dibutuhkan untuk operasional dan pengembangan, serta kebutuhan terhadap dukungan teknologi yang memadai, dan semua faktor tersebut sebagian besar dimiliki oleh korporasi-korporasi global.

KETERGANTUNGAN PENDAPATAN HASIL MIGAS - Ketergantungan ekonomi terhadap ekspor minyak menempatkan Angola sebagai salah satu negara yang rentan terhadap gejolak harga minyak dunia. Hal ini tercerminkan diantaranya dalam pertumbuhan ekonomi Angola dalam beberapa tahun terakhir yang mengalami pelambatan akibat melemahnya harga minyak dunia, dan turunnya permintaan minyak mentah dari Amerika Serikat (AS) (Salah Ovadia, 2018). Terdapat hubungan yang signifikan antara produksi minyak dengan pertumbuhan ekonomi di Angola, terutama karena tingginya ketergantungan terhadap pasar ekspor yang rentan terhadap gejolak pasar global (Mohammed, 2018).

Pertumbuhan ekonomi Angola sempat mencapai 14,9 persen per tahun ketika harga komoditas minyak global meningkat secara tajam pada 2002-2008. Dianggap sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan yang sangat cepat saat itu, Angola berhasil menurunkan utang sektor publik dari 49,9 persen menjadi 28,7 persen dari keseluruhan PDB. Namun keadaan sebaliknya terjadi ketika harga komoditas anjlok, Angola kembali memiliki rasio utang sektor publik yang tinggi pada periode 2012-2016 (Ufimtseva, 2019). Naik dan turunnya harga minyak dunia global memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perekonomian Angola yang sebagian besar masih disumbang oleh pendapatan ekspor minyak.

Dalam perkembangannya, tingginya tingkat dependensi ekonomi terhadap pengelolaan sektor migas ikut mempengaruhi politik luar negeri Angola baik di level bilateral, maupun di forum multilateral. Peristiwa mundurnya Angola dari keanggotaan OPEC mengejutkan dunia sekaligus meninggalkan organisasi kartel minyak dunia itu dengan 12 anggota tersisa. Keputusan untuk keluar dari keanggotaan OPEC ini bukan suatu pilihan kebijakan yang mudah bagi Angola. Sejak keanggotaannya pada 2007, Angola bersama-sama dengan anggota OPEC lainnya telah menjadi salah satu penentu penting dalam dinamika harga minyak dunia.

Namun dalam beberapa tahun terakhir dengan keterlibatan anggota-anggota non-OPEC dalam kerangka kerjasama OPEC+, sejumlah keputusan organisasi justru dianggap kurang memberikan keuntungan terhadap kepentingan anggota, antara lain adalah keputusan untuk memangkas produksi minyak masing-masing negara anggota. Sebaliknya, negara anggota seperti Angola memandang kesepakatan ini sebagai satu hal kontraproduktif terhadap kepentingan nasionalnya yang masih terus menargetkan peningkatan kinerja industri minyak dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyelesaikan masalah pengangguran di dalam negeri (Kazanci, 2023; Lawler, 2023).

KETIMPANGAN PENDAPATAN -- Kekayaan sumber daya alam juga dikaitkan dengan tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat yang terjadi di beberapa negara Afrika Sub-Sahara. Berdasarkan *World Inequality Database*, sebagian besar pendapatan yang di wilayah ini hanya dikuasai oleh sekitar 10 persen kelompok terkaya (World Inequality Database 2023). Faktor harga komoditas dianggap sebagai salah satu penyebab utama tingginya ketimpangan pendapatan dan beberapa permasalahan ekonomi lainnya.

Tingginya ketergantungan ekonomi terhadap pendapatan dari ekspor sumber daya alam menyebabkan kerentanan terhadap fluktuasi harga komoditas di pasar global. Ketika harga turun, pendapatan perusahaan yang bergantung kepada bisnis hasil SDA akan ikut

terdampak, termasuk penghasilan tenaga kerja di lapangan. Hal ini dapat mengurangi penerimaan devisa ekspor sehingga kemampuan pemerintah untuk membiayai program infrastruktur dan kebijakan pro masyarakat miskin juga menurun.

BAB 3

SOVEREIGN FUND DAN UPAYA MENGHINDARI *DUTCH DISEASE*: NORWEGIA, DAN ARAB SAUDI

A. Mengapa *Sovereign Wealth Fund*?

Fenomena *dutch disease* (DD) termasuk istilah yang populer dalam kajian-kajian ekonomi politik sumber daya alam (EPSDA). DD merujuk kepada suatu keadaan negara yang mengalami lonjakan nilai tukar seiring dengan peningkatan ekspor komoditas secara signifikan, namun pada saat bersamaan melemahkan daya saing sektor non-sumber daya (Asiamah et al., 2022). Potensi keuntungan besar dari ekspor komoditas dapat menggeser fokus kebijakan pemerintah sehingga mengabaikan industri-industri lainnya di luar sektor berbasis SDA. Sementara itu, penguatan nilai tukar membuat harga produk-produk non-komoditas menjadi kurang kompetitif di pasar ekspor. Situasi ini dapat dianggap sebagai konsekuensi makroekonomi dari fenomena *resource curse* (Ike et al., 2023).

Sebagian literatur bahkan menyebutnya sebagai *Groningen effect* untuk mengenang perekonomian Belanda sesuai penemuan gas Groningen pada 1959 (Bass, 2018). Lapangan gas Groningen, dikenal juga sebagai lapangan Slochteren, menyimpan cadangan gas berlimpah. Ditemukan pertama kali oleh *the Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)*, suatu perusahaan patungan antara Shell dan Esso, lapangan gas ini pada awalnya diperkirakan menyimpan cadangan gas sebanyak 60 milyar kaki kubik (bcm). Namun belakangan, estimasinya melonjak hingga 2.900 bcm, dimana lebih dari 2.000 bcm telah diproduksi pada 2017 (VAN DE GRAAFF et al., 2018).

Istilah DD dipopulerkan pertama kalinya dalam terbitan *the Economist* edisi 26 November 1977 (Mien & Goujon, 2022) untuk memberikan ilustrasi kondisi ketidakseimbangan perekonomian Belanda yang lebih banyak menitikberatkan pada pendapatan ekspor komoditas gas, daripada pengolahan industri non-migas. Hasil gas Groningen dijual ke beberapa negara Eropa lainnya termasuk Jerman Barat, Belgia, Perancis, dan Italia, sedangkan industri non-migas relatif menjadi kurang kompetitif di pasar global karena semakin menguatnya nilai tukar sebagai konsekuensi meningkatnya devisa dari hasil penjualan gas ke luar negeri (The Economist, 1977). Sebab itu, fenomena ini digambarkan sebagai gejala makroekonomi dari ketergantungan perekonomian suatu negara terhadap pendapatan sumber daya migas.

Untuk menghindari penyakit ini, beberapa negara telah mengembangkan serangkaian strategi termasuk diantaranya adalah pengelolaan pendapatan dari hasil SDA di bidang-bidang strategis yang menguntungkan untuk kepentingan jangka panjang melalui pengelolaan *sovereign wealth fund* (SWF). SWF secara umum dideskripsikan sebagai kendaraan investasi negara-negara penghasil (SDA) yang dikendalikan oleh pemerintah dengan mengumpulkan penghasilan komoditas SDA dalam rangka mengoptimalkannya untuk kepentingan dan tujuan tertentu (Ouni et al., 2020). SWF, disebut juga sebagai *national wealth fund*, semakin diakui sebagai sumber investasi internasional yang berasal dari negara-negara penghasil SDA dengan beberapa tujuan utama, seperti menjaga stabilitas pendapatan fiskal, tabungan masa depan, dan manajemen cadangan devisa. Dengan kata lain bahwa SWF merupakan kendaraan investasi milik pemerintah (*state-owned investment vehicles*) yang menanamkan modalnya secara global melalui proyek dan bisnis strategis di mancanegara (Stanley et al., 2024).

Norwegia adalah salah satu contoh negara yang berhasil mengkapitaliasi penghasilannya dari sumber daya minyak dengan membentuk *Government Pension Fund Global (GPF)*. Kendaraan investasi ini, bahkan, dianggap yang terbesar pada tahun 2019 oleh

Sovereign Wealth Fund Institute. Tidak hanya itu, GPFG mendapatkan apresiasi dari berbagai media internasional terkait dengan performa pengelolaan yang profesional, terbuka, dan memegang prinsip etika dan sosial. Maka tidak mengherankan jika GPFG mendapatkan skor 10 dari 10 dalam *Linaburg-Maduell Transparency (LMT) Index* (Özgül, 2019a).

Fakta demikian juga dapat kita temui dalam perkembangan ekonomi di Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir. *Saudi Vision 2030* memproyeksikan negara tersebut sebagai negara berpengaruh secara global melalui penguatan ekonomi yang tidak hanya berbasis sumber daya alam, tetapi juga sektor ekonomi non-komoditas lainnya. Sebagai motor penggeraknya, pemerintah Arab Saudi telah membentuk *Public Investment Fund (PIF)* untuk memperluas jejaring investasi mancanegara di proyek dan bisnis yang prospektif dan menguntungkan (Flynn & Aldamer, 2024), termasuk di sektor non-komoditas seperti pariwisata dan olahraga, dimana negara kerajaan tersebut ikut serta mensponsori sejumlah ajang olahraga bergengsi dunia dari sepak bola, golf, hingga balap motor (Elshaer, 2023).

Bab ini akan membahas lebih lanjut bagaimana SWF di masing-masing negara tersebut digunakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pendapatan dari sektor berbasis komoditas di dalam industri lainnya dalam rangka mencapai target-target pembangunan ekonomi strategis mereka.

B. SWF dalam Tinjauan Akademis

SWF, sebagaimana nama yang diberikan, dapat diartikan secara sederhana sebagai dana negara yang dikelola oleh pemerintah untuk berbagai kepentingan strategis nasional. Berdasarkan beberapa kampus populer, seperti *Cambridge Dictionary* dan *Merriam-Webster* kata ‘*sovereign*’ sendiri dapat digunakan sebagai kata benda dan kata sifat. Kata benda ‘*sovereign*’ merujuk kepada seseorang yang memegang kekuasaan politik tertinggi, bahkan *Cambridge Dictionary* menyebutnya dengan jelas ‘*a king or queen*’. Sementara itu, sebagai

kata sifat, ‘*sovereign*’ menjelaskan atau menggambarkan kekuasaan tertinggi, sepenuhnya mandiri, bebas, dan independen. Dari beberapa pengertian ini, SWF bisa dipahami sebagai suatu kumpulan dana yang digunakan oleh penguasa untuk menjalankan kedaulatannya secara independen.

Sejalan dengan pengertian ini, beberapa sumber literatur memberikan uraian yang lebih jelas dan mudah dimengerti tentang pengertian dari SWF. Dalam *the Palgrave Handbook of Sovereign Wealth Funds*, SWF didefinisikan sebagai entitas investasi yang dimiliki oleh negara untuk pengelolaan berbagai kepentingan ekonomi dalam rangka mengantisipasi potensi terjadinya guncangan ekonomi di masa mendatang (Nyatanyi et al., 2024). Dalam literatur lainnya, SWF merupakan dana simpanan pemerintah yang dikelola secara terpisah dari anggaran negara untuk kegiatan investasi di sektor-sektor tertentu dalam rangka memperoleh keuntungan yang maksimal. Menariknya, SWF justru berorientasi untuk memperluas jejaring investasinya secara global dalam beragam bentuk investasi dari aset finansial hingga hingga sektor industri lainnya seperti manufaktur, energi, dan properti (Mezaya et al., 2021).

Cikal bakal perkembangan SWF dapat ditelusuri sejak dibentuknya *Texas Permanent School Fund* (1854) dan *Texas Permanent University Fund* (1876), di Texas, Amerika Serikat (AS). Kumpulan dana ini dikelola untuk mendukung kegiatan pendidikan di sekolah-sekolah, dan perguruan tinggi negeri di Texas. AS merupakan salah satu negara yang memiliki banyak entitas SWF, termasuk salah satu yang terbesar adalah *Alaska Permanent Fund* dengan nilai dana kelola mencapai US\$42,3 milyar pada 2012. Salah satu catatan penting dalam pembentukan SWF di masa itu adalah sebagian besar dana yang dihimpun bersumber dari hasil kegiatan ekspor minyak dan gas (Cheraghlou, 2017; Steigum, 2013).

Gelombang pembentukan SWF terus berlanjut khususnya di negara-negara penghasil SDA. Beberapa diantaranya adalah *SAMA Foreign Holdings* yang dibentuk oleh pemerintah Arab Saudi pada 1952,

Kuwait Investment Authority yang dibentuk oleh pemerintah Kuwait pada 1953, serta *Revenue Equalization Reserve Fund* yang dibentuk oleh pemerintah Kiribati pada 1956. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor melonjaknya harga komoditas menjadi salah satu pendorong semakin meningkatnya jumlah SWF yang dikelola oleh negara-negara penghasil SDA khususnya eksportir minyak. Berdasarkan data *Sovereign Wealth Fund Institute* (SWFI), terdapat lebih dari 100 entitas SWF yang tersebar di berbagai negara, dan dua diantaranya adalah pengelola aset terbesar berbasis komoditas yaitu *Government Pension Fund of Norway* dan *the Abu Dhabi Investment Authority* (Ouni et al., 2020).

Strategi serupa juga ditemui di salah satu negara Amerika Latin tersukses dalam pengelolaan SDA, Chili. Setelah terjebak dalam stagnasi ekonomi selama periode pemerintahan otoritarian, Chili berhasil meningkatkan kinerja perekonomiannya dan merubah statusnya sebagai *a high-income economy*. Chili menjadi anggota Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), yang dikenal sebagai klub negara-negara dengan pendapatan ekonomi tinggi, pada tahun 2010. Tidak hanya itu, IMF dan Bank Dunia mengapresiasi strategi kebijakan ekonomi Chili, dan menganggap sebagai suatu model ekonomi bagi negara-negara penghasil SDA. Di balik kesuksesan ini, terdapat sejumlah strategi kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Chili termasuk membentuk dua entitas pengelola dana hasil pengelola SDA, *natural resource funds (NRFs)*, yaitu the Pension Reserve Fund dan the Economic and Social Stabilization Fund (ESSF) (Yi-chong & Leiva, 2021).

Dalam dinamika perkembangan SWF di berbagai belahan dunia ini, terdapat beberapa catatan unik yang dapat menjadi perhatian publik internasional untuk memahami transformasi SWF sebagai entitas investasi publik. Pertama, pembentukan SWF yang selama ini identik dengan negara-negara penghasil SDA, sekarang berkembang luas hingga mencakup negara-negara non-SDA. Meskipun tidak memiliki SDA yang berlimpah, mereka mampu mengoptimalkan kemampuan teknologi dan manajemen finansial untuk bersaing dalam pasar

internasional dengan mengekspor produk-produk *high-technology*, termasuk negara-negara seperti Korea Selatan, Singapura, dan Irlandia (Ouni et al., 2020). Dengan demikian sumber pendanaan SWF terbagi menjadi dua kategori yaitu SWF yang bersumber dari hasil bisnis berbasis komoditas, dan SWF dari negara-negara yang memiliki SDA terbatas (Paltrinieri et al., 2014).

Kedua, SWF juga berkembang menjadi katalisator diversifikasi ekonomi di negara-negara penghasil SDA. Mereka semakin menyadari perlunya meningkatkan stabilitas pendapatan ekonomi dengan melakukan diversifikasi kegiatan ekonomi di luar sektor berbasis komoditas. SWF secara kontinyu telah membantu negara-negara kaya SDA untuk mengurangi ketergantungan mereka terhadap pendapatan dari SDA. Entitas bisnis ini telah menciptakan peluang bisnis dan investasi di luar sektor tambang, dan migas dengan mengoptimalkan surplus dari bisnis komoditas (Ajami & Karimi, 2023).

Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), misalnya, merupakan salah satu SWF terbesar di dunia dengan nilai aset mencapai US\$1 triliun. ADIA telah berperan signifikan dalam menciptakan berbagai portofolio investasi internasional Uni Emirat Arab di luar sektor migas (Krzyszowski, 2024). Pada akhir tahun 2024 lalu, ADIA telah merilis strategi barunya dengan mengincar *private credit* dalam rangka menyesuaikan dinamika perekonomian global yang mengalami perubahan lebih cepat. Strategi investasi ADIA ini bisa dianggap relatif keluar dari *mainstream* investasi di sektor-sektor konvensional seperti *real estate* dan *government bonds* (Parasie & Bartenstein, 2024). Kendati begitu, tujuan utamanya tetap konsisten yaitu bagaimana memperoleh keuntungan maksimal dari dana simpanan yang dikelola oleh ADIA.

Strategi diversifikasi investasi juga dilakukan secara signifikan oleh *Qatar Investment Authority*, SWF milik pemerintah Qatar yang dianggap salah satu *sovereign fund* paling agresif di dunia. Dengan China misalnya, QIA telah mendanai kerjasama bisnis antara perusahaan-perusahaan Qatar dengan perusahaan-perusahaan China

senilai hampir US\$15 milyar di berbagai sektor termasuk diantaranya di industri keuangan, *e-commerce*, dan internet. Tidak hanya dengan perusahaan milik pemerintah, aliansi bisnis ini mencakup juga dengan perusahaan global China seperti Alibaba dan Baidu (Chaziza, 2020).

Ketiga, SWF telah bertransformasi tidak hanya sebagai kendaraan bisnis dan investasi, tetapi juga instrumen strategis dalam politik luar negeri suatu negara khususnya di tingkat bilateral. Kekuatan finansial dari negara-negara pemilik SWF telah bertransformasi menjadi kekuatan lunak yang berperan strategis dalam penyelenggaraan hubungan diplomatik dan kepentingan politik luar negeri. SWF merupakan perkembangan dari kebijakan ekonomi modern yang memberikan kesempatan kepada negara investor untuk menanamkan modalnya di sektor-sektor menguntungkan, dan pada saat yang sama menciptakan peluang ekonomi bagi negara-negara penerima (*host countries*) investasi untuk memanfaatkan kesempatan ini dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka.

Situasi ini menciptakan hubungan positif dan saling menguntungkan di antara kedua belah pihak (B. J. Cohen, 2009). Untuk itu, SWF sebagai suatu instrumen politik luar negeri dapat memiliki berbagai fungsi termasuk mengkapitalisasi penanaman modal untuk kepentingan ekonomi luar negeri (*foreign economic interest*) seperti cadangan devisa dan perdagangan luar negeri, serta pada saat yang sama memperkuat aliansi dan kerjasama dengan negara-negara mitra penerima SWF. Dalam beberapa tahun terakhir, investasi strategis menggunakan SWF telah digunakan untuk membiayai proyek-proyek penting seperti proyek-proyek infrastruktur di negara-negara berkembang, inovasi teknologi, dan dukungan pengembangan energi bersih di berbagai belahan dunia (Ghahramani, 2024).

C. Norway Government Pension Fund Global: Aset SWF Terbesar Dunia

Sovereign Wealth Fund Institute (SWFI) telah merilis nama 100 SWF terbesar dunia. Peringkat pertamanya ditempati oleh *Norway*

Government Pension Fund Global (GPFG) sebagai SWF terbesar dengan nilai aset lebih dari US\$1.738,8 milyar. Menariknya, keputusan investasi yang diambil oleh GPFG tidak sepenuhnya hanya berdasarkan kepada kepentingan bisnis, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor lainnya mencakup aspek lingkungan, tenaga kerja, dan transparansi di negara tujuan investasi (Kamiński, 2017). Untuk itu, GPFG memiliki *Council of Ethics* yang memprioritaskan prinsip *environmental, social, and governances* (ESG) dalam setiap keputusan investasi, sehingga tidak hanya mengejar keuntungan (Papaioannou & Rentsendorj, 2015).

Secara formal, pembentukan GPFG dilakukan melalui Undang-Undang 20 Desember 2005 yang ditetapkan oleh *Storting* (Parlemen Norwegia). GPFG secara kelembagaan terdiri dari dua elemen yaitu GPFG, sebelumnya disebut sebagai *the Government Petroleum Fund* yang dibentuk pada 1990, dan *Government Pension Fund*, sebelumnya disebut sebagai *the National Insurance Fund* ditetapkan pada 1967. Sumber dana GPFG berasal dari pendapatan sektor minyak, dan seluruh aktivitas pendukungnya (Claessens & Kreuser, 2010). Sebab itu, GPFG dianggap sebagai kelanjutan dari *the Government Petroleum Fund* (NBIM, 2006).

Misi utama dari pembentukan GPFG adalah memfasilitasi *government petroleum funds* agar dapat dikelola secara optimal untuk memberikan jaminan dan keuntungan kepada *future generations* Norwegia. Hal ini termaktub secara jelas dalam Undang-Undang terkait pembentukan GPFG, dan dalam beberapa dokumen lainnya seperti *Government Pension Fund Report to Parliament (2019)*, dan *Norges Bank Investment Fund Strategy (2020-2022)*. Dalam upaya pencapaian tujuan besar ini, salah satu strategi utama yang dilakukannya adalah melakukan diversifikasi investasi di luar sektor migas. Diversifikasi dalam konteks investasi dapat dimaknai sebagai upaya untuk mendistribusikan aset ke beberapa aset industri, kelas, dan juga ke berbagai wilayah. Tujuan besar dari diversifikasi ini pada dasarnya adalah memitigasi risiko terjadinya krisis dan ketidakstabilan pasar

yang dapat berdampak buruk terhadap portofolio investasi (Lamina, 2024).

Diversifikasi merupakan strategi penting yang menjadi salah satu perhatian utama para pengambil kebijakan di Norwegia. Faktor utamanya adalah besarnya kontribusi sektor migas terhadap struktur perekonomian Norwegia—53 persen dari total ekspor Norwegia (2019), produksinya berlimpah hingga rata-rata 3-4 juta barel per hari sejak awal 1990an. Ketergantungan yang berlebihan terhadap pendapatan migas ini dikhawatirkan akan membawa Norwegia dalam *dutch disease*. Dari aspek industri, dana kelola GPFG telah didistribusikan di beragam industri diantaranya meliputi industri bahan dasar, *consumer goods*, keuangan, perawatan kesehatan, teknologi, dan telekomunikasi. Satu hal yang menjadi perhatian dalam alokasi investasi ini adalah ketentuan batas maksimum investasi di masing-masing sektor untuk mengurangi risiko yang dapat terjadi akibat gejolak pasar.

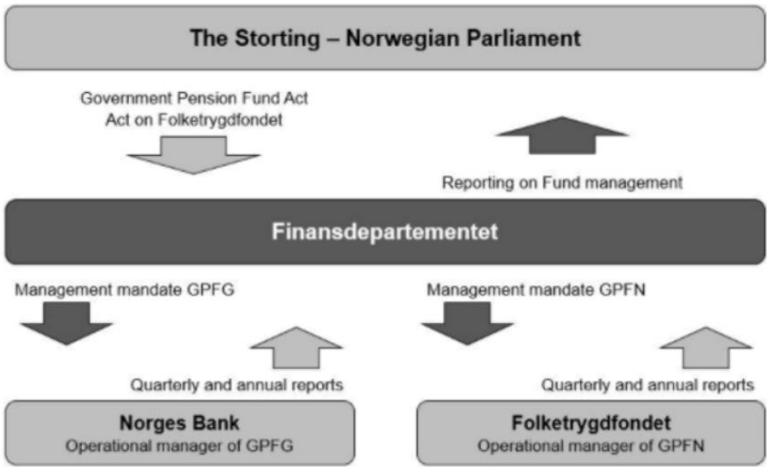
Sebagai contoh, penanaman modal pada portofolio industri tidak boleh melebihi 70 persen dari keseluruhan, sedangkan investasi pada obligasi harus kurang dari atau sama dengan 30 persen. Tidak hanya beragam dalam segi industri, diversifikasi investasi GPFG juga diwujudkan dalam penanaman modal lintas benua. Pada 1998, tujuan utama investasi GPFG menysasar empat wilayah berbeda di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Oseania. Tiga tahun kemudian, pada 2001, untuk pertama kalinya GPFG melakukan penanaman modal di pasar Amerika Latin. Pada 2004, distribusi investasi meluas hingga ke kawasan Timur Tengah dan Afrika (Gómez-Pavón Durán, 2021).

Keberhasilan diversifikasi ini tentunya didukung juga oleh tata kelola organisasi yang baik dan profesional. Hal ini terlihat dari struktur tata kelola yang melibatkan banyak pihak sehingga meminimalisir terjadinya kekeliruan dalam pengambilan keputusan. Aturan-aturan mendasar ini telah ditetapkan oleh Parlemen Norwegia dalam Undang-Undang mengenai pembentukan GPFG. Sehingga Parlemen

ikut berperan dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan dana investasi GPFG.

Meskipun, GPFP tidak memiliki dewan eksekutif dan tim administratif, secara hukum, manajemen GPFG dikendalikan langsung oleh Kementerian Keuangan. Pengelolaan aset keuangan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Pada bagian pertama adalah pembentukan kebijakan umum yang merupakan tanggung jawab dari Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan menetapkan beberapa dasar pengelolaan yang krusial seperti prinsip-prinsip etika dan pengelolaan kelembagaan, serta strategi investasi dana. Selanjutnya adalah menjadi bagian dari Bank Sentral Norwegia bersama-sama dengan *Norges Bank Investment Management* untuk menjalankan operasional aset keuangan ini (Gómez-Pavón Durán, 2021; Özgül, 2019b).

Gambar 3.1 Tata Kelola Government Pension Fund Global - Norwegia



Sumber: (Gómez-Pavón Durán, 2021)

Maka tak heran jika aset investasi *Norway Fund* dianggap paling besar di dunia. Berdasarkan laporan tahunan GPFG 2024, terdapat empat sektor yang menjadi penyumbang keuntungan investasi terbesar yaitu teknologi, keuangan, *consumer discretionary*, dan *industrials*. Menurut laporan tersebut, kontribusi terbesar bersumber dari investasi di perusahaan-perusahaan teknologi informasi dan komputer termasuk NVIDIA Corp, Apple Inc, dan Amazon.com. Sementara itu, kinerja terburuk terjadi dalam investasi di beberapa perusahaan multinasional lainnya seperti Samsung Eletronics, Nestlé AS, dan Intel Corp (NBIM, 2025). Teknologi memang telah menjadi salah satu target utama investasi GPFG secara global. Strategi bisnis ini dilakukan untuk memanfaatkan perkembangan pasar global yang sedang mengalami lonjakan permintaan terhadap *artificial intelligence (AI)* dan komponen semikonduktor (Lundgren, 2025).

Tabel 3.1 Return on the fund's equity investments in 2024. Measured in international currency and sorted by sector. In percent.

Sector	Return	Share of equity investments ¹
Technology	35.1	27.9
Financials	27.8	15.9
Consumer discretionary	19.3	14.8
Industrials	16.2	13.1
Health care	5.1	10.2
Real estate	7.3	5.1
Consumer staples	-0.2	4.8
Energy	3.8	3.3
Basic materials	-7.3	3.2
Telecommunications	7.6	3.0
Utilities	10.9	2.4

¹ Does not sum up to 100 percent because cash and derivatives are not included.

Sumber: (NBIM, 2025)

Di sisi lain, dalam banyak diskusi mengenai peran SWF sebagai instrumen politik luar negeri, GPFG menjadi salah satu sorotan karena besar dan beragamnya aset yang dikelola secara global. Dengan karakteristik geografis dan populasinya, Norwegia dikategorikan

dalam *small state foreign policy* yang cenderung bergantung kepada kekuatan negara-negara besar (*major powers*) dan sistem internasional. Kepentingan politik luar negeri dan prioritas utama Norwegia dapat dikategorikan setidaknya dalam beberapa hal (1) kerjasama internasional dan tatanan hukum internasional, (2) bisnis, sosial, dan pengembangan pengetahuan, dan (3) perlindungan lingkungan dan pengelolaan laut (Steinveg, 2024). Kategorisasi ini sangat erat kaitannya dengan Norwegia dalam konteks geopolitik, geoekonomi, dan politik internasional. Sebagai negara kecil yang sangat bergantung dari penjualan energi minyak, stabilitas pasar global menjadi sangat krusial untuk memastikan keuntungan ekonomi keberlanjutan. Terlibat aktif dalam organisasi internasional, seperti OECD, NATO, PBB, adalah suatu pilihan untuk memperkuat eksistensi ekonomi, dan memperkuat jejaring keamanan global. Sementara itu, sebagai negara yang sebagian besar wilayahnya di kelilingi oleh lautan, Norwegia memberikan perhatian besar kepada permasalahan lingkungan dan berbagai hal terkait dengan pengelolaan sektor kelautan.

Menggunakan pemahaman terhadap gambaran umum politik luar negeri Norwegia ini, maka bukan sesuatu yang mengherankan jika portofolio investasi GPFG banyak dikembangkan melalui perusahaan-perusahaan multinasional asal AS, seperti Apple Inc., Microsoft Corp, dan Nvidia Corp. Melalui GPFG, Norwegia merupakan pemilik saham kedelapan terbesar di Apple Inc, dengan kepemilikan saham 1,22 persen senilai US\$46,2 milyar, sedangkan kepemilikan saham di Microsoft mencapai 1,26 persen senilai US\$43,8 milyar (Lundgren, 2025; Solsvik, 2022). Keterlibatan korporasi dalam politik pemerintahan AS telah menjadi salah satu diskusi akademik yang terus berkembang. Studi Lee (2023), misalnya, mengungkapkan bagaimana keterlibatan anak perusahaan asing dalam perpolitikan dalam negeri salah satunya melalui *the Political Action Committee*, entitas penggalangan dana untuk kampanye politik partai di AS. Dalam perkembangan terakhir bahkan perusahaan-perusahaan berbasis teknologi telah menjadi basis pendanaan politik dalam proses

terpilihnya Donald Trump untuk kedua kalinya sebagai Presiden AS, termasuk dalam hal ini adalah donasi pribadi Tim Cook, CEO Apple Inc, sebesar US\$ 1 juta kepada komite pelantikan Trump (Duffy & Matthews, 2025)

Secara bersamaan, Norwegia adalah salah satu negara Eropa yang memberikan perhatian khusus terhadap isu-isu keberlanjutan lingkungan. Kendati menikmati pendapatan besar dari sektor migas, Norwegia menempatkan kebijakan pembangunan berkelanjutan sebagai salah satu prioritas pemerintah baik di dalam negeri, maupun di luar negeri. Letak geografisnya yang berada berdekatan dengan Kutub Utara menempatkan Norwegia diantara negara-negara paling rentan terhadap semakin buruknya dampak pemanasan global.

Dari segi ekonomi, Norwegia merupakan salah satu produsen utama dunia komoditas ikan salmon Atlantik, dan komoditas budidaya ikan adalah komoditas ekspor paling penting kedua bagi negara tersebut. Hanya sekitar 5 persen produksi Salmon yang dipasarkan di dalam negeri, sedangkan sisanya dijual ke lebih dari 100 negara. Perubahan iklim menjadi ancaman nyata terhadap keberlangsungan bisnis ini, karena dapat berpengaruh secara struktural terhadap budidaya ikan. Perubahan temperatur adalah salah satu faktor yang sangat menentukan dalam akuakultur karena dapat berimplikasi terhadap laju pertumbuhan, ledakan alga, penyakit dan parasit (Bagdatlı et al., 2023).

Di sisi lain, perubahan iklim juga dikaitkan dengan potensi hujan lebat dan banjir yang diperkirakan akan semakin memburuk di Norwegia dalam beberapa tahun mendatang. Kondisi ini menjadi permasalahan serius bagi penduduk Norwegia yang mengandalkan sumber air permukaan sebagai sumber air minum dan pengolahan pangan. Intensitas hujan deras dan banjir secara terus menerus dapat merusak infrastruktur air dan kebersihan, khususnya di waduk-waduk yang sudah tua, sehingga kotoran dan limbah dapat dengan mudah mengkontaminasi air dan membawa potensi penyakit. *The Norwegian Surveillance System for Communicable Diseases* mendokumentasikan

penyebaran wabah penyakit ini yang terjadi setiap tahun (Hyllestad et al., 2023).

Oleh sebab itu, persoalan keberlanjutan ekologi telah menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Norwegia. Menjaga keberlangsungan lautan dan konservasi lingkungan dilakukan diantaranya dengan memberikan dukungan pendanaan dalam proyek-proyek dekarbonisasi, pengembangan teknologi dan energi bersih, serta riset-riset terkait dengan konservasi lingkungan. Hal ini sejalan dengan mandat yang diberikan oleh Kementerian Keuangan Norwegia kepada NBIM untuk menyesuaikan portofolio investasi dengan target *global net zero emissions* dan Perjanjian Paris terkait dengan mitigasi perubahan iklim (Tyszkiewicz, 2025). Dengan komitmen lingkungan ini, GPFG semakin dikenal luas sebagai *'responsible investor'* global yang juga memberikan pengaruh positif terhadap investor dan pelaku bisnis di tingkat global. Istilah *responsible investment* sendiri merujuk kepada strategi bisnis dan investasi yang mengkombinasikan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam manajemen korporasi dan pengelolaan bisnis jangka panjang (UNPRI, 2019).

Dalam pelaksanaannya, NBIM selaku pelaksana operasional GPFG akan bertindak sebagai *active and responsible investor* dalam akuisisi dan pembelian saham suatu perusahaan. NBIM akan melakukan evaluasi dan penyesuaian-penyesuaian terhadap standar dan kebijakan korporasi untuk memenuhi ketentuan lingkungan dan mengendalikan dampak sosial yang mungkin muncul sebagai akibat dari operasional perusahaan. Dengan perannya sebagai investor aktif, NBIM berkomitmen penuh untuk mempengaruhi operasional perusahaan dengan beragam pendekatan, terutama dengan mempromosikan secara konsisten standar ESG dalam pertemuan-pertemuan pemegang saham.

Tidak hanya itu, NBIM secara berkala melakukan pertemuan dengan para otoritas regulasi dan berkolaborasi dengan investor lainnya (Halvorsen, 2023). Meskipun dalam realitanya terdapat beberapa hal

yang bertolak belakang dengan prinsip ESG ini, seperti keputusan Norwegia beberapa waktu lalu untuk mempertahankan investasi GPFG di beberapa perusahaan Israel di Wilayah Pendudukan Palestina (OPT). Parlemen Norwegian menolak tekanan untuk melarang investasi GPFG di wilayah OPT, kendati beberapa elemen masyarakat sipil di dalam negeri dan internasional, termasuk diantaranya adalah *the Norwegian Confederation of Trade Unions* dan *Amnesty International*, telah menyampaikan keresahan mereka agar GPFG mendivestasi sahamnya di daerah tersebut (Tuck, 2025). Bahkan, *Amnesty International* secara tegas menyatakan bahwa divestasi GPFG dari bisnis di OPT dapat menjadi langkah krusial untuk menghentikan upaya ilegal Israel menguasai wilayah tersebut (Amnesty, 2025).

Lebih dari itu, keputusan untuk mempertahankan investasi GPFG di OPT merupakan bentuk inkonsistensi dari prinsip dan tujuan utama yang telah digariskan oleh pemerintah Norwegia sendiri “*we risk losing our credibility as a financial investor if we use the Fund (GPFG) as an instrument in our foreign policy*” (Halvorssen & Eldredge, 2014). Upaya melanggengkan bisnis di OPT adalah suatu bentuk dukungan dan keberpihakan politik terhadap upaya ilegal Israel yang tentunya jauh dari prinsip ESG dan nilai-nilai kemanusiaan.

D. Public Investment Fund & Saudi Vision 2030

Selain Norwegia, rangkaian strategi dan kebijakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sektor migas juga dilakukan oleh Arab Saudi sebagai salah satu produsen terbesar minyak dunia. Dalam analisis terbarunya, *the US Energy Information Administration (EIA)* menempatkan Arab Saudi sebagai eksportir *crude oil* terbesar dunia, dan negara produsen minyak mentah terbesar ketiga dunia. Rata-rata produksi minyak mentah Arab Saudi mencapai 9,5 juta bph pada 2023. Jumlah ini sedikit turun sekitar 9 persen dari produksi tahun sebelumnya (2022) yang mencapai 10,4 juta bph. Penurunan produksi ini dilakukan sebagai bagian dari kesepakatan OPEC+ untuk mengurangi produksi dalam rangka menyeimbangkan harga pasar di

tengah-tengah meningkatnya produksi dari negara-negara non-OPEC (The US EIA, 2024).

Diversifikasi ekonomi merupakan salah satu tema kebijakan utama dalam pemerintahan Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir. Di samping karakteristik sumber daya minyak yang *depletable*, pemerintah Arab Saudi memandang diversifikasi sebagai suatu strategi kebijakan untuk menghindari ketidakpastian ekonomi yang dapat disebabkan oleh *external shocks* seperti krisis ekonomi global, dan fluktuasi harga komoditas.

Tidak hanya itu, kebijakan diversifikasi ini dianggap dapat membawa dampak positif terhadap peningkatan kualitas perekonomian di dalam negeri dengan semakin meningkatnya performa industri non-migas, kontribusi sektor swasta, dan mengembangkan produksi komponen dan muatan lokal. Situasi dan kondisi ini diharapkan dapat menciptakan ketahanan ekonomi nasional yang lebih kuat dan menciptakan ruang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi Arab Saudi (Alsweilem et al., 2024; Havrlant & Darandary, 2021).

Latar belakang ini dapat dipahami dengan melihat kembali bagaimana beberapa guncangan ekonomi global turut mempengaruhi kondisi perekonomian Arab Saudi yang sangat bergantung kepada bisnis migas. Krisis finansial global 2008, misalnya, telah menjadi pemicu pelambatan ekonomi di berbagai belahan dunia. Hal ini disebabkan karena semakin terintegrasinya industri perbankan dan keuangan dunia, sehingga dampak negatif dari gejolak pasar keuangan Amerika Serikat dapat dirasakan secara global.

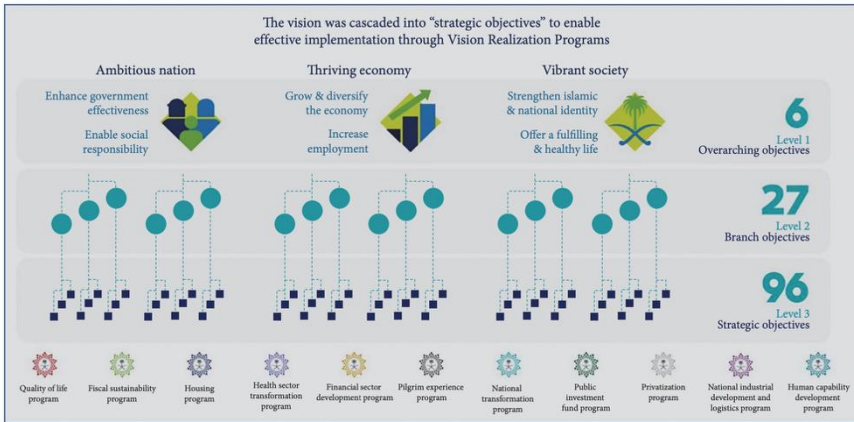
Lebih dari itu, situasi krisis ini juga berdampak terhadap sektor lainnya termasuk juga pasar energi dunia. Menurunnya permintaan terhadap komoditas minyak terjadi diantaranya karena penurunan produksi di sektor industri dan kegiatan investasi imbas melambatnya perekonomian global. Alhasil, dengan pendapatan ekspor yang lebih dari 90 persennya disumbang oleh komoditas minyak, Arab Saudi harus menghadapi anjloknya harga minyak di pasar internasional,

dari US\$147,27 per barel pada July 2008 menjadi US\$77,2 per barel pada April 2010 (Gauri, 2012).

Fluktuasi harga ini berlanjut karena banyaknya peristiwa politik global yang ikut mempengaruhi pasar energi dunia, dan meningkatnya produksi minyak negara non-OPEC, seperti Rusia dan Amerika Serikat yang secara signifikan berpengaruh terhadap faktor *supply-demand* energi dunia (Yang et al., 2022). Pada masa pandemi COVID-19, harga minyak kembali menurun secara signifikan dari US\$115 per barel menjadi US\$45 per barel, dan ini secara signifikan mempengaruhi pendapatan ekspor Arab Saudi dari sektor migas (Ma et al., 2021; Sayed et al., 2021).

Sebab itu, diversifikasi ekonomi merupakan hal yang sangat krusial dalam strategi kebijakan ekonomi Arab Saudi masa kini. Prioritas kebijakan ini kembali dipertegas oleh Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi dalam Saudi Vision 2030 yang menargetkan bebas dari ketergantungan ekonomi minyak melalui diversifikasi ekonomi, sosial, dan politik (Horschig, 2016). Dalam visi tersebut, terdapat tiga tema besar yang ingin dicapai, yaitu menjadi negara yang ambisius, ekonomi yang berkembang pesat, dan masyarakat yang bersemangat. Dari ketiga tema utama ini pada tema kedua secara jelas dinyatakan bahwa pencapaian *thriving economy* diindikasikan dengan pertumbuhan dan diversifikasi ekonomi, serta meningkatnya lapangan pekerjaan (A. Ahmad et al., 2023).

Gambar 3.2 Visi Arab Saudi 2030



Sumber: <https://www.vision2030.gov.sa/> (A. Ahmad et al., 2023)

Salah satu strateginya adalah pembentukan *Public Investment Fund* (PIF) yang menargetkan peningkatan nilai aset dari SAR600 milyar menjadi lebih dari SAR7 triliun (Alemahu, 2023). PIF memiliki peran besar dalam pengelolaan aset dan menghasilkan keuntungan yang dibutuhkan untuk membiayai program-program strategis dalam pencapaian Visi 2030. Meskipun secara historis SWF bukan merupakan sesuatu yang baru dalam strategi kebijakan pemerintah Arab Saudi. Sebelumnya telah dibentuk lembaga SWF yang relatif lebih kecil pada tahun 2008 yaitu *the Saudi Arabian Monetary Authority* (SAMA) dan Sanabil.

Untuk menghasilkan investasi yang menguntungkan, salah satu strategi utama PIF adalah membangun portofolio investasi di luar negeri yang dianggap sebagai salah satu strategi krusial untuk membangun keberagaman dalam pengembangan bisnis di luar sektor migas. PIF telah mengakuisisi saham di berbagai perusahaan asing salah satunya di Amerika Serikat dengan peningkatan nilai aset yang signifikan dari US\$2,2 milyar menjadi US\$10,1 milyar pada 2020 (Montambault Trudelle, 2023).

Lebih dari itu, nilai kelola aset PIF di kawasan Eropa bahkan mencapai US\$84,7 milyar selama periode 2017-2024. Strategi terbarunya adalah membuka kantor perwakilan baru untuk anak usahanya di Paris, Perancis, dalam rangka memperkuat penetrasi bisnis di pasar Eropa. Data terbaru menunjukkan nilai investasi PIF di Perancis mencapai US\$8,6 milyar yang diakui ikut membantu menciptakan 29.000 lapangan kerja baru di negara tersebut. Tidak hanya di Paris, internasionalisasi PIF juga telah dilakukan dengan membuka kantor anak perusahaan di New York, London, Hong Kong, dan Beijing (Hadchity, 2025).

Strategi internasionalisasi berhasil secara signifikan meningkatkan nilai aset yang dikelola oleh PIF secara global. Rilis data terakhir dari PIF menunjukkan kenaikan nilai total aset sebanyak 18 persen, dari US\$976 milyar pada 2023 menjadi US\$1,15 trilyun pada 2024. Demikian pula dalam segi pendapatan, nilainya melonjak tajam sebanyak 25 persen, dari US\$88,3 milyar pada 2023 menjadi US\$110,1 milyar pada 2024. Penyumbang utama dari pendapatan ini berasal dari beberapa portofolio investasi kunci seperti Savvy Games Group, Ma'aden, STC, the National Commercial Bank, AviLease, dan Gulf International Bank (Saudi Gazette, 2025).

Menariknya, portofolio investasi ini menunjukkan kuatnya diversifikasi bisnis yang telah dilakukan oleh PIF dalam memenuhi tren permintaan global. Pendirian perusahaan jasa investasi gim Savvy Games Group adalah salah satu bukti upaya perluasan pengembangan usaha yang tidak lagi hanya berorientasi kepada sektor-sektor konvensional, tetapi juga menyesuaikan dengan kebutuhan pasar global yang didominasi oleh konsumen usia produktif. Berdasarkan data Bloomberg, Savvy Games Group merupakan korporasi yang menyediakan layanan investasi dan pengembangan bisnis di bidang permainan dan *esports* diantaranya melalui dukungan kepada para pengembang dan inovator teknologi permainan, serta penyediaan jasa konsultasi (Saudi Gazette, 2025).

Industri gim adalah salah satu bisnis yang sedang berkembang pesat karena tingginya tuntutan pasar terhadap hiburan dan semakin terintegrasinya teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan, sudah banyak inovasi teknologi yang dilakukan termasuk mengkombinasikan teknologi *artificial intelligence* ke dalam permainan yang terhubung secara langsung dengan internet, menghasilkan konektivitas antar pemain secara global. Maka tidak mengherankan jika hasil riset *Boston Consulting Group* (BCG) menunjukkan lonjakan pendapatan industri permainan dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 13 persen dari US\$131 milyar pada 2017 menjadi US\$211 milyar pada 2021. Meski demikian, BCG juga memproyeksikan pelambatan pertumbuhan industri ini terutama setelah pandemi COVID-19 dengan kembalinya rutinitas normal perkantoran dan persekolahan (BCG, 2024).

Dalam skala yang lebih luas, strategi investasi PIF di luar negeri tidak hanya memberikan keuntungan secara ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen politik strategis bagi Arab Saudi dalam kancah politik global. Perspektif ekonomi politik internasional menggarisbawahi pentingnya kekayaan ekonomi sebagai salah satu sumber kekuatan politik negara. Dengan kekayaan negara yang dimiliki, pemerintah dapat membiayai program strategis pemerintah termasuk di bidang pertahanan, pendidikan, dan teknologi yang berpotensi meningkatkan kapabilitas kekuatannya di tingkat global (O'Brien & Williams, 2020). Semakin tinggi penghasilan suatu negara, maka semakin besar ruang finansial yang dimilikinya untuk merealisasikan target-target strategis baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Dalam hal ini, kekuatan sektor pertahanan dapat menjadi salah satu gambaran dari kemampuan ekonomi Arab Saudi dalam memperkuat salah satu sektor yang sangat dibutuhkan dalam menjaga kedaulatan nasional, dan memperkuat pengaruh posisi negara dalam politik global. Rilis data terbaru *GlobalFirepower.com*, suatu laman statistik yang secara berkala melacak dan menelusuri data terbaru di bidang pertahanan dan keamanan, menempatkan Arab Saudi dalam lima besar negara dengan anggaran pertahanan terbesar di dunia bersama-

sama Amerika Serikat, China, Rusia, dan India. Pada 2025, anggaran pertahanan Arab Saudi mencapai US\$74,7 milyar, sedikit di bawah peringkat India yang berada di peringkat keempat dengan nilai anggaran sebesar US\$75 milyar (GlobalFirepower.com, 2025).

Sejalan dengan data ini, *Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)*, lembaga nirlaba berbasis di Swedia yang telah dikenal secara luas khususnya dalam riset-riset politik keamanan, mengatakan bahwa Arab Saudi merupakan negara dengan anggaran pertahanan terbesar di wilayah Timur Tengah dengan nilai perkiraan mencapai US\$80,3 milyar pada 2024. Kendati begitu, SIPRI menilai angka ini lebih rendah 20 persen daripada alokasi anggaran pertahanan Arab Saudi pada 2015. SIPRI mengaitkan besarnya anggaran pertahanan Arab Saudi pada saat itu dengan harga minyak yang melonjak sehingga menghasilkan pendapatan yang signifikan dari sektor minyak (Liang et al., 2025). Laporan SIPRI ini juga memperkuat argumentasi bahwa kekayaan ekonomi berhubungan secara signifikan dengan kapabilitas pertahanan dan keamanan nasional suatu negara.

Lebih dari itu, PIF tidak hanya berhasil menjadi instrumen untuk menghasilkan secara signifikan pendapatan nasional, tetapi juga berkembang menjadi alat strategis yang digunakan untuk kepentingan politik luar negeri Arab Saudi. Sebagai institusi yang dibentuk oleh pemerintah, program dan strategi investasi internasional yang dijalankan oleh PIF pada dasarnya memiliki keterkaitan kuat dengan berbagai kepentingan pemerintah Arab Saudi terhadap negara tujuan.

Secara organisasi PIF berada di bawah kendali langsung Putra Mahkota Pangeran Mohammed Bin Salman (MBS) yang telah berupaya untuk menyelaraskan antara kepentingan ekonomi dalam investasi internasional PIF dengan strategi dan penyelenggaraan kebijakan luar negeri Arab Saudi (Flynn & Aldamer, 2024). Hal ini tidak lepas dari latar belakang peran dan pengalaman Pangeran MBS dalam pemerintahan selama beberapa tahun terakhir, seperti

penugasan sebagai Menteri Pertahanan, dan Ketua Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan, Arab Saudi (ALJAZEERA, 2017). Kombinasi antar berbagai pengalaman politik dan ekonomi ini turut mempengaruhi keputusan-keputusan penting dalam program investasi internasional PIF di sejumlah negara.

Diantara investasi PIF ke luar negeri yang terbesar adalah pengembangan bisnis *startup* di Amerika Serikat. Menurut rilis berita *US-Saudi Business Council*, Nile, perusahaan rintisan di bisnis jejaring teknologi informasi Amerika Serikat, menerima pendanaan investasi yang signifikan bernilai US\$175 juta pada 2023. Aksi korporasi ini dilakukan oleh dua perusahaan yang dimiliki oleh PIF yaitu March Capital dan Sanabil Investment. Selain itu, PIF juga memberikan suntikan dana sebesar US\$350 juta kepada Axiom Space yang bemarkas di Houston melalui AlJazira Capital, anak perusahaan Bank AlJazira yang memiliki perjanjian kerjasama dengan Saudi Real Estate Refinance Company (SRC), entitas bisnis milik PIF (US-Saudi Business Council, 2023).

Menariknya, bisnis rintisan digital ini dianggap sebagai salah satu yang paling rentan terhadap faktor-faktor eksternal, seperti pandemi Covid-19 dan ketegangan geopolitik yang dapat menimbulkan ketidakpastian (Aldianto et al., 2021; Wimelius et al., 2023). Ketergantungannya terhadap dukungan permodalan eksternal menempatkan perusahaan rintisan dalam posisi yang harus dapat menjanjikan pertumbuhan dan keuntungan. Hal ini bukan sesuatu yang mudah bagi perusahaan rintisan khususnya setelah mereka menerima permodalan. Selain usianya yang muda, usaha-usaha rintisan ini harus bersaing dengan para pelaku bisnis yang sudah lebih mapan, ditambah lagi dengan pergeseran pasar global yang dapat berubah dengan cepat. Sehingga secara logika keputusan untuk berinvestasi besar-besaran di perusahaan rintisan digital ini adalah sesuatu yang berisiko dan bertolakbelakang dari prinsip utama PIF yaitu untuk menghasilkan pendapatan investasi yang stabil dan menguntungkan.

Kendati demikian, investasi PIF Arab Saudi di Amerika Serikat tidak mudah untuk dipisahkan dari latar belakang hubungan diplomatik kedua negara yang sangat dekat. Arab Saudi selama ini dipandang sebagai mitra yang memiliki pengaruh politik yang signifikan dalam politik kawasan Timur Tengah, terutama karena kemampuannya untuk menjadi produsen migas global, dan pengaruh globalnya khususnya di negara-negara Muslim (Carnegie Endowment, 2024). Sebaliknya, Arab Saudi melihat Amerika Serikat sebagai negara kekuatan besar baik secara ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan. Sebab itu, kemitraan dan kerjasama dengan Amerika Serikat merupakan strategi Arab Saudi untuk melindungi eksistensi politik kekuasaannya di Timur Tengah, diantaranya melalui keberlanjutan suplai peralatan militer, teknologi pertahanan, dan keberadaan pangkalan militer Amerika Serikat di Arab Saudi (Carnegie Endowment, 2024; Elshehaby, 2025; Ulrichsen, 2021).

Tidak hanya dengan Amerika Serikat, pergeseran geopolitik dunia telah memberikan ruang yang semakin besar kepada kekuatan-kekuatan ekonomi baru, seperti China, Rusia, dan beberapa negara berkembang lainnya, dalam menyikapi isu-isu global. Dinamika ini ikut mempengaruhi strategi penyelenggaraan kebijakan luar negeri Arab Saudi yang berupaya mengurangi ketergantungan politiknya terhadap Amerika Serikat, dengan memperluas kemitraan dengan negara-negara ekonomi besar lainnya (Sager, 2025), termasuk dalam hal diversifikasi investasi PIF di luar negeri. Kerjasama dengan China misalnya, PIF Arab Saudi telah berinvestasi sebesar US\$50 milyar dalam enam perusahaan jasa keuangan terbesar milik China pada 2024. Nilai ini merepresentasikan 1,5 lebih besar daripada total aliran masuk investasi langsung asing ke China pada 2023 (South China Morning Post, 2024).

Strategi investasi ini merupakan salah satu pilihan strategis dalam politik luar negeri Arab Saudi. China sebagai salah satu negara dengan perkembangan industrialisasi yang sangat pesat membutuhkan stabilitas pasokan energi minyak, dan ini menempatkannya sebagai salah satu importir minyak terbesar dunia. Secara bersamaan, Arab

Saudi adalah salah satu eksportir minyak terbesar dunia, sehingga terbentuk suatu kepentingan strategis antara kedua belah pihak. Dalam kemitraan ini, Arab Saudi juga berharap bahwa kerjasama yang saling menguntungkan ini dapat mendukung pencapaian Saudi Vision 2030 melalui keunggulan teknologi dan investasi dari China (Al-Tamimi, 2024).

Signifikansi dari perkembangan kolaborasi ini diantaranya ditunjukkan dalam *China's Triple Summit* yang diselenggarakan di Riyadh, Arab Saudi pada Desember 2022. Tidak tanggung-tanggung, pertemuan tingkat tinggi antara Presiden China, Xi Jinping, dengan Raja Salman, Arab Saudi, dibarengi dengan dua pertemuan besar lainnya yaitu *China – Gulf Cooperation Council (GCC) Summit* dan *China-Arab States Summit for Cooperation and Development* (Niu & Wang, 2023). Terdapat beberapa hal penting untuk memahami peristiwa bersejarah ini.

Pertama, negara-negara Arab yang dimotori oleh *Gulf Countries* memiliki pandangan yang sama terhadap pentingnya memperluas hubungan dengan China, dan negara-negara di belahan Asia timur lainnya yang dicirikan dengan kuatnya pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas pasar domestik. Kedua, pertemuan multilateral yang melibatkan banyak negara Arab tersebut menunjukkan posisi strategis Arab Saudi dalam dinamika politik kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara. Kesediaan negara-negara Arab untuk memberikan kepercayaan kepada Arab Saudi sebagai tuan rumah pelaksanaan konferensi tingkat tinggi tersebut dapat menjadi suatu gambaran tingginya kredibilitas negara penyelenggara dan rekognisi negara-negara peserta terhadap pengaruh global Arab Saudi. Di sisi lain, kehadiran Presiden Xi Jinping untuk bertemu dengan Raja Salman, dan pemimpin negara-negara Arab lainnya di Arab Saudi mengindikasikan suatu penghormatan dan pengakuan terhadap Arab Saudi sebagai negara kekuatan utama di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara.

BAB 4

SUMBER DAYA MANUSIA: UPAYA MENGHINDARI *RESOURCE CURSE*

Sumber daya manusia (SDM) telah menjadi salah satu unsur utama dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara maju. Tingginya kualitas pembangunan SDM memberikan ruang yang signifikan bagi negara untuk berinovasi dan meningkatkan kapabilitas teknologinya, sehingga dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan studi Doyle & O'Connor (2013), sebagian besar negara-negara maju seperti Kanada, Amerika Serikat, Finlandia, Swiss, dan Jepang merupakan penghasil terbesar jumlah paten teknologi baru yang dibutuhkan oleh pasar global. Mereka mampu menghasilkan rata-rata lebih dari 100 paten per tahun per juta populasi pada 2008. Dalam konteks transisi energi misalnya, Jerman sebagai salah satu negara ekonomi maju yang sangat dikenal dengan kemajuan teknologinya mengakui kontribusi penting SDM berkualitas dalam memperkuat pembangunan energi berkelanjutan di negaranya. Termasuk dalam hal ini adalah pembentukan komunitas energi di Eropa, dimana kelompok masyarakat merupakan unsur krusial dalam membangun kemandirian energi baru dan terbarukan, mengalami kendala dalam minimnya keterampilan SDM khususnya di bidang pemasaran dan penjualan. Sementara itu, pengembangan model bisnis komunitas energi yang relatif baru ini sangat memerlukan kedua kompetensi itu (Herbes et al., 2021).

Secara tradisional, modal manusia (*human capital*) meliputi pengetahuan, keahlian dan keterampilan manusia yang diperoleh dari belajar, dan pengalamannya dalam bidang-bidang tertentu. Namun belakangan, pengertian ini berkembang menjadi lebih luas dengan mencakup aspek kepribadian seperti kreativitas, *work attitudes*, ketangguhan dan ketekunan. Perkembangan ini sejalan

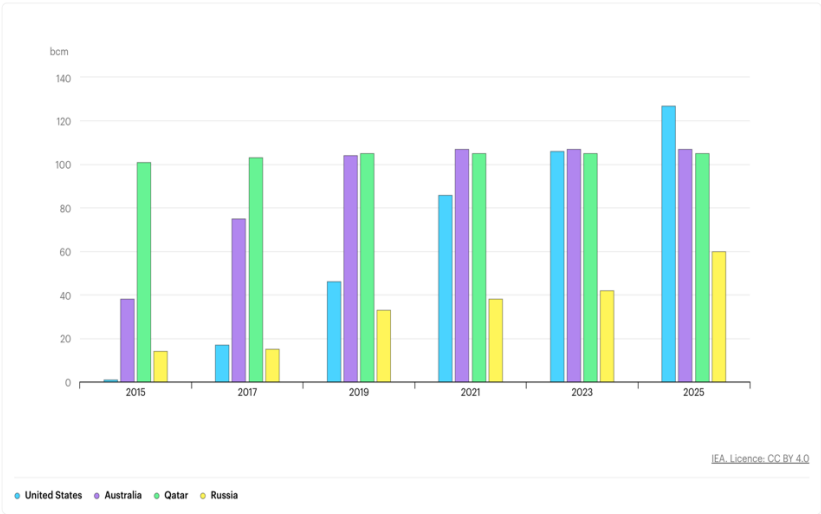
dengan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi oleh industri dan dunia bisnis secara umum dalam beberapa dekade terakhir (Lenihan et al., 2019). Sebab itu, modal manusia dapat menjadi salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi di negara-negara penghasil SDA. Tingginya tingkat kemampuan dan keterampilan akan mendorong peningkatan kapabilitas teknologi dan inovasi yang sangat menentukan dalam mengkapitalisasi pendapatan dari bisnis ekstraksi SDA untuk memacu laju pertumbuhan ekonomi. Meski dalam kenyataannya belum banyak negara yang memiliki SDA berlimpah berhasil mengoptimalkan modal manusia mereka sehingga dapat berdampak terhadap kinerja perekonomiannya.

Dalam hal ini, salah satu negara yang dapat menjadi sumber inspirasi adalah Australia. Menurut data Bank Dunia (*data.worldbank.org*), persentase hasil kontribusi SDA terhadap produk domestik bruto (PDB) Australia menempati urutan ke-38 terbesar dunia yaitu sebanyak 13,4 persen pada 2021 (World Bank, n.d.). Di sisi lain, *Human Development Reports* (UNDP) memposisikan Australia dalam kategori negara-negara dengan indeks pembangunan manusia yang sangat tinggi dengan indeks 0,958 pada 2023 (UNDP, n.d.). Demikian pula dalam hal inovasi, *Global Innovation Indeks 2024* yang dirilis oleh *the World Intellectual Property Organization (WIPO)* menempatkan Australia pada urutan ke-23 dari 133 negara yang dinilai berdasarkan empat aspek utama meliputi investasi pada bidang sains dan inovasi, perkembangan teknologi, adopsi teknologi, dan dampak sosioekonomi dari inovasi (WIPO, 2024).

Selain untuk kebutuhan domestik, Australia merupakan eksportir berbagai sumber daya alam strategis yang berkualitas dan diakui secara global. Beberapa diantaranya bahkan merupakan komoditas utama di pasar global seperti batu bara, wol, daging dan produk olahan ternak, buah-buahan segar, dan makanan beku (de Silva, 2014). Sebagian besar (60%) bahan bakar energi listrik di Australia masih menggunakan batu bara, dan batu bara merupakan salah satu

penyumbang utama pendapatan ekonomi Australia terutama dari aktivitas ekspor ke pasar global yang menempatkannya pada posisi pertama sebagai eksportir batu bara terbesar dunia (Curran, 2021). Australia juga dikenal sebagai produsen bijih besi terbesar yang banyak digunakan dalam industri besi baja global. Pada 2019, ekspor bijih besi Australia mencapai 835 juta ton, setara dengan 36 persen dari total penjualan komoditas bijih besi secara global (Wang et al., 2023). Lebih dari itu, Australia adalah salah satu produsen gas alam cair (LNG) terbesar dunia dengan volume ekspor terbesar kedua setelah Qatar pada 2020. Pangsa pasar ekspor LNG Australia bersama-sama dengan Qatar mencapai 43,4 persen dari total pasar LNG pada periode tersebut (Zou et al., 2022).

Gambar 4.1 EKSPOR LNG AUSTRALIA & QATAR 2015-2025



Sumber: *International Energy Agency* – www.iea.org

Namun pada saat bersamaan, Australia telah diakui sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan dan penelitian terbaik dunia. *QS Quacquarelli Symonds Limited*, lembaga pemeringkatan perguruan tinggi terbaik dunia (*QS World University Ranking*),

memposisikan Australia dalam peringkat ketiga dari 20 negara dengan sistem pendidikan tinggi terbaik dunia pada 2019. Unsur utama dalam pemeringkatan ini mencakup (1) kekuatan sistem pendidikan tinggi dibandingkan dengan negara-negara lainnya, (2) akses ketersediaan jumlah penerimaan mahasiswa di kampus-kampus top dunia, (3) evaluasi terhadap lembaga-lembaga pendidikan tinggi utama, dan (4) kekuatan relatif sistem pendidikan tinggi terhadap PDB perkapita (Quacquarelli Symonds (QS), 2019). Dalam *Nature Index*, salah satu pemeringkatan internasional yang seringkali dijadikan rujukan untuk menggambarkan performa saintifik dan penelitian primer, Australia berada pada peringkat ke-11 dengan jumlah artikel mencapai 4.005 artikel dalam periode 1 April 2024 – 31 Maret 2025 (Nature Index, 2025).

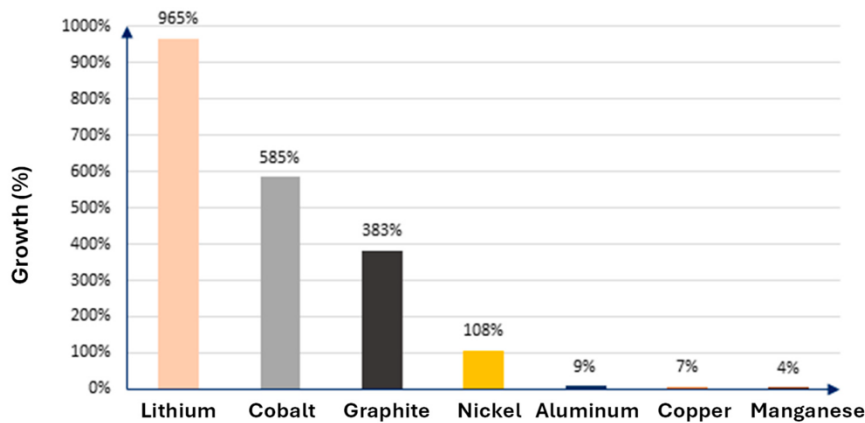
Dari wilayah Amerika Selatan, Chili merupakan salah satu negara kaya SDA namun juga menonjol dalam aspek kualitas SDM. Berdasarkan data Bank Dunia, pendapatan dari sektor SDA menyumbang sebanyak 16,9 persen terhadap PDB Chili pada 2021, menempatkan negara tersebut pada peringkat ke-32 dunia (World Bank, n.d.). Sementara itu, Laporan Pembangunan Manusia UNDP mengelompokkan Chili dalam kategori negara dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sangat tinggi yaitu 0,878 pada 2023 (UNDP, 2025).

Chili merupakan salah satu negara di benua Amerika yang dianggap sukses dalam mengoptimalkan pendapatan SDA untuk pembangunan ekonominya, terutama bersumber dari pengolahan pertambangan dan pertanian. Hingga kini, Chili adalah salah satu penghasil terbesar tembaga dan lithium yang sangat dibutuhkan untuk mendukung industrialisasi kendaraan listrik dan energi terbarukan. Ekspor komoditas tembaga menyumbang hampir 50 persen terhadap total kinerja ekspor Chili ke pasar global (Crooker, 2024), dan ini terus meningkat seiring dengan melonjaknya permintaan global dan tuntutan transisi energi dunia. Komoditas tembaga Chili telah diekspor ke lebih dari 24 negara mitra dagang. Volume ekspor ini mencakup lebih dari sepertiga suplai tembaga di

pasar global (Abbas et al., 2024). Sebab itu, industri pertambangan tembaga memiliki kontribusi signifikan dalam perekonomian Chili, menyumbang sekitar 18 persen terhadap total pendapatan fiskal, dan 27 persen dari total investasi asing dalam beberapa dekade terakhir (Valdes, 2021).

Demikian halnya dengan lithium, komoditas ini dianggap oleh banyak lembaga internasional termasuk Komisi Eropa, *the International Energi Agency* (IEA), dan Bank Dunia, sebagai mineral kritis yang fundamental peranannya dalam transisi energi bersih. Bahkan, lithium dinilai tidak dapat tergantikan dalam fungsinya sebagai bahan baku terutama untuk menghasilkan baterai penyimpanan energi. Sebab itu, lithium telah dimasukkan ke dalam daftar material kritis strategis sejak 2020, dan nilainya diproyeksinya melonjak tajam hingga 965 persen pada 2050 akibat tidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan (Mura et al., 2025). Selain menempati peringkat kedua produsen utama dunia setelah Australia, Chili diperkirakan memiliki cadangan lithium terbesar dibandingkan dengan negara-negara penghasil lithium lainnya (Roche et al., 2025). Hal ini berimplikasi terhadap semakin menguatkan posisi strategis Chili dalam perkembangan transisi energi bersih global.

Gambar 4.2 Proyeksi Nilai Logam Kritis Tahun 2050



Sumber: Mura et al., 2025

Menariknya, kekayaan alam strategis ini tidak membuat Chili lengah terhadap pentingnya aspek sumber daya manusia dalam mendukung pertumbuhan ekonominya. Selain ditunjukkan dengan tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam *UNDP Human Development Report*, kualitas SDM Chili juga tergambarkan dalam *2024 Global Innovation Index* yang secara global menempati peringkat ke-51, dan peringkat teratas dalam wilayah Amerika Latin dan Karibia (WIPO, 2024). Pencapaian ini juga berimplikasi terhadap kinerja industri non-ekstraktif Chili yang memperoleh manfaat positif dari perkembangan riset dan inovasi teknologi. Sebagai salah satu indikatornya adalah terus meningkatnya indeks kapasitas produktif Chili dari 50,3 pada 2000 menjadi 58,3 pada 2022, diatas dari indeks rata-rata dunia 47,5 dengan maksimal skor 100 (UNCTAD, 2023).

Berdasarkan laman *United Nations Trade and Development* (UNCTAD), kapasitas produktif didefinisikan sebagai sumber daya produktif, kapabilitas kewirausahaan dan rantai produksi, yang secara bersamaan menentukan kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa, sehingga meningkatkan

kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang. Lebih lanjut, penilaian *Productive Capacities Index (PCI)* oleh UNCTAD ini dilakukan terhadap 194 negara dengan memprioritaskan delapan aspek utama yaitu teknologi informasi dan komunikasi (TIK), perubahan struktural, *natural capital*, *human capital*, energi, transportasi, sektor swasta dan institusi-institusi pemerintahan (UNCTAD, 2023). Sejalan dengan performa produktifitas ini, jumlah perguruan tinggi Chili yang masuk dalam pemeringkatan dunia terus mengalami peningkatan termasuk dalam *the Academic Ranking of World Universities (ARWU)*, *the Times Higher Education (THE) World University*, dan *QS World University Ranking* (Ganga-Contreras et al., 2024). Secara umum, keberhasilan institusi pendidikan tinggi untuk tembus dalam pemeringkatan dunia dapat menunjukkan kualitas pendidikan dan SDM suatu negara dalam persaingan global.

Melihat capaian dan prestasi Australia dan Chili dalam bidang pembangunan manusia ini, banyak hal menarik untuk dipelajari terutama bagaimana pemerintah mengoptimalkan penghasilan dari sektor SDA untuk kepentingan sektor pendidikan sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja perekonomian. Strategi kebijakan pemerintah dalam memperkuat penelitian dan inovasi dalam rangka meningkatkan daya saing produk Australia di pasar global. Serta, upaya keberlanjutan dalam transformasi dan mengurangi ketergantungan terhadap hasil SDA.

A. Penerimaan SDA & Tata Kelola Sektor Pendidikan

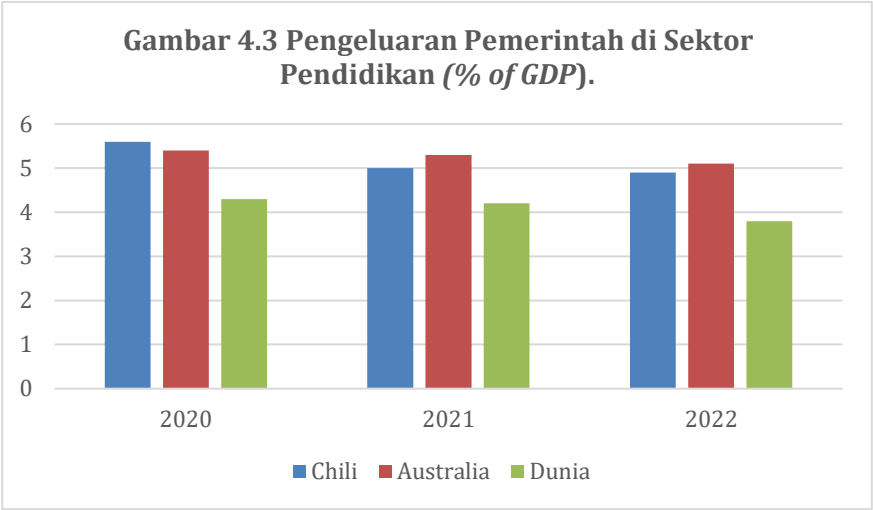
Sumber daya alam merupakan salah satu penyumbang terbesar pendapatan pemerintah Australia. Sebab itu, meski telah menjadi salah satu negara dengan komitmen besar terhadap tata kelola hijau, Australia masih memberikan perhatian seriusnya terhadap sektor sumber daya alam termasuk melalui subsidi dan dukungan kebijakan (Sinclair & Coe, 2024). Bagaimana tidak, pembayaran

royalti dari perusahaan pertambangan, migas, dan mineral telah menjadi salah satu sumber utama untuk mendanai sektor-sektor esensial seperti pendidikan dan kesehatan. Dari nilai keseluruhan komoditas yang mencapai \$2 triliun, komoditas bijih besi memiliki porsi paling besar dengan kontribusi sekitar 44 persen, dilanjutkan dengan batu bara, dan migas sekitar 37 persen (Moore, 2025).

Sektor pertambangan adalah industri padat modal yang berkontribusi relatif kecil terhadap lapangan pekerjaan di Australia yaitu sekitar 1,7 persen terhadap total lapangan kerja pada 2011. Kendati begitu, pelonjakan investasi di sektor ekstraktif ini menjadi salah satu faktor penggerak laju investasi di industri lainnya termasuk sektor bangunan dan manufaktur. Ekspansi bisnis pertambangan membutuhkan dukungan dari sektor-sektor lainnya sehingga menghasilkan dampak berlipat ganda dalam perekonomian Australia. Selain itu, pemerintah Australia mengoptimalkan pendapatan dari industri pertambangan beserta sektor pendukungnya, seperti kegiatan penelitian dan pengembangan, dan industri permesinan, melalui kebijakan perpajakan yang diantaranya berupa pajak korporasi sebesar 30 persen terhadap hasil pendapatan perusahaan (Freebairn, 2012)

Dalam hal pengelolaan, terdapat pemisahan manajemen SDA antara yang berada di daratan (*onshore*) dan lepas pantai (*offshore*). Pemerintah Persemakmuran mengelola SDA yang berada di lepas pantai, sementara pemerintah negara bagian mengelola SDA di daratan (Moore, 2025). Perbedaan kewenangan dalam pengelolaan ini berimplikasi terhadap kemampuan finansial masing-masing wilayah dalam mendanai kebutuhan sektor publik. Semakin besar SDA yang dikelola, maka semakin besar potensi pendapatan yang diperoleh. Queensland, sebagai contoh, merupakan salah satu negara bagian Australia yang menerima keuntungan besar dari royalti bisnis bahan bakar fosil. Nilai royalti yang diterima oleh pemerintah Queensland dari industri batu bara mencapai \$3,5 milyar pada periode 2019-2020, setara dengan 11,7% dari total penerimaan nonhibah (Burke, 2023).

Secara umum, berdasarkan data Bank Dunia (Grafik...), pengeluaran pemerintah Australia di sektor pendidikan berada di atas rata-rata dunia yaitu 5,4 persen (2020), 5,3 persen (2021), dan 5,1 persen (2022). Persentase ini dikalkulasi dari persentase nilai total pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terhadap produk domestik bruto (PDB) dimana rata-rata dunia berada di sekitar 4 persen Selama periode 2020-2022.



Source: World Bank

Sistem pendidikan Australia mengenal tiga sektor sekolah yaitu sektor publik, Katolik, dan sektor Independen. Secara persentase, sekolah sektor publik lebih banyak menerima siswa (66%), diikuti dengan sekolah Katolik (20%), dan sektor Independen (14%). Berdasarkan persentase jumlah siswa ini, sekolah sektor publik adalah lembaga pendidikan yang paling banyak menerima siswa-siswa kurang mampu, dibandingkan dengan sektor Katolik, dan Independen.

Kendati begitu, pembiayaan pemerintah Federal lebih banyak mengalir ke sekolah Katolik, dan Independen yang hanya menerima sedikit siswa kurang mampu. Sementara itu, sekolah-sekolah publik sangat bergantung kepada dukungan pendanaan dari pemerintah negara bagian (*States*), dan pemerintah wilayah (*Territories*) sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi Australia. Berdasarkan kesepakatan yang sudah berjalan, pemerintah negara bagian dan pemerintah wilayah bertanggung jawab untuk 80 persen dana yang dibutuhkan oleh sekolah-sekolah publik, sedangkan pemerintah Federal diharapkan dapat menambahkan 20 persen sisanya. Sebaliknya, dana pemerintah Federal lebih banyak mengalir ke sekolah-sekolah non-pemerintah di sektor Katolik, dan Independen (Sinclair & Coe, 2024).

Pendidikan telah menjadi salah satu kebijakan fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan di Australia. Tingginya tingkat kepedulian pemerintah dan minat masyarakat terhadap pendidikan menjadi salah satu faktor diberlakukannya wajib belajar bagi warga negara Australia yang dimulai sejak umur 6 tahun hingga umur 17 tahun (Morris, 2024). Dalam wajib belajar 12 tahun, siswa belajar dari tingkatan *primary schools* dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-6, kemudian berlanjut ke *secondary school* dari tahun ke-7 hingga tahun ke-12. Melalui penerapan model kurikulum komprehensif, siswa mempelajari subyek inti yang sama dari tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-10. Setelah itu, pada dua tahun terakhir, mereka dapat memilih subyek spesifik sesuai minat mereka beserta jalur kurikulum tertentu. Kurikulum dan sistem evaluasi belajar dikelola oleh pemerintah Federal sehingga terdapat standarisasi dalam pencapaian kualitas pendidikan khususnya melalui *Australian Curriculum and Reporting Authority* (ACARA) dan ujian berstandar *the National Program of Literacy and Numeracy* (NAPLAN) (Perry, 2024).

Berbeda dengan Australia, sektor pendidikan merupakan salah satu layanan publik yang cenderung terabaikan sebelum bergulirnya reformasi pemerintah di Chili setelah 1990an. Pada masa itu, sektor

pendidikan diwarnai dengan guru-guru yang mengalami demoralisasi karena penyusutan pendapatan secara signifikan, infrastruktur yang usang, dan sangat terbatasnya ketersediannya buku-buku pelajaran, perpustakaan, dan sarana penting lainnya dalam proses pembelajaran (González et al., 2023). Salah satu upaya kebijakan pemerintah Chili untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan melakukan reformasi regulasi terkait dengan pendidikan antara lain melalui pemberlakuan *the Preferential School Subsidy law (SEP)* pada 2008. Undang-undang ini menjadi aturan yang pertama kalinya memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengintervensi siswa-siswa dengan latar belakang ekonomi kurang mampu, baik di sekolah publik maupun di swasta agar mereka memiliki kesempatan yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya (Martinez, 2023).

Namun begitu, pemberian bantuan ini juga disertai dengan pengawasan yang ketat terutama dalam aspek tata kelola institusi sekolah. Pertama, sekolah penerima bantuan wajib menandatangani kesepakatan dengan Kementerian Pendidikan untuk menjalani rencana empat tahun pengembangan mencakup peningkatan kualitas pengajaran, kepemimpinan sekolah, dan sumber daya pembelajaran. Kedua, sekolah-sekolah di Chili diberikan target kinerja utamanya pada subyek matematika, sains, dan ujian bahasa.

Standar ini kemudian digunakan untuk mengkategorikan mereka dalam tiga kelompok yang berbeda, yaitu *autonomous or high-performing* (sekolah dengan prestasi paling tinggi), *emerging or average-performing* (peringkat kedua), dan peringkat terbawah *in-recovery* atau *low-performing schools*. Pemeringkatan ini berimbas kepada fleksibilitas penggunaan dana SEP dan tingkat pengawasan terhadap program dan aktivitas institusi sekolah. Dari aspek keuangan, sekolah dalam kategori *high-performing* diberikan keleluasan lebih banyak untuk mengatur bantuan keuangan yang diberikan pemerintah untuk siswa-siswa kurang mampu mereka. Sementara itu, sekolah dengan kategori lebih rendah diberikan pengawasan yang lebih ketat dalam pengelolaan bantuan keuangan.

Demikian pula dalam aspek penilaian, sekolah dengan kinerja dan prestasi tinggi hanya perlu dievaluasi selama empat tahun sekali, sedangkan sekolah yang berada di level lebih rendah harus melalui proses pengawasan dan evaluasi setiap tahun (Martinez, 2023). Supervisi pemerintah ini bertujuan agar penggunaan anggaran untuk pendidikan dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam rangka peningkatan kualitas SDM Chili.

Reformasi struktural di sektor pendidikan ini berlanjut dengan ditetapkannya undang-undang untuk mendorong inklusifitas pendidikan di Chili pada 2015 yaitu *the Law for School Inclusion (Leyden Inclusión Escolar)*. Kendati masih mempertahankan model pasar dalam kebijakan sektor pendidikan, undang-undang ini mendorong penghapusan secara bertahap pemungutan pembayaran dan seleksi penerimaan di sekolah-sekolah yang menerima subsidi dari pemerintah, serta menegaskan larangan kepada mereka untuk mengejar keuntungan dari penyelenggaraan pendidikan di sekolah (Valenzuela & Montecinos, 2017). Kebijakan ini disambut baik oleh para kepala sekolah yang menganggap keputusan pemerintah tersebut akan memperluas akses pendidikan kepada seluruh masyarakat Chili tanpa membedakan latar belakang sosial ekonomi keluarga (Rojas Fabris et al., 2021).

Tidak hanya itu, dengan mempertimbangkan peran penting guru dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan, pemerintah Chili juga menetapkan *the National System for Teachers' Professional Development (Ley Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente)* pada 2016 untuk mendorong peningkatan profesionalisme guru (Valenzuela & Montecinos, 2017). Regulasi ini mencakup peningkatan standarisasi dan akreditasi terhadap program-program pelatihan guru, persyaratan dan ketentuan minimum untuk keikutsertaan peserta dalam program-program pelatihan tersebut, dan pelaksanaan dua uji diagnostik kepada para guru pelajar (Fernández Cofré et al., 2021).

Berdasarkan beberapa strategi kebijakan ini, tampak keseriusan

pemerintah Chili dalam meningkatkan kualitas SDM melalui pengelolaan sektor pendidikan secara profesional, terukur, dan berkualitas. Dari hulu permasalahan, peningkatan kualitas guru merupakan suatu keniscayaan dalam rangka memberikan jaminan kepada masyarakat layanan pendidikan berkualitas, sementara dari hilir, perluasan akses pembiayaan peserta didik tanpa diskriminasi adalah wujud dari komitmen pemerintah untuk menciptakan rasa adil di tengah masyarakat, serta bentuk kepedulian pemerintah terhadap peran strategis pendidikan untuk pembangunan perekonomian. Semangat kebijakan ini juga tercermin dalam pengeluaran pemerintah Chili di sektor pendidikan yang berada sekitar 5 persen dari total PDB selama periode 2020-2022. Persentase ini sedikit lebih rendah daripada Australia, namun lebih tinggi daripada rata-rata persentase dunia yang hanya 4 persen pada periode yang sama (lihat gambar 4.3).

B. SDM dan Kolaborasi Inovasi

Belajar dari pengalaman dari Australia dan Chili, pendidikan telah menjadi instrumen strategis bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang esensial dalam mendukung pertumbuhan nasional. Pengalaman Australia dengan sistem pemerintahan federalnya, tanggung jawab pendidikan telah menjadi tanggung jawab bersama dengan pemerintah negara-negara bagian, pemerintah wilayah. Sementara itu, pemerintah Chili berupaya serius dalam membantu siswa-siswa tidak mampu untuk mendapatkan akses pendidikan yang bermutu melalui dukungan pendanaan pendidikan, dan peningkatan kualitas para guru, serta sarana dan prasarana pendidikan.

Strategi kebijakan ini adalah fondasi penting dalam membangun kapabilitas intelektual dan keterampilan anak-anak muda usia produktif yang memiliki peran penting dalam menghasilkan inovasi-inovasi dalam industri sehingga berdampak positif terhadap pembangunan ekonomi. Inovasi dianggap sebagai faktor krusial dalam meningkatkan produktivitas bisnis dan industri. Hal ini

didapatkan dari perubahan-perubahan progresif baik dari segi proses bisnis, maupun penemuan-penemuan teknologi baru yang semuanya lahir dari ide dan gagasan manusia (Baiyegunhi, 2024).

Dalam kasus Australia, menurut beberapa penelitian terdahulu, setiap \$1 yang dikeluarkan untuk kegiatan riset dan pengembangan (R&D) menghasilkan keuntungan ekonomi dengan rata-rata nilai \$20,8 ditambah dengan rata-rata pengembalian keuntungan sebanyak 104% setiap tahunnya. Sebab itu, inovasi adalah salah satu faktor kunci dalam performa ekonomi Australia dalam industri global (Wynn et al., 2022). Hal ini tentunya tidak dapat dipisahkan dengan terus meningkatnya jumlah SDM peneliti profesional di Australia yang fokus kepada bidang riset dan pengembangan. Berdasarkan data UNESCO, jumlah SDM peneliti di Australia meningkat dari 3.470,7 per juta penduduk pada 2000 menjadi 4.568,6 per juta penduduk pada 2010.

Strategi pemerintah Australia dalam mendorong inovasi dan penguatan kolaborasi antara sektor akademik, lembaga riset, dan industri bukan merupakan suatu proses pelaksanaan kebijakan publik yang singkat dan instan. Pada 2000, pemerintah Australia memperkenalkan paket kebijakan *Backing Australia's Ability* (BAA) yang dianggap sebagai salah satu tonggak penting dalam proses penguatan inovasi di Australia dalam beberapa dekade terakhir. Pelaksanaan program BAA dilandasi dengan analisis dan evaluasi terhadap rantai pasok industri yang memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menyediakan insentif dan dukungan finansial secara selektif. Tujuan utamanya adalah memperkuat posisi industri di pasar global dengan meningkatkan daya saing mereka dalam persaingan industri internasional (Mintrom & Wanna, 2006).

Dipandang kurang berdampak signifikan, pemerintah Australia kemudian mengembangkan kebijakan inovasi ini dengan merilis strategi *the Powering Ideas: An Innovation Agenda for the 21st Century* pada 2009. Sebagai pembaharuan kebijakan, strategi ini

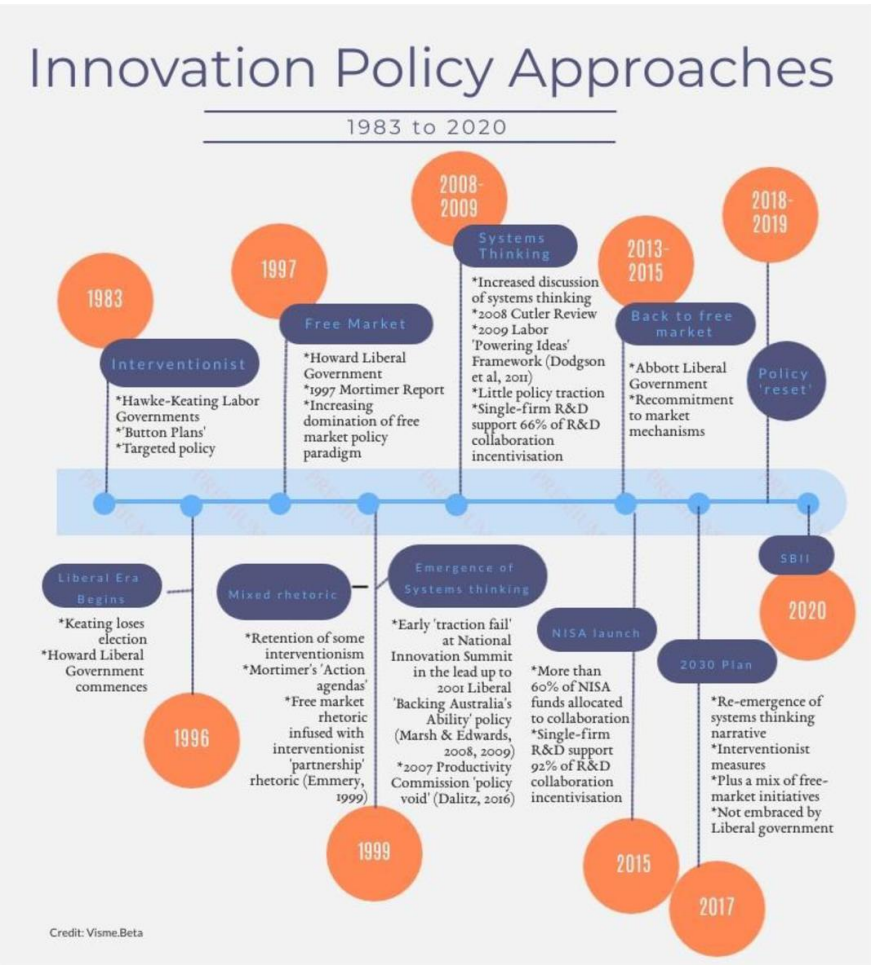
lebih menekankan sistem inovasi yang menghubungkan antara inovasi dan penelitian dengan keterlibatan industri, komunitas pebisnis, dan pemerintah (Cetindamar et al., 2024). Modifikasi strategi inovasi ini dilakukan demi mendongkrak kinerja inovasi di sektor publik yang diharapkan berkontribusi secara signifikan dalam mengatasi tantangan-tantangan sosial dan lingkungan (Green et al., 2014). Hal ini dilatarbelakangi pula menurunnya performa daya saing global Australia saat itu yang terekam dalam *Global Competitiveness Index, World Economic Forum* dari peringkat ke-5 menjadi peringkat ke-18 dalam hal berkurangnya persentase anggaran inovasi dan sains terhadap PDB (Cetindamar et al., 2024).

Fase kritis berikutnya dalam penyelenggaraan strategi inovasi oleh pemerintah Australia adalah penetapan agenda nasional *National Innovation and Science Agenda (NISA)* pada 2015. NISA memfokuskan kepada pengembangan unsur-unsur penting dalam inovasi yaitu pendidikan, sains, penelitian, dan infrastruktur, serta memberikan insentif bisnis dan menghapus hambatan regulasi (A. George & Tarr, 2021). Sebagai salah satu agenda politik utama, isu inovasi telah mendapatkan perhatian serius dalam pemerintahan Perdana Menteri Malcolm Turnbull yang mendorong transisi strategi ekonomi dari *'mining boom'* ke *'ideas boom'* (Jayasuriya & Johnson, 2016). Dalam merealisasikan visi ini, pemerintah Australia bahkan mengalokasikan anggaran pengeluaran sebesar \$1,1 milyar antara periode 2015 dan 2019 dengan program-program strategis yang dikelompokkan dalam empat tema utama yaitu *culture and capital*, kolaborasi, *talent and skills*, dan pemerintah sebagai percontohan (A.-J. M. George et al., 2020).

Sebagai salah satu perkembangan terkini adalah strategi *Stimulating Business Investment in Innovation* (SBII) yang mulai diperkenalkan oleh pemerintah Australia pada awal 2020. Dibandingkan dengan kebijakan inovasi NISA, kerangka inovasi baru ini merupakan strategi jangka pendek dengan fokus pada unsur inovasi yang tidak bersumber pada kegiatan riset dan pengembangan. Salah satu realisasi dari strategi ini adalah penggabungan instansi pemerintah

Australia di bidang industri, inovasi, dan sains pada Oktober 2025 (Cetindamar et al., 2024). Dengan menempatkan industri sebagai kata pertama dalam nama lembaga baru ini diharapkan pertumbuhan industri menjadi lebih produktif dan terukur sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lebih banyak lapangan kerja. Kebijakan inovasi SBII juga menunjukkan pergeseran orientasi strategi inovasi dari *innovation systems* menjadi *industry ecosystems*, dimana penguatan kolaborasi riset dan industri dilakukan untuk memfasilitasi peningkatan kapabilitas industri melalui kontrak-kontrak penelitian bersama dengan lembaga riset dan perguruan tinggi (A. George & Tarr, 2021). Sebagai salah satu implementasinya, pemerintah Australia secara khusus memberikan perhatian terhadap optimalisasi ekonomi digital yang sangat bergantung kepada ide-ide inovatif seperti pengembangan *artificial intelligence*, keamanan siber, dan inovasi teknologi lingkungan yang dapat mempercepat pengurangan emisi dan menghasilkan energi bersih (Cetindamar et al., 2024).

Gambar 4.4 Strategi Inovasi Pemerintah Australia 1983-2020



Sumber: A. George & Tarr, 2021.

Dalam kasus Chili, rekognisi internasional terhadap performa inovasi nasionalnya dibuktikan dengan semakin banyaknya jumlah paten dan kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh negara tersebut dalam beberapa dekade terakhir (Cereceda Otarola et al.,

2025). Prestasi global ini dapat dianggap sebagai suatu keberhasilan dari upaya serius pemerintah Chili dalam mendorong riset dan pengembangan salah satunya melalui peningkatan alokasi investasi di bidang sains, teknologi dan inovasi (STI). Nilai investasi Chili di bidang STI meningkat secara signifikan dari US\$ 250 juta pada 2000 menjadi US\$ 800 juta pada 2020 dengan menitikberatkan pada proyek-proyek riset dan pengembangan teknologi tinggi (Novoa, 2025).

Sementara itu, dari aspek pengembangan SDM, pemerintah Chili sangat menyadari peran vital dari para insinyur dan perekayasa dalam pengembangan teknologi dan industri. Untuk itu, sejak 2013, pemerintah Chili telah menyediakan pendanaan khusus untuk pengembangan program studi di perguruan tinggi khusus di bidang *engineering*. Pada 2014, realisasi program ini melibatkan 10 perguruan tinggi yang memiliki bidang studi ini untuk mengerjakan lima proposal riset dan pengembangan terkait dengan inovasi teknologi industri (Letelier & Sandoval, 2015). Beberapa hal ini menggambarkan bahwa pola strategi inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Chili relatif sama dengan negara-negara lainnya yaitu memperkuat kolaborasi antara pemerintah, universitas dan lembaga riset, dan industri.

Sebagai salah satu aktor utama dalam mengoptimalkan kebijakan inovasi di Chili, CORFO (*Corporation for Development/Productive Development Corporation/Economic Development Agency*) memfasilitasi aktivitas terkait dengan riset dan pengembangan di sektor-sektor strategis. Perannya krusial dalam memberikan fasilitas insentif kepada para inovator dan aktivitas strategis seperti program pengembangan perusahaan-perusahaan rintisan (*startup*) dan proyek-proyek energi terbarukan (Griffith-Jones et al., 2018). Berdasarkan data 2018, CORFO telah menyediakan pendanaan kepada lebih 1.000 perusahaan rintisan pada 2017, membiayai 800 proyek inovasi di perusahaan-perusahaan, dan mendanai lebih dari 35 konsorsium riset yang menghubungkan antara perguruan tinggi dengan industri (Angulo, 2018).

Selain itu, dukungan pemerintah terhadap kegiatan pengembangan inovasi juga diterjemahkan dalam regulasi diantaranya dengan pemberian insentif pajak yang bertujuan memberikan stimulus kepada sektor swasta untuk berkontribusi melalui investasi dalam kegiatan inovasi (Tamayo-Galarza et al., 2025). Meskipun beberapa studi menilai rangkaian strategi ini tidak cukup mendorong partisipasi sektor swasta untuk berinvestasi lebih banyak dalam kegiatan inovasi (Mardones & Madrid Becerra, 2020).

Berangkat dari kedua kasus negara ini, Australia dan Chili, tampak jelas bahwa perihal riset, pengembangan, dan inovasi adalah kebijakan strategis yang krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mereka. Sebagai sesama anggota organisasi negara-negara ekonomi maju OECD, Australia dan Chili memiliki target yang relatif sama yaitu mengoptimalkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga riset, dengan industri untuk menghasilkan lebih banyak inovasi dan nilai tambah dalam perekonomian mereka.

BAB 5

PERTUMBUHAN HIJAU: EKONOMI RENDAH KARBON DAN MANAJEMEN SUMBER DAYA ALAM BERKELANJUTAN

‘Pertumbuhan hijau’ telah berkembang menjadi salah satu bahasan populer dalam kajian pembangunan global selama beberapa dekade terakhir. Hal ini tentunya tidak lepas dari dinamika ekonomi politik global yang terus berupaya mencari solusi terhadap dampak lingkungan dari aktivitas bisnis dan perdagangan internasional, serta desakan publik internasional terkait dengan isu perubahan iklim. Rilis laman resmi *Conference of Parties* (COP) 29 menyebutkan sekitar 25 persen lahan daratan telah mengalami kerusakan yang berakibat buruk terhadap aspek perekonomian masyarakat petani, dan berdampak kepada jutaan populasi melalui ketahanan pangan, dan harga bahan-bahan pokok, serta berbagai bahaya lingkungan (COP 29, 2024). Sebab itu, urgensi permasalahan lingkungan ini melatarbelakangi semakin populernya tuntutan global terhadap pertumbuhan hijau.

Green growth untuk pertama kalinya digunakan dalam deklarasi menteri pada pertemuan antar negara Asia Pasifik, *the Fifth Ministerial Conference on Environment and Development* (MCED) di Seoul, Korea Selatan, Maret 2005. MCED merupakan pertemuan lima tahunan yang diselenggarakan oleh Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Asia dan Pasifik (UNESCAP) sejak 1985. Pertemuan ini dihadiri oleh para menteri terkait di bidang lingkungan dan pembangunan untuk membahas dan mengevaluasi agenda pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik (PreventionWeb, 2010). *The Seoul Initiative Network on Green Growth* (SINGG) sebagai deklarasi bersama antar negara yang dihasilkan di Seoul turut meningkatkan pengaruh Korea Selatan

sebagai negara kekuatan menengah dalam tata kelola lingkungan global (Blaxekjær, 2016). SINGG adalah wujud dari keinginan bersama negara-negara Asia Pasifik untuk mempercepat pencapaian pembangunan berkelanjutan di kawasan.

Sebelum terminologi ini digunakan secara resmi dalam forum resmi internasional PBB, beberapa akademisi dan politisi telah menulis dan menuangkan pemikiran mereka untuk memperjelas konsep dan prospek pelaksanaannya. Salah satunya adalah Paul Ekins, seorang Guru Besar dalam Bidang Sumber Daya dan Kebijakan Lingkungan, University College London (UCL), yang menulis suatu buku berjudul *Economic Growth and Environmental Sustainability: the Prospects for Green Growth*. Dalam bukunya yang diterbitkan pada 1999 tersebut, Paul Elkins membahas beberapa hal penting terkait dengan konsep keberlanjutan lingkungan, dan konsekuensi lingkungan dari pertumbuhan populasi, produksi, dan teknologi.

Sebelum itu, Suresh Prabhu, Menteri Lingkungan dan Kehutanan, Republik India, menulis suatu artikel berjudul *Green Growth: India's Environmental Challenge* dalam Harvard International Review, edisi *winter 1998/1999*. Dalam artikelnya, Menteri Suresh Prabhu menjelaskan rencana strategis pemerintah India dalam rangka menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan terhadap lingkungan dengan memasukkan pertimbangan lingkungan dalam agenda kebijakan ekonomi dan industri nasional.

Setelah dua dekade berlalu sejak MCED 2005 berbagai tantangan lingkungan terus menjadi perhatian masyarakat di berbagai belahan dunia. Dampaknya secara langsung dirasakan oleh masyarakat dari aspek ekonomi, kesehatan, hingga keamanan. Untuk itu, artikel ini berupaya menguraikan lebih lanjut pengertian *green growth* dari berbagai sumber bacaan, dan juga temuan-temuan empiris dari beberapa penelitian dalam beberapa tahun terakhir.

A. *Green Growth: Konsep Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan*

Pertumbuhan hijau sebagai suatu konsep dalam kebijakan pembangunan ekonomi memfokuskan kepada upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa memperburuk eksploitasi alam dan kerusakan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan ekonomi berorientasi lingkungan dapat dicapai seiring dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang menghasilkan inovasi dan teknologi baru lebih efisien dan ramah lingkungan (Hickel & Kallis, 2020).

Hal ini penting untuk dilakukan sebagai konsep strategis yang menekankan pentingnya mengurangi risiko polusi lingkungan, emisi karbon, dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi fosil yang masih menjadi sumber energi utama dalam banyak kegiatan masyarakat dan industri. Dengan demikian diharapkan pertumbuhan ramah lingkungan dapat dicapai melalui upaya pembangunan teknologi produksi yang rendah emisi dan ramah lingkungan (Fernandes et al., 2021). Konsep *green growth* mendorong kemajuan teknologi dan inovasi sebagai faktor penting di dalam mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan memperkecil dampak negatif dari aktivitas ekonomi terhadap lingkungan. Inovasi teknologi secara bersamaan dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan efisiensi penggunaan energi (Dong & Ullah, 2023). Teknologi dan inovasi menjadi unsur penting di dalam konsep pertumbuhan hijau ini.

Teknologi sebagai kemajuan peradaban manusia dibangun berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dalam mengatasi kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam hal produktivitas industri misalnya, kemajuan teknologi menjadi faktor penting yang menentukan keunggulan ekonomi di banyak negara. Hal ini termasuk peran teknologi dalam meningkatkan kinerja produksi secara efisien dan lebih berkualitas.

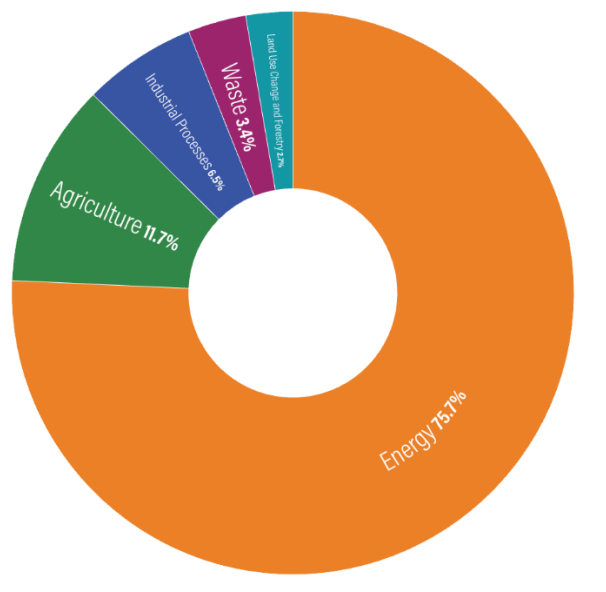
Negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman, telah membuktikan optimalisasi penggunaan teknologi dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga menempatkan mereka bersama-sama dalam kelompok perekonomian negara maju. Kemampuan *high-technology manufacturing* negara-negara ini telah mempengaruhi secara signifikan penerimaan pasar terhadap produk ekspor mereka di pasar global. Merek produk seperti International Business Machines (IBM) dari Amerika Serikat, Toyota Motor (Jepang), dan Siemens (Jerman) adalah beberapa contoh produk berteknologi tinggi yang sangat populer di pasar global. Hal ini menggambarkan bahwa kapabilitas teknologi menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan performa perekonomian negara dalam kancah internasional.

Kendati demikian, pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya produktivitas sektor industri dirasakan kurang memenuhi aspirasi global terhadap perkembangan kondisi lingkungan dan perubahan iklim yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tingginya konsumsi energi fosil dalam industri menjadi salah satu penyebab tingginya intensitas emisi karbon yang berimplikasi terhadap krisis iklim global.

Laporan World Resource Institute (WRI) menunjukkan sektor energi menempati urutan pertama sebagai penyumbang gas rumah kaca (GRK) terbesar sebanyak 75,7% yang mencakup penggunaan listrik dan pemanas, transportasi, manufaktur dan konstruksi, serta bangunan (Ge et al., 2024). Bahkan, berdasarkan data Climate Watch, sektor manufaktur bersama-sama dengan sektor listrik dan pemanas termasuk penghasil GRK yang mengalami peningkatan secara signifikan dalam periode 2005-2021 (Ritchie et al., 2024). Semakin meningkatnya GRK yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia menyebabkan semakin menebalnya lapisan gas yang menyelimuti bumi sehingga menjebak lebih banyak panas matahari.

Gambar 5.1 Struktur Penghasil GRK berdasarkan Sektor Ekonomi

Global greenhouse gas emissions by sector and end use, 2021



Sumber: *Climate Watch*, dikutip dalam Ge et al., 2024

Alhasil, kondisi iklim semakin tidak menentu dan mengakibatkan cuaca ekstrem yang mengancam keselamatan manusia, dan produktivitas ekonomi masyarakat di berbagai belahan dunia. Di kawasan Eropa, angka kematian yang disebabkan fenomena suhu panas ekstrem terus menjadi perhatian serius masyarakat dalam dua dekade terakhir, khususnya setelah peristiwa kematian lebih dari 70.000 jiwa pada 2003 yang terkena gangguan kesehatan akibat cuaca panas ekstrem. Pada 2023 angka kematian ini terus berlanjut, dimana suatu penelitian memperkirakan bahwa jumlah kematian di

wilayah Eropa yang disebabkan cuaca panas ekstrem mencapai 47.690 jiwa. Angka kematian tertinggi tercatat di Eropa Selatan terutama Yunani, Bulgaria, Italia, Spanyol, Siprus, dan Portugal (Gallo et al., 2024).

Di benua Afrika, suhu panas terus mengalami peningkatan menjadi 40 – 50 derajat Celsius pada periode 1989 – 2010. Bahkan, suhu panas beberapa daerah di Nigeria mengalami lonjakan ekstrem hingga 50 – 60 derajat Celsius yang menambah jumlah kematian penduduknya dalam beberapa tahun terakhir (Kunda et al., 2024). Suhu panas ekstrem dapat menyebabkan kondisi panas di luar batas normal tubuh manusia sehingga mengalami kram panas, kelelahan karena panas, hingga hipertermia.

Tidak hanya berdampak terhadap kelompok masyarakat usia lanjut, cuaca panas juga mengancam keselamatan anak-anak di bawah usia lima tahun yang menjadi salah satu isu krusial dalam menekan angka kematian anak dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Afrika. Menurut penelitian Brimicombe et al. (2024), terdapat 44.909 kematian anak di bawah usia lima tahun yang terjadi di 13 negara Afrika. Sebagian kematian ini dikaitkan dengan faktor cuaca panas yang terjadi di beberapa negara seperti Ethiopia, Senegal, Gambia, dan negara-negara di Afrika timur.

Di sisi lain, cuaca ekstrem tidak hanya berakibat terhadap keselamatan manusia, tetapi juga berdampak buruk terhadap kondisi perekonomian sebagian negara yang masih mengandalkan hasil pertanian, dan perkebunan. Sebagian besar kegiatan pertanian masih sangat bergantung terhadap intensitas curah hujan, dan pasokan air yang sebagian diambil dari aliran sungai melalui saluran irigasi yang dibuat oleh manusia.

Menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA), cuaca ekstrem telah menjadi salah satu faktor dominan penyebab gagal panen yang merugikan banyak petani, dan perekonomian secara

umum (Akyapi et al., 2022; U.S. Department of Agriculture, n.d.). Cuaca ekstrem dalam hal ini meliputi suhu panas ekstrem, curah hujan tinggi, dan kekeringan berkepanjangan adalah konsekuensi dari kondisi perubahan iklim yang semakin tidak menentu.

Oleh sebab itu, pertumbuhan hijau dianggap sebagai salah satu strategi untuk mengatasi krisis perubahan iklim dan mengantisipasi dampak lebih besar dari emisi karbon dan degradasi lingkungan terhadap keberlanjutan ekonomi global. *Green growth* secara umum mendorong pertumbuhan ekonomi rendah karbon, hemat sumber daya, dan inklusif secara sosial (Herman, 2023). Membangun keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan target pembangunan lingkungan berkelanjutan membutuhkan penggunaan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Hal ini sangat diperlukan untuk mengatasi ketergantungan terhadap penggunaan bahan bakar fosil yang masih menjadi sumber utama penggerak perekonomian global.

Pelaksanaan konsep pertumbuhan hijau memerlukan dukungan teknologi ramah lingkungan yang memiliki peran krusial dalam strategi pencapaian pembangunan berkelanjutan. Pembangunan teknologi bersih ini diharapkan dapat menekan emisi karbon yang dihasilkan dari penggunaan sumber energi konvensional, dan meningkatkan diversifikasi sumber daya energi alternatif dalam rangka mempercepat proses transisi energi. Kendati begitu, pembangunan teknologi bersih ini akan relatif sulit dicapai tanpa dukungan investasi dan alokasi anggaran untuk kegiatan riset dan pengembangan yang memadai (Javed et al., 2024). Ketersediaan dukungan finansial dan investasi teknologi terutama dalam mengembangkan sumber daya energi terbarukan merupakan faktor utama dalam meningkatkan efisiensi energi dan menghasilkan sumber daya energi alternatif (Dam et al., 2024).

Selain itu, konsep pertumbuhan hijau memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Chang et al., 2024). Tingginya kebutuhan terhadap komoditas hasil alam,

tidak hanya untuk memenuhi permintaan industri, tetapi juga untuk kebutuhan masyarakat secara umum seperti bahan baku makanan dan minuman, dan bahan bakar untuk transportasi memberikan tantangan yang besar dalam menjaga keseimbangan eksploitasi alam dengan masa depan kelestarian lingkungan. Berkaitan dengan hal ini, laporan *Working Group on Food Systems of the International Resource Panel* menyatakan bahwa dari sekian banyak aktivitas perekonomian, sektor makanan adalah yang paling besar memberikan dampak terhadap kondisi lingkungan dan sumber daya alam (Westhoek et al., 2016).

Meski laporan ini dirilis pada 2016, konsumsi pangan global terus mengalami peningkatan seiring dengan terus meningkatnya populasi dunia, dan keragaman makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat. Demikian halnya dalam konsumsi bahan bakar minyak, tingkat permintaannya terus mengalami kenaikan secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Fletcher et al. (2024) dalam penelitiannya menghubungkan semakin memanasnya temperatur bumi dengan lonjakan konsumsi minyak global yang telah menembus lebih dari 100 juta barel per hari pada 2023. Angka ini menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah energi dunia.

Dari uraian singkat ini, setidaknya terdapat beberapa hal pokok yang dapat ditelusuri untuk memahami konsep *green growth* lebih lanjut. *Pertama*, artikel ini akan mengulas tentang pengertian *low carbon-economy* yang menjadi salah unsur utama dalam konsep pertumbuhan hijau ini. Meskipun telah berkembang menjadi salah satu istilah paling populer dalam kajian dan pemberitaan terkait dengan isu-isu lingkungan, bagaimana masing-masing negara menerjemahkan ekonomi rendah karbon dalam strategi kebijakan lingkungan mereka masih relatif belum banyak diteliti, khususnya dalam konteks negara-negara berkembang. *Kedua*, konsep pertumbuhan hijau menaruh perhatian terhadap pengelolaan sumber daya berkelanjutan untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.

Ketiga, investasi teknologi ramah lingkungan dikaitkan dengan upaya inovasi untuk mengurangi polusi, pencemaran lingkungan, dan kerusakan alam adalah aspek yang tidak terpisahkan dalam konsep pertumbuhan hijau ini. Sebab itu, artikel ini juga akan melakukan eksplorasi bagaimana inovasi-inovasi hijau dilakukan oleh negara-negara BRICS khususnya dalam konteks upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan bahan bakar fosil.

B. Ekonomi Rendah Karbon

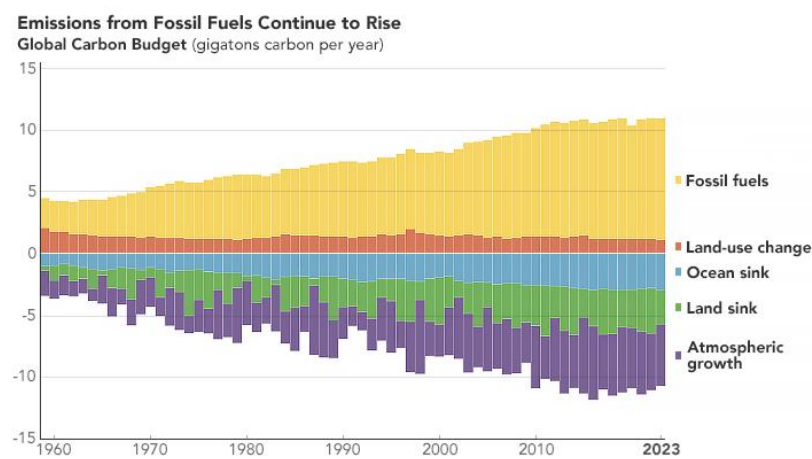
Dalam rangka mencapai pertumbuhan hijau, meminimalisasi emisi karbon dalam aktivitas perekonomian menjadi dasar dalam perumusan kebijakan ekonomi dan industri sehingga berorientasi kepada pembangunan lingkungan berkelanjutan. Diantara ciri-ciri perekonomian rendah karbon adalah meminimalisasi penggunaan energi khususnya bahan bakar yang bersumber pada energi fosil, menekan serendah-rendahnya angka polusi dan emisi GRK (Xie et al., 2023). Kalau dilihat dari beberapa unsur utama dalam perekonomian rendah karbon ini, banyak studi telah menunjukkan bahwa mereka memang telah menjadi faktor utama penyebab krisis iklim dan lingkungan dalam beberapa dekade terakhir.

Dalam suatu studi yang menguji efek konsumsi energi terhadap perubahan iklim di negara-negara Afrika, Kelly & Ngo Nguéda Radler (2024) menemukan terdapat pengaruh yang signifikan dari konsumsi energi fosil terhadap perubahan iklim. Bahan bakar batu bara, minyak, dan gas masih menjadi sumber bahan bakar utama dalam kegiatan perekonomian, transportasi, dan industri di berbagai belahan dunia, dan pada saat yang sama penggunaan bahan bakar ini menghasilkan GRK ke atmosfer. Diperlukan suatu upaya bersama untuk mempercepat transformasi pasokan energi dari bahan bakar fosil menjadi bahan bakar yang terbarukan dan ramah lingkungan.

Tingginya intensitas konsumsi bahan bakar fosil ini tidak hanya membahayakan lingkungan, tetapi juga menjadi ancaman terhadap

kesehatan manusia diantaranya melalui polusi udara. Berdasarkan studi Lelieveld et al. (2023), terdapat sekitar 5,1 juta jiwa yang meninggal setiap tahunnya akibat gangguan kesehatan yang disebabkan oleh polusi udara sekitar. Laporan penelitian *Global Carbon Budget* bahkan mengidentifikasi terus meningkatnya emisi karbon dari penggunaan bahan bakar fosil secara signifikan pada 2023 sekitar 1,1 persen yang mencapai 36,8 milyar metrik ton karbon dioksida (Garrison, 2024). Dalam realitas sosial terutama di negara-negara berkembang, polusi udara relatif kurang menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat karena tingginya tuntutan pertumbuhan ekonomi. Mempertahankan kinerja industri dan menarik sebanyak-banyaknya investasi adalah agenda prioritas bagi mereka.

Gambar 5.2 Tren Emisi Karbon dari Energi Fosil



Sumber: <https://earthobservatory.nasa.gov/images/152519/emissions-from-fossil-fuels-continue-to-rise>

Sementara menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi, sebagian besar alat transportasi dan permesinan industri di negara-negara berkembang masih sangat bergantung kepada bahan bakar fosil seperti solar dan bensin. Hal ini diindikasikan antara lain dengan masih dominannya populasi kendaraan bermotor dengan

bahan bakar minyak baik itu sepeda motor, mobil, truk, dan alat transportasi massal. Bahkan dalam rilis *International Energy Agency (IEA)* disebutkan bahwa penjualan kendaraan jenis SUV (*Sport Utility Vehicle*) terus mengalami peningkatan sekitar 3 persen dalam periode 2021-2022, dimana penjualan jenis kendaraan ini berkontribusi hampir separuh dari penjualan kendaraan bermotor secara global.

Akibatnya emisi karbon dioksida tembus hingga mencapai 1 milyar ton pada 2022 (Cozzi et al., 2023). Polutan udara dari operasionalisasi alat transportasi merupakan salah satu yang memiliki dampak paling besar terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Fenomena lingkungan ini disebut juga dengan istilah *traffic-related air pollution* (TRAP) atau polusi udara terkait lalu lintas yang berasal dari sumber bergerak di jalan raya. Dalam sejumlah kajian, polusi udara terkait lalu lintas telah dianggap sebagai salah satu sumber krisis kesehatan di masyarakat. Situasinya semakin memburuk seiring dengan tingginya kebutuhan transportasi masyarakat dan industri di banyak negara berkembang (Khreis et al., 2020).

Saat ini, polusi udara terkait lalu lintas (TRAP) merupakan krisis kesehatan masyarakat, yang cakupan dan besarnya sangat luas dan terus bertambah seiring dengan tersedianya pengetahuan dan metode kuantifikasi baru. TRAP merujuk pada polusi udara sekitar yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor seperti kendaraan berat dan ringan, bus, kereta, mobil penumpang, dan sepeda motor. TRAP juga sering disebut sebagai polusi udara yang berasal dari sumber bergerak di jalan raya. Meskipun belakangan tren penjualan kendaraan listrik terus meningkat, efektivitas keberhasilannya dalam menciptakan energi bersih masih membutuhkan studi lebih mendalam. Pasalnya, energi listrik yang digunakan untuk mengisi kembali baterai berbagai jenis kendaraan listrik ini masih bersumber pada suplai listrik konvensional yang dihasilkan oleh sumber energi fosil. Untuk itu, upaya mempercepat target penggunaan energi bersih secara global sangat bergantung

juga kepada kemampuan negara-negara untuk menyediakan infrastruktur pengisian baterai listrik yang bersumber kepada energi bersih dan terbarukan (Bruchon et al., 2024).

C. Pengelolaan SDA Berkelanjutan & Teknologi Hijau

Di samping pentingnya *low carbon-economy*, konsep pertumbuhan hijau juga memberikan perhatian besar terhadap pengelolaan SDA berkelanjutan karena kontribusinya yang masih sangat signifikan dalam pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Negara-negara besar seperti AS dan China masih mengandalkan SDA sebagai salah satu sumber penggerak roda pertumbuhan ekonomi mereka (Singh et al., 2024). Demikian halnya dalam struktur perekonomian negara-negara berkembang, diantaranya seperti negara-negara di Afrika dimana kekayaan alam mineral telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi (Awolusi, 2016), sehingga manajemen SDA yang berkelanjutan sangat diperlukan tidak hanya untuk kepentingan ekonomi jangka pendek, tetapi juga untuk keberlangsungan semua makhluk hidup di alam semesta.

Dalam pengertian umum, pengelolaan SDA berkelanjutan diartikan sebagai suatu upaya untuk menghindari kerusakan lingkungan dari eksploitasi SDA yang dapat berdampak serius terhadap manusia, dan makhluk hidup lainnya. Sebab itu, manajemen SDA berkelanjutan mencakup beberapa upaya strategis seperti penghematan air, pelestarian unsur organik tanah, pengurangan erosi, dan pelestarian keanekaragaman hayati (Carroll li et al., 2025).

Melihat kompleksitas pengelolaan SDA keberlanjutan ini, pemerintah memegang peran krusial dalam menyelenggarakan aturan-aturan dalam tata kelola industri berbasis SDA yang berorientasi terhadap pelestarian lingkungan. Dalam hal ini, regulasi yang efektif dan transparan dengan memadukan prinsip-prinsip tata kelola lingkungan akan memberikan dampak positif

dalam pengelolaan SDA (Rahman & Hossain, 2025).

Kendati begitu, upaya kolektif dengan melibatkan aktor non-pemerintah termasuk korporasi, komunitas, dan koalisi masyarakat sipil juga sangat diperlukan untuk memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan dan pemantauan peraturan-peraturan tersebut (Zhou et al., 2024). Pelaksanaan kolaborasi ini salah satunya dapat ditelusuri dari berkembangnya istilah *the collaborative production of knowledge and practices (co-production)* yang menggabungkan antara ilmu pengetahuan, kebijakan, dengan *indigenous and local knowledge*. Kerjasama lintas aktor ini merupakan salah satu faktor kunci untuk mengantisipasi dampak negatif pengelolaan SDA terhadap komunitas dan masyarakat setempat. Beberapa diantaranya dapat diilustrasikan dalam inisiatif pembentukan *Indigenous Peoples and Local Communities'* (IPLCs) dalam mendukung upaya mitigasi permasalahan lingkungan dan perubahan iklim.

Mereka dilibatkan dalam melakukan evaluasi program *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation'* (REDD+) untuk memastikan agar pelaksanaan proyek lingkungan tersebut tidak membahayakan komunitas setempat. Di sisi lain, para ilmuwan bersama-sama dengan komunitas lokal menyusun perencanaan untuk mengumpulkan secara selektif limbah padat yang digunakan dalam rangkaian penyelamatan keanekaragaman hayati dari polusi (Van Maurik Matuk et al., 2023).

Pada dasarnya, masyarakat adat, suku-suku pedalaman masih menyimpan tradisi leluhur mereka dalam menjaga keseimbangan alam dengan kebutuhan manusia, termasuk pelestarian spesies tumbuhan yang penting dan relatif sulit ditemukan, dan norma-norma dalam pemanfaatan hasil hutan dan pertanian yang tidak semata-mata hanya untuk memenuhi konsumsi manusia. Studi Kala (2022) menyebutnya dengan istilah *traditional ecological knowledge* (TEK) dalam suatu penelitian yang dilakukan di Cagar Biosfer Pachmarhi, India.

Di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, *Middle East and North Africa* (MENA), misalnya, eksplorasi minyak dan gas telah menjadi salah satu sektor industri andalan yang menopang pertumbuhan ekonomi banyak negara di wilayah ini. Namun pada saat yang sama, tantangan lingkungan pun semakin memprihatinkan dengan tingginya emisi karbon MENA yang berada diatas rata-rata dunia (Xiaoman et al., 2021). Tingginya konsumsi dan produksi energi menyumbang sekitar 85 persen dari total efek GRK di wilayah ini. Bahkan, empat negara MENA termasuk dalam peringkat 10 besar dunia dalam hal jejak ekologi (Khalfaoui et al., 2023). Tidak bisa dinafikan bahwa eksplorasi SDA di MENA memberikan dampak lingkungan yang serius dalam jangka panjang, sebagaimana studi Touati & Ben-Salha (2024) yang memperkuat beberapa studi sebelumnya terkait implikasi eksploitasi SDA terhadap *ecological footprint* (EFP) di MENA.

Meski demikian dalam beberapa tahun terakhir kita menyaksikan upaya transformatif dalam kebijakan pengelolaan energi di MENA terutama di negara-negara Arab Teluk seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan lingkungan. Salah satunya dapat ditelusuri dari implementasi *Saudi Vision 2030*, sebagai rencana strategis yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi (KSA) untuk mendiversifikasi ketergantungan ekonominya terhadap migas. Dalam visi ini, pemerintah KSA berkomitmen untuk secara bertahap mengurangi penggunaan energi fosil dan memprioritaskan produksi energi bersih dan terbarukan. KSA menargetkan pada tahun 2030 setidaknya 50 persen dari total energi yang digunakan bersumber dari energi terbarukan, yaitu tenaga surya dan angin.

Upaya ini dilakukan diantaranya dengan menggandeng China dalam kerjasama investasi pengembangan energi terbarukan di KAS, sementara pada saat yang sama China mendapatkan keuntungan dengan akses pasar yang lebih leluasa di pasar Timur Tengah terutama di negara anggota *Gulf Cooperation Council* (GCC) (Alfehaid & Young, 2024). Strategi dan pola kebijakan yang relatif sama

diterapkan juga oleh Mesir dalam *Egypt's Vision 2030*. Di dalam rencana strategis ini, Mesir menargetkan setidaknya 42 persen dari pembangkit listrik di negaranya harus bersumber dari energi terbarukan pada 2030. Memang target ini dianggap ambisius, ditambah lagi dengan berbagai masalah dalam birokrasi pemerintahan, tetapi Mesir menyimpan potensi energi bersih yang signifikan mencakup panas matahari yang berlimpah, koridor angin yang kuat, dan hidrogen hijau (J. R. Cohen & Helwa, 2025).

Rangkaian upaya yang tengah dilakukan oleh negara-negara MENA dapat juga menggambarkan tingginya kebutuhan terhadap teknologi dalam upaya transisi menuju pertumbuhan hijau. Teknologi sebagai produk kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan manusia merupakan katalisator penting dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial termasuk persoalan lingkungan. Dalam kajian energi dan lingkungan kini dikenal istilah *low-carbon energy technology* (LCET) yang memiliki kontribusi penting dalam menekan emisi karbon dan mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi konvensional.

Konsep LCET secara umum terdiri dari tiga komponen utama yaitu pengembangan pembangkit listrik bertenaga nuklir (PLTN), produksi energi alternatif, dan konservasi energi. Di tengah masih dominannya pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil seperti batu bara, nuklir merupakan sumber energi alternatif yang rendah karbon. Sementara itu, pengembangan energi alternatif termasuk meningkatkan ketersediaan pasokan energi bersih dan terbarukan seperti panas matahari, angin, dan *hydropower*. Tidak kalah pentingnya adalah konservasi energi dimana para pengguna, industri, perkantoran, dan masyarakat memiliki tingkat kesadaran untuk melakukan penghematan energi (Zhao, 2023).

Dari aspek finansial, keberadaan teknologi finansial (FinTech) telah berkembang menjadi salah satu kanal pembiayaan alternatif dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat, investor, dan korporasi untuk terlibat langsung dalam pembiayaan berbagai

proyek-proyek hijau di negara mereka (Rahman & Hossain, 2025).

Di China, banyak perusahaan berbasis teknologi tinggi telah memanfaatkan platform teknologi digital untuk mengakselerasi inovasi hijau yang dianggap krusial untuk mencapai pembangunan bisnis yang berkelanjutan. Mereka telah mengoptimalkan penggunaan *artificial intelligence* dan *big data analytics* untuk meningkatkan efisiensi produksi dan kemampuan korporasi dalam *green innovation* (Zhu et al., 2024). Secara garis besar, inovasi teknologi adalah salah satu faktor fundamental dalam mencapai pertumbuhan hijau. Melalui inovasi teknologi ini diharapkan dapat menghasilkan penggunaan energi yang efisien dan meminimalisasi emisi GRK, sehingga dapat tercapai keseimbangan pertumbuhan ekonomi yang tidak semata-mata berorientasi kepada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mengedepankan kepentingan ekologis dan pelestarian lingkungan untuk masa depan (Yikun et al., 2023).

BAB 6

PENUTUP

Bab ini tidak bermaksud untuk menutup diskusi dan kajian kita tentang sumber daya alam dalam perspektif Ekonomi Politik Global, tetapi ingin menampilkan kembali beberapa substansi utama yang perlu kita pahami dan telah disinggung dalam pembahasan buku ini. Sumber daya alam adalah suatu anugerah yang dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi baik melalui aktivitas investasi maupun perdagangan luar negeri. Namun keberhasilan ini juga ditentukan oleh kemampuan suatu negara mengelolanya secara baik dan berkelanjutan.

Bila tidak, maka istilah *resource curse* kembali mengingatkan kita semua bahwa terdapat sejumlah negara kaya sumber daya alam masih menghadapi tantangan serius di bidang sosial ekonomi, seperti kemiskinan dan pengangguran, yang dapat berimplikasi kepada instabilitas politik dan keamanan di wilayah mereka. Ketergantungan yang berlebihan terhadap penghasilan sumber daya alam tanpa memperhatikan potensi fluktuasi harga komoditas global adalah salah satu faktor penyebab utama di balik fenomena kutukan SDA ini.

Oleh sebab itu, beberapa negara telah berupaya untuk melakukan diversifikasi ekonomi, melepas ketergantungan mereka secara perlahan dengan menetapkan kebijakan-kebijakan strategis, sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara Arab Teluk, Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, dan Qatar. Peran dan pengaruh global mereka semakin meluas sejalan dengan keberhasilan diversifikasi ekonomi yang telah dilakukan termasuk melalui optimalisasi investasi internasional melalui *sovereign wealth fund*, seperti Public Investment Fund (Arab Saudi), dan Abu Dhabi Investment Authority (Persatuan Emirat Arab).

Pengalaman dan praktik baik ini juga telah dibuktikan oleh negara maju seperti Norwegia melalui *the Government Pension Fund*. Keberhasilan lembaga-lembaga dana kedaulatan ini juga dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan yang dilakukan secara profesional dan di bawah standar pengawasan yang ketat. Aktivitas penanaman modal tidak sekedar hanya dilakukan dengan proses *business as usual*, tetapi dilakukan secara hati-hati dengan kepentingan utama untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya dengan risiko kerugian yang kecil. Strategi Norwegia, misalnya, memilih sektor teknologi informasi sebagai salah satu destinasi investasi utama telah menempatkannya dalam struktur kepemilikan saham korporasi-korporasi teknologi global seperti Meta, Amazon, Nvidia, dan Microsoft.

Selain diversifikasi investasi, sumber daya manusia menjadi salah satu kunci untuk menggeser dari *natural resources economy* menjadi *ideas economy*. Australia telah menjalani proses panjang dalam memodifikasi strategi pemerintah untuk mendukung inovasi dan kolaborasi riset dan pengembangan antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan industri. Keberhasilan kolaborasi ini utamanya ditentukan juga oleh ide-ide inovatif yang lahir dari SDM terampil dan berpengalaman. Demikian halnya dengan Chili, negara kaya SDA ini juga memastikan agar akses pendidikan dapat dinikmati oleh kalangan masyarakat kurang mampu melalui bantuan pendidikan. Kendati begitu, kualitas pendidikan dikendalikan melalui peningkatan kualitas dan profesionalitas tenaga pendidik diantaranya dengan memberikan pelatihan dan pendidikan yang terukur dan terakreditasi.

Pada akhirnya, beragam strategi dan kebijakan dapat dilakukan oleh negara-negara untuk mengoptimalkan pendapatan dari hasil SDA untuk kepentingan pembangunan ekonomi mereka. Dalam hal ini, perlu dipahami bahwa ketersediaan SDM terbatas dan dapat habis, sehingga dibutuhkan perencanaan dan strategi kebijakan yang matang untuk mendukung inovasi-inovasi dalam rangka diversifikasi dan menciptakan peluang ekonomi baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S., Saqib, N., & Shahzad, U. (2024). Global export flow of Chilean copper: The role of environmental innovation and renewable energy transition. *Geoscience Frontiers*, 15(3), 101697. <https://doi.org/10.1016/j.gsf.2023.101697>
- Aderounmu, B., Azuh, D., Onanuga, O., Oluwatomisin, O., Ebenezer, B., & Azuh, A. (2021). Poverty drivers and Nigeria's development: Implications for policy intervention. *Cogent Arts & Humanities*, 8(1), 1927495. <https://doi.org/10.1080/23311983.2021.1927495>
- Agu, O., & Nyatanga, P. (2020). Oil price fluctuation, macroeconomic indicators and poverty in Nigeria. *AFFRIKA Journal of Politics, Economics and Society*, 10(1), 45–61. <https://doi.org/10.31920/2075-6534/2020/10n1a3>
- Ahmad, A., Albarrak, M. S., Akhtar, S., & Akram, H. W. (2023). Sustainable Development and Saudi Vision 2030: Entrepreneurial Orientation of Students Toward E-Businesses and Proposed Model of “Virtual Business Incubator” for SEU. *Education Research International*, 2023, 1–16. <https://doi.org/10.1155/2023/6106580>
- Ahmad, T., & Zhang, D. (2020). A critical review of comparative global historical energy consumption and future demand: The story told so far. *Energy Reports*, 6, 1973–1991. <https://doi.org/10.1016/j.egyr.2020.07.020>
- Aimon, H., Kurniadi, A. P., Sentosa, S. U., & Rahman, N. A. (2023). Production, Consumption, Export and Carbon Emission for Coal Commodities: Cases of Indonesia and Australia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(5), 484–492. <https://doi.org/10.32479/ijeep.14798>
- Ajami, R. A., & Karimi, H. A. (2023). Sovereign Wealth Funds: Opportunities, Global Challenges & Relevance to the Oil-Producing Economies. *Journal of Asia-Pacific Business*, 24(3), 145–148. <https://doi.org/10.1080/10599231.2023.2241012>
- Ajide, K. B. (2022). Is natural resource curse thesis an empirical regularity for economic complexity in Africa? *Resources Policy*, 76, 102755. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102755>

- Akyapi, B., Bellon, M., & Massetti, E. (2022). Estimating Macro-Fiscal Effects of Climate Shocks From Billions of Geospatial Weather Observations. *IMF Working Papers*, 2022(156), 1. <https://doi.org/10.5089/9798400217203.001>
- Al Nahed, S. (2015). Covering Libya: A Framing Analysis of Al Jazeera and BBC Coverage of the 2011 Libyan Uprising and NATO Intervention. *Middle East Critique*, 24(3), 251–267. <https://doi.org/10.1080/19436149.2015.1050784>
- Aldianto, L., Anggadwita, G., Permatasari, A., Mirzanti, I. R., & Williamson, I. O. (2021). Toward a Business Resilience Framework for Startups. *Sustainability*, 13(6), 3132. <https://doi.org/10.3390/su13063132>
- Alemahu, A. (2023). Saudi Arabia's Vision 2030 and Its Regional Implication. *International Journal of Public Administration and Management Research (IJPAMR)*, 09(01). <file:///Users/aditafajarningrum/Downloads/860-Article%20Text-1596-1-10-20230817.pdf>
- Alfehaid, R. M., & Young, K. E. (2024). *Saudi Arabia's Renewable Energy Initiatives and Their Geopolitical Implications* (Insights from the Center on Global Energy Policy). Center on Global Energy Policy at Columbia SIPA. <https://www.energypolicy.columbia.edu/saudi-arabias-renewable-energy-initiatives-and-their-geopolitical-implications/#:~:text=Saudi%20Arabia%20has%20establishe d%20a,and%2040%20GW%20from%20wind.>
- Aljarallah, R. A. (2020). THE ECONOMIC IMPACTS OF NATURAL RESOURCE DEPENDENCY IN GULF COUNTRIES. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 10(6), 36–52. <https://doi.org/10.32479/ijeeep.9836>
- Aljarallah, R. A., & Angus, A. (2020). Dilemma of Natural Resource Abundance: A Case Study of Kuwait. *Sage Open*, 10(1), 2158244019899701. <https://doi.org/10.1177/2158244019899701>
- ALJAZEERA. (2017, December 14). Profile: Crown Prince Mohammed bin Salman. *ALJAZEERA.Com*. <https://www.aljazeera.com/features/2017/12/14/profile-crown-prince-mohammed-bin-salman>
- Alsweilem, K., Lepech, M., Monk, A., & Rietveld, M. (2024). *Saudi Arabia: From The Big Push To The Long Push Building Resilience*

- Beyond Vision 2030*. The Center for Sustainable Development & Global Competitiveness, Stanford University.
- Al-Tamimi, N. (2024). *The Relations Between China and Saudi Arabia: Continuity Amid New Challenges*. Friedrich Ebert Stiftung. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/zypern/21446.pdf>
- Álvarez-Ossorio, I., & Rodríguez García, L. (2021). The foreign policy of Qatar: From a mediating role to an active one. *Revista Española de Ciencia Política*, 56, 97–120. <https://doi.org/10.21308/recp.56.04>
- Amnesty. (2025, May 23). *Norway/OPT: Divesting pension fund a crucial step towards dismantling Israel's unlawful occupation* [International Non-Governmental Organization Official Website]. Amnesty International. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2025/05/norway-opt-divesting-pension-fund-a-crucial-step-towards-dismantling-israels-unlawful-occupation/>
- Amran, Y. H. A., Amran, Y. H. M., Alyousef, R., & Alabduljabbar, H. (2020). Renewable and sustainable energy production in Saudi Arabia according to Saudi Vision 2030; Current status and future prospects. *Journal of Cleaner Production*, 247, 119602. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119602>
- Angulo, M. (2018, October). *CHILE's STRATEGY FOR INNOVATION IN ENERGY TRANSITION AND LOW EMISSION MINING*. 14th Annual General Meeting IGF 2018. https://www.igfmining.org/wp-content/uploads/2018/11/Session-11_-_Leveraging-Innovation_-1.pdf
- Asdrubali, F., & Desideri, U. (2019). *Handbook of energy efficiency in buildings: A life cycle approach*. Butterworth-Heinemann.
- Asiamah, O., Agyei, S. K., Ahmed, B., & Agyei, E. A. (2022). Natural resource dependence and the Dutch disease: Evidence from Sub-Saharan Africa. *Resources Policy*, 79, 103042. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.103042>
- Awolusi, O. D. (2016). Mining Sector and Economic Growth in Southern African Economies: A Panel Data Analysis. *Trade & Industrial Policy Strategies (TIPS) Forum Papers*.
- Badeeb, R. A., Lean, H. H., & Clark, J. (2017). The evolution of the natural resource curse thesis: A critical literature survey. *Resources Policy*, 51, 123–134. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2016.10.015>

- Bagdathi, M. C., Uçak, İ., & Elsheikh, W. (2023). IMPACT OF GLOBAL WARMING ON AQUACULTURE IN NORWAY. *International Journal of Engineering Technologies and Management Research*, 10(3). <https://doi.org/10.29121/ijetmr.v10.i3.2023.1307>
- Baiyegunhi, L. J. S. (2024). Examining the impact of human capital and innovation on farm productivity in the KwaZulu-Natal North Coast, South Africa. *Agrekon*, 63(1-2), 51-64. <https://doi.org/10.1080/03031853.2024.2357072>
- Barman, A. (2016, May 26). Abu Dhabi Sovereign Fund ADIA eyes \$200 million investment in Greenko. *The Economic Times*. <https://economictimes.indiatimes.com/industry/energy/power/abu-dhabi-sovereign-fund-adia-eyes-200-million-investment-in-greenko/articleshow/52441639.cms?from=mdr>
- Bashiru, M., Hashim, F., & Ganesan, Y. (2022). *Determinants of Corporate Sustainability Performance of Listed Oil and Gas Companies in Nigeria: The Role of Internal Governance Mechanisms*. 14(3).
- Bass, A. (2018). Is Groningen Effect Still Present in Russia: A Vector Error Correction Approach. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 8(5), 273-280.
- BCG. (2024). *The Future of the Global Gaming Industry: Opportunities Amid Industry Challenges*. Boston Consulting Group. <https://www.bcg.com/press/12december2024-future-of-global-gaming-industry>
- Blaxekjær, L. (2016). Korea as green middle power: Green growth strategic action in the field of global environmental governance. *International Relations of the Asia-Pacific*, 16(3), 443-476. <https://doi.org/10.1093/irap/lcv023>
- Boyd, C. E., McNevin, A. A., & Davis, R. P. (2022). The contribution of fisheries and aquaculture to the global protein supply. *Food Security*, 14(3), 805-827. <https://doi.org/10.1007/s12571-021-01246-9>
- Brimicombe, C., Wieser, K., Monthaler, T., Jackson, D., De Bont, J., Chersich, M. F., & Otto, I. M. (2024). Effects of ambient heat exposure on risk of all-cause mortality in children younger than 5 years in Africa: A pooled time-series analysis. *The Lancet Planetary Health*, 8(9), e640-e646. [https://doi.org/10.1016/S2542-5196\(24\)00160-8](https://doi.org/10.1016/S2542-5196(24)00160-8)

- Bruchon, M., Chen, Z. L., & Michalek, J. (2024). Cleaning up while Changing Gears: The Role of Battery Design, Fossil Fuel Power Plants, and Vehicle Policy for Reducing Emissions in the Transition to Electric Vehicles. *Environmental Science & Technology*, 58(8), 3787–3799. <https://doi.org/10.1021/acs.est.3c07098>
- Burke, P. J. (2023). On the way out: Government revenues from fossil fuels in Australia. *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics*, 67(1), 1–17. <https://doi.org/10.1111/1467-8489.12503>
- Cambridge Dictionary. (2013). Paradox. In *Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus*. Cambridge University Press.
- Carnegie Endowment. (2024, July 8). *Pivotal States: Is a Deeper Alliance With Saudi Arabia Worth It?* Carnegie Endowment for International Peace. <https://carnegieendowment.org/events/2024/07/pivotal-states-is-a-deeper-alliance-with-saudi-arabia-worth-it?lang=en>
- Carroll Ii, D. A., Wilson, K. R., Rogers, B. L., Coates, J., & Griffin, T. S. (2025). Appeals to environmental protection and farmer adoption of sustainable natural resource management – A case study of Kaya, Burkina Faso. *Journal of Environmental Management*, 376, 124415. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.124415>
- Casti, J. L. (n.d.). Complexity. In *Britannica Encyclopædia*. Retrieved February 2, 2024, from <https://e-resources.perpusnas.go.id:2086/levels/adults/article/complexity/105912#129405.toc>
- Cereceda Otarola, M., Rodríguez, Y. V., Alborno, J. J., Palomo, J. M., Vera, J. R., & Badilla, J. R. (2025). Innovation systems in Chile: The four helix model of Chilean universities. *Technology in Society*, 83, 103013. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2025.103013>
- Cetindamar, D., Renando, C., Bliemel, M., & Klerk, S. D. (2024). The Evolution of the Australian Start-up and Innovation Ecosystem: Mapping Policy Developments, Key Actors, Activities, and Artefacts. *Science, Technology and Society*, 29(1), 13–33. <https://doi.org/10.1177/09717218231201878>
- Chang, G., Yasin, I., & Naqvi, S. M. M. A. (2024). Environmental Sustainability in OECD Nations: The Moderating Impact of Green

- Innovation on Urbanization and Green Growth. *Sustainability*, 16(16), 7047. <https://doi.org/10.3390/su16167047>
- Chaziza, M. (2020). China-Qatar Strategic Partnership and the Realization of One Belt, One Road Initiative. *China Report*, 56(1), 78–102. <https://doi.org/10.1177/0009445519895612>
- Cheraghlou, A. M. (2017). Patterns and Trends in Sovereign Wealth Fund Investments: A Post-Crisis Descriptive Analysis. *Iran. Econ. Rev.*, 21(04), 725–763.
- Claessens, S., & Kreuser, J. (2010). Strategic Investment and Risk Management for Sovereign Wealth Funds. In A. B. Berkelaar, J. Coche, & K. Nyholm (Eds.), *Central Bank Reserves and Sovereign Wealth Management* (pp. 247–284). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/9780230250819_10
- Cohen, B. J. (2009). Sovereign Wealth Funds and National Security: The Great Tradeoff. *International Affairs (Royal Institute of International Affairs 1944-)*, 85(4), 713–731.
- Cohen, J. R., & Helwa, R. (2025). *The green gold rush: Why renewable energy is Egypt's next big opportunity* (New Atlanticist). The Atlantic Council. <https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-green-gold-rush-why-renewable-energy-is-egypts-next-big-opportunity/#:~:text=This%20potential%20is%20reflected%20in,worth%20of%20green%20hydrogen%20investments.>
- COP 29, P. (2024, November 19). *COP29 Declaration on Reducing Methane from Organic Waste*. The 29th Session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. <https://cop29.az/en/pages/cop29-declaration-on-reducing-methane-from-organic-waste>
- Cozzi, L., Petropoulos, A., Paoli, L., Huismans, M., & Dasgupta, A. (2023, February 27). *As their sales continue to rise, SUVs' global CO2 emissions are nearing 1 billion tonnes* [International Organization Official Website]. International Energy Agency (IEA). <https://www.iea.org/commentaries/as-their-sales-continue-to-rise-suvs-global-co2-emissions-are-nearing-1-billion-tonnes>
- Crooker, R. A. (2024). *Chile's copper production*. EBSCO. <https://www.ebsco.com>

- Cui, W., Yang, Y., & Dai, J. (2023). Evaluating the resource curse hypothesis and the interplay of financial development, human development, and political stability in seven emerging economies. *Environmental Science and Pollution Research*, 30(50), 109559–109570. <https://doi.org/10.1007/s11356-023-29907-6>
- Curran, G. (2021). Coal, climate and change: The narrative drivers of Australia's coal economy. *Energy Research & Social Science*, 74, 101955. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.101955>
- Dam, M. M., Durmaz, A., Bekun, F. V., & Tiwari, A. K. (2024). The role of green growth and institutional quality on environmental sustainability: A comparison of CO2 emissions, ecological footprint and inverted load capacity factor for OECD countries. *Journal of Environmental Management*, 365. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.121551>
- Danaan, V. V. (2018). Analysing Poverty in Nigeria through Theoretical Lenses. *Journal of Sustainable Development*, 11(1), 20. <https://doi.org/10.5539/jsd.v11n1p20>
- Dauvin, M., & Guerreiro, D. (2017). The Paradox of Plenty: A Meta-Analysis. *World Development*, 94, 212–231. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.01.009>
- de Silva, L. S. (2014). Export Trends and Free Trade in Australia: An analysis. *The Otemon Journal of Australian Studies*, 40. <https://www.otemon.ac.jp/library/research/laboc/cas/publication/pdf/40/5.pdf>
- Demmelhuber, T. (2019). Playing the Diversity Card: Saudi Arabia's Foreign Policy under the Salmans. *The International Spectator*, 54(4), 109–124. <https://doi.org/10.1080/03932729.2019.1678862>
- Dong, Z., & Ullah, S. (2023). Towards a Green Economy in China? Examining the Impact of the Internet of Things and Environmental Regulation on Green Growth. *Sustainability*, 15(16), 12528. <https://doi.org/10.3390/su151612528>
- Doyle, E., & O'Connor, F. (2013). Innovation capacities in advanced economies: Relative performance of small open economies. *Research in International Business and Finance*, 27(1), 106–123. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2012.08.005>
- Duffy, C., & Matthews, A. L. (2025, April 9). These tech leaders donated to Trump. Now they're out billions of dollars. *CNN*

- Business*. <https://edition.cnn.com/2025/04/09/tech/tech-leaders-supported-trump-lost-money-dg>
- Ebnesajjad, S. (Ed.). (2013). *Handbook of biopolymers and biodegradable plastics: Properties, processing and applications*. Elsevier/William Andrew.
- Edeh, J., & Udoikah, J. M. (2018). Unemployment and Youth Restiveness in the Niger Delta Region: Interrogating Governments' Management Strategies. *African Journal of Politics and Administrative Studies*, 11(01).
- Elshaer, I. A. (2023). Investment in The Sports Industry In Saudi Arabia and Its Impact on the Quality of Life of Football Fans. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e2236. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.2236>
- Elshehaby, H. (2025). Can the U.S. Keep Its Military Edge in Saudi Arabia? *Afkar - Middle East Council on Global Affairs*. https://mecouncil.org/blog_posts/can-the-u-s-keep-its-military-edge-in-saudi-arabia/
- Ericsson, M., & Löf, O. (2019). Mining's contribution to national economies between 1996 and 2016. *Mineral Economics*, 32(2), 223–250. <https://doi.org/10.1007/s13563-019-00191-6>
- Fernandes, C. I., Veiga, P. M., Ferreira, J. J. M., & Hughes, M. (2021). Green growth versus economic growth: Do sustainable technology transfer and innovations lead to an imperfect choice? *Business Strategy and the Environment*, 30(4), 2021–2037. <https://doi.org/10.1002/bse.2730>
- Fernández Cofré, M. B., Fernández Quevedo, L., Universidad de Chile, Díaz Navarro, M., Universidad Alberto Hurtado (Chile), Jofré Cáceres, P., & Universidad Alberto Hurtado (Chile). (2021). Respuesta e interpretación a políticas de rendición de cuentas de formación docente en Chile. *Pensamiento Educativo: Revista de Investigación Educativa Latinoamericana*, 58(1). <https://doi.org/10.7764/PEL.58.1.2021.9>
- Fletcher, C., Ripple, W. J., Newsome, T., Barnard, P., Beamer, K., Behl, A., Bowen, J., Cooney, M., Crist, E., Field, C., Hiser, K., Karl, D. M., King, D. A., Mann, M. E., McGregor, D. P., Mora, C., Oreskes, N., & Wilson, M. (2024). Earth at risk: An urgent call to end the age of destruction and forge a just and sustainable future. *PNAS Nexus*, 3(4), pgae106. <https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgae106>

- Flynn, C., & Aldamer, S. (2024). The international political economy of Saudi Arabia: Sovereign fund and foreign policy. *Digest of Middle East Studies*, 33(2), 149–165. <https://doi.org/10.1111/dome.12317>
- Freebairn, J. (2012). Mining booms and government budgets*. *Australian Journal of Agricultural and Resource Economics*, 56(2), 201–221. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8489.2012.00580.x>
- Gallo, E., Quijal-Zamorano, M., Turrubiates, R. F. M., Tonne, C., Basagaña, X., Achebak, H., & Ballester, J. (2024). Heat-related mortality in Europe during 2023 and the role of adaptation in protecting health. *Nature Medicine*, 3101–3105. <https://doi.org/10.1038/s41591-024-03186-1>
- Ganga-Contreras, F., Rodríguez-Ponce, E., S?ez, W., & Araya-Castillo, L. (2024). Chilean Universities in the main international rankings: Critical review of the results. *Information Sciences Letters*, 13(1). <https://digitalcommons.aaru.edu.jo/isl/vol13/iss1/11>
- García-Rodríguez, J. L., García-Rodríguez, F. J., Castilla-Gutiérrez, C., & Major, S. A. (2015). Oil, Power, and Poverty in Angola. *African Studies Review*, 58(1), 159–176. <https://doi.org/10.1017/asr.2015.8>
- Garrison, M. (2024, March 5). *Emissions from Fossil Fuels Continue to Rise* [Government Website]. NASA Earth Observatory. <https://earthobservatory.nasa.gov/images/152519/emissions-from-fossil-fuels-continue-to-rise>
- Garwi, J. (2023). Promoting Inclusive Economic Growth and Development in Angola: A Policy Agenda for Diversification and Innovation. *HAPSc Policy Briefs Series*, 4(1), 48–54. <https://doi.org/10.12681/hapscpbs.35182>
- Gasparotto, J., & Da Boit Martinello, K. (2021). Coal as an energy source and its impacts on human health. *Energy Geoscience*, 2(2), 113–120. <https://doi.org/10.1016/j.engeos.2020.07.003>
- Gauri, F. N. (2012). The Financial Crisis of 2008 and Saudi Arabia. *Nigerian Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, 1(1), 101–105. <https://doi.org/10.12816/0003613>

- Ge, M., Friedrich, J., & Vigna, L. (2024). *Where Do Emissions Come From? 4 Charts Explain Greenhouse Gas Emissions by Sector*. World Resource Institute. <https://www.wri.org/insights/4-charts-explain-greenhouse-gas-emissions-countries-and-sectors>
- George, A., & Tarr, J. (2021). Addressing Australia's collaboration 'problem': Is there a Brave New World of innovation policy post COVID-19? *Australian Journal of Public Administration*, 80(2), 179–200. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12470>
- George, A.-J. M., Tarr, J.-A., & Bird, S. (2020). Forty Years of Freedom of Information: Accountability, Policymaking and the National Innovation and Science Agenda. *Public Law Review*, 31(2), 189–211.
- Ghahramani, S. (2024). WEALTH AND DIPLOMACY: THE FOREIGN POLICY DIMENSIONS OF A U.S. SOVEREIGN WEALTH FUND. *Yale Journal of International Affairs*. <https://www.yalejournal.org/publications/wealth-and-diplomacy-the-foreign-policy-dimensions-of-a-us-sovereign-wealth-fund>
- GlobalFirepower.com. (2025). *Defense Budget by Country (2025)* [Dataset]. <https://www.globalfirepower.com/defense-spending-budget.php>
- Gómez-Pavón Durán, L. (2021). Historical evolution and current state of investment of the Norwegian sovereign wealth fund in the stock market. *Finance, Markets and Valuation*, 7(1), 23–40. <https://doi.org/10.46503/UHDY4364>
- González, P., Fernández-Vergara, A. E., Rojas, G., & Vilugrón, L. (2023). *The Political Economy of Regulation: Chile's Educational Reforms since the Return of Democracy*. Research on Improving Systems of Education (RISE). <https://doi.org/10.35489/BSG-RISE-2023/PE12>
- Green, R., Roos, G., Agarwal, R., & Scott-Kemmis, D. (2014). AUSTRALIAN PUBLIC SECTOR INNOVATION: SHAPING THE FUTURE THROUGH CO-CREATION. *Institute of Public Administration Australia (IPAA) Public Policy Discussion Paper*. <https://www.ipaa.org.au/wp-content/uploads/2019/06/Australian-Public-Sector-Innovation-policy-paper.pdf>

- Griffith-Jones, S., Sola, M. L. M., & Muga, J. P. (2018). *The Role of CORFO in Chile's Development* (Vol. 1). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198827948.003.0006>
- Gunton, T. (2003). Natural Resources and Regional Development: An Assessment of Dependency and Comparative Advantage Paradigms. *Economic Geography*, 79(1), 67–94. <https://doi.org/10.1111/j.1944-8287.2003.tb00202.x>
- Hadchity, M. (2025, May 19). Saudi Arabia's PIF expands global footprint with new Paris office. *Arab News*. <https://www.arabnews.com/node/2601314/business-economy>
- Halvorssen, A. M. (2023). How the Norwegian SWF Balances Ethics, ESG Risks, and Returns. In P. B. Hammond, R. Maurer, & O. Mitchell (Eds.), *Pension Funds and Sustainable Investment* (1st ed., pp. 220–234). Oxford University Press Oxford. <https://doi.org/10.1093/oso/9780192889195.003.0010>
- Halvorssen, A. M., & Eldredge, C. D. (2014). Investing in Sustainability: Ethics Guidelines and the Norwegian Sovereign Wealth Fund. *Denver Journal of International Law & Policy*, 42(3).
- Haslam, P. A., & Heidrich, P. (2016). From Neoliberalism to Resource Nationalism: States, Firms, and Development. In *The Political Economy of Natural Resources and Development: From Neoliberalism to Resource Nationalism*. Routledge.
- Hassan, O. (2020). Artificial Intelligence, Neom and Saudi Arabia's Economic Diversification from Oil and Gas. *The Political Quarterly*, 91(1), 222–227. <https://doi.org/10.1111/1467-923X.12794>
- Havrlant, D., & Darandary, A. (2021). *Economic Diversification under Saudi Vision 2030*. King Abdullah Petroleum Studies and Research Center. <https://doi.org/10.30573/KS--2021-DP06>
- Hendrix, C. S., & Noland, M. (2014). *Natural Resources and International Affairs*. Peterson Institute for International Economics.
- Herbes, C., Rilling, B., & Holstenkamp, L. (2021). Ready for new business models? Human and social capital in the management of renewable energy cooperatives in Germany. *Energy Policy*, 156, 112417. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112417>

- Herman, K. S. (2023). Green growth and innovation in the Global South: A systematic literature review. *Innovation and Development*, 13(1), 43–69. <https://doi.org/10.1080/2157930X.2021.1909821>
- Hickel, J., & Kallis, G. (2020). Is Green Growth Possible? *New Political Economy*, 25(4), 469–486. <https://doi.org/10.1080/13563467.2019.1598964>
- Horschig, D. (2016). Economic Diversification in Saudi Arabia. *Journal of Political Inquiry*. https://jpinyu.com/wp-content/uploads/2016/12/Fall2016_Saudi.pdf
- Hunter, M. (2012). THE STAGES OF ECONOMIC DEVELOPMENT FROM AN OPPORTUNITY PERSPECTIVE: ROSTOW EXTENDED. *Geopolitics, History and International Relations*, 04(02).
- Hyllestad, S., Bekkelund, A., & Madslien, E. H. (2023). Impacts of climate change on drinking water and health in Norway: A narrative literature review. *FAGFELLEVRDERTE ARTIKLER*. https://vannforeningen.no/wp-content/uploads/2023/06/Hyllestad_oppd.-25.10.23.pdf
- Ike, G. N., Usman, O., & Köksal, C. (2023). Oil price movements and agricultural production from heterogeneous sub-sectors: Analysing the Dutch disease in an African resource-rich economy. *Natural Resources Forum*, 1477-8947.12343. <https://doi.org/10.1111/1477-8947.12343>
- International Monetary Fund. Middle East and Central Asia Dept. (2022). United Arab Emirates: 2021 Article IV Consultation-Press Release; and Staff Report. *IMF Staff Country Reports*, 2022(050), 1. <https://doi.org/10.5089/9798400202834.002>
- International Trade Administration. (2023). *United Arab Emirates—Country Commercial Guide*. <https://www.trade.gov/country-commercial-guides/united-arab-emirates-oil-and-gas>
- Jackson, L. (2023, August 22). Abu Dhabi wealth fund puts \$450 mln more into Australian private credit fund. *Reuters*. <https://www.reuters.com/business/abu-dhabi-wealth-fund-puts-450-mln-more-into-australian-private-credit-fund-2023-08-22/>
- Javed, A., Subhani, B. H., Javed, A., & Rapposelli, A. (2024). Accessing the efficacy of green growth, energy efficiency, and green innovation for environmental performance in top

- manufacturing nations in the framework of sustainable development. *Quality & Quantity*, 58(6), 5829–5863. <https://doi.org/10.1007/s11135-024-01918-6>
- Jayasuriya, K., & Johnson, C. (2016, May 4). Ideas boom or innovation bust? Could Australia's 'ideas agenda' stifle real innovation? - Impact of Social Sciences. *Impact of Social Sciences - Maximizing the Impact of Academic Research*. <https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2016/05/04/ideas-boom-or-innovation-bust-australias-ideas-agenda/>
- Jewell, C. (2022, November). Sports diplomacy, nation branding and IP go hand in hand in Qatar. *WIPO Magazine*. https://www.wipo.int/wipo_magazine_digital/en/2022/article_0003.html
- Jha, S. S., & Tandon, J. K. (2019). A STUDY ON THE IMPACT OF TRANSPORT AND POWER INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT ON THE ECONOMIC GROWTH OF UNITED ARAB EMIRATES (UAE). *JOURNAL OF MANAGEMENT*, 6(2). <https://doi.org/10.34218/JOM.6.2.2019.003>
- Jin, T., & Kim, J. (2018). Coal Consumption and Economic Growth: Panel Cointegration and Causality Evidence from OECD and Non-OECD Countries. *Sustainability*, 10(3), 660. <https://doi.org/10.3390/su10030660>
- Jonczyk-Gwizdala, J., & Mauricio, J. M. (2022, October 14). Real Madrid renews sponsorship deal with Emirates airline until 2026. *Reuters*. <https://www.reuters.com/lifestyle/sports/real-madrid-renews-emirates-airline-sponsorship-deal-until-2026-2022-10-14/>
- Jowsey, E., & Kellett, J. (1995). The comparative sustainability of resources. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 2(2), 77–85. <https://doi.org/10.1080/13504509509469891>
- Jumaniyazov, I. T. (2021). "THE PROGRESSIVE FOREIGN EXPERIMENTS IN THE ACTIVITY OF SOVEREIGN WEALTH FUNDS." *Psychology and Education Journal*, 58(1), 4928–4935. <https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.1712>
- Kala, C. P. (2022). Traditional Ecological Knowledge of Tribal Communities and Sustainability of Nature and Natural Resources in Pachmarhi Biosphere Reserve in India.

- International Journal of Ecology*, 2022, 1–13.
<https://doi.org/10.1155/2022/5979024>
- Kamiński, T. (2017). Political Significance of Sovereign Wealth Funds. In *Political Players? Sovereign Wealth Funds' Investments in Central and Eastern Europe*. Wydawnictwo UŁ.
- Kamrava, M. (2015). *Qatar: Small state, big politics: with a new preface* (Paperback edition). Cornell University Press.
- Karl, T. L. (1999). The Perils of the Petro-State: Reflections on the Paradox of Plenty. *Journal of International Affairs*.
- Kazanci, H. (2023, December 21). Angola announces exit from OPEC amid dispute over oil production quota. *Www.Aa.Com.Tr*.
<https://www.aa.com.tr/en/africa/angola-announces-exit-from-opec-amid-dispute-over-oil-production-quota/3089171>
- Kelly, A. M., & Ngo Nguéda Radler, R. D. (2024). Does energy consumption matter for climate change in Africa? New insights from panel data analysis. *Innovation and Green Development*, 3(3), 100132. <https://doi.org/10.1016/j.igd.2024.100132>
- Khalifaoui, R., Arminen, H., Doğan, B., & Ghosh, S. (2023). *Environmental-Growth Nexus in MENA Region: Novel Evidence Based on Method of Moment Quantile Estimations*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.4358487>
- Khreis, H., Nieuwenhuijsen, M. J., Zietsman, J., & Ramani, T. (2020). Traffic-related air pollution: Emissions, human exposures, and health: An introduction. In *Traffic-Related Air Pollution* (pp. 1–21). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-818122-5.00001-6>
- Koch, N., & Perreault, T. (2019). Resource nationalism. *Progress in Human Geography*, 43(4), 611–631.
<https://doi.org/10.1177/0309132518781497>
- Kolstad, I., & Søreide, T. (2009). Corruption in natural resource management: Implications for policy makers. *Resources Policy*, 34(4), 214–226.
<https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2009.05.001>
- Krzyszowski, A. (2024). Economic Diversification of the United Arab Emirates through the Space Sector and Its Diplomacy. *Virtual Economics*, 7(4), 30–47.
[https://doi.org/10.34021/ve.2024.07.04\(2\)](https://doi.org/10.34021/ve.2024.07.04(2))

- Kunda, J. J., Gosling, S. N., & Foody, G. M. (2024). The effects of extreme heat on human health in tropical Africa. *International Journal of Biometeorology*, 68(6), 1015–1033. <https://doi.org/10.1007/s00484-024-02650-4>
- Lamina, I. A. (2024). *Diversification and Risks Management: A comparative Analysis of Norway's Government Pension Fund and China Investment Corporation* [Master Thesis, University Stavanger]. <https://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/bitstream/handle/11250/3151951/no.uis%3Ainspera%3A237470718%3A244577638.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Lawler, A. (2023, December 22). Angola to quit OPEC, reducing membership to 12 countries. *Www.Reuters.Com*. <https://www.reuters.com/business/energy/angola-quit-opec-reducing-membership-12-countries-2023-12-21/>
- Lee, J. (2023). Foreign Direct Investment in Political Influence. *International Studies Quarterly*, 67(01). <https://doi.org/10.1093/isq/sqad005>
- Leibbrandt, A., & Lynham, J. (2018). Does the paradox of plenty exist? Experimental evidence on the curse of resource abundance. *Experimental Economics*, 21(2), 337–354. <https://doi.org/10.1007/s10683-017-9539-y>
- Lelieveld, J., Haines, A., Burnett, R., Tonne, C., Klingmüller, K., Münzel, T., & Pozzer, A. (2023). Air pollution deaths attributable to fossil fuels: Observational and modelling study. *BMJ*, e077784. <https://doi.org/10.1136/bmj-2023-077784>
- Lenihan, H., McGuirk, H., & Murphy, K. R. (2019). Driving innovation: Public policy and human capital. *Research Policy*, 48(9), 103791. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2019.04.015>
- Letelier, M. F., & Sandoval, M. J. (2015). National Policies in Chile Related to Research and Innovation. In J. N. Hawkins & K. H. Mok (Eds.), *Research, Development, and Innovation in Asia Pacific Higher Education* (pp. 81–92). Palgrave Macmillan US. https://doi.org/10.1057/9781137457097_6
- Liang, X., Tian, N., Da Silva, D. L., Scarazzato, L., Karim, Z., & Ricard, J. G. (2025). Trends in World Military Expenditure, 2024. *SIPRI Fact Sheet*. https://www.sipri.org/sites/default/files/2025-04/2504_fs_milex_2024.pdf

- Lundgren, K. (2025, January 29). Norway \$1.8 trillion fund ended 2024 with tech-heavy top ten. *Fortune*. <https://fortune.com/europe/2025/01/29/norway-1-8-trillion-fund-ended-2024-with-tech-heavy-top-ten-norges-bank-investment-management-apple-microsoft-nvidia/>
- Ma, R. R., Xiong, T., & Bao, Y. (2021). The Russia-Saudi Arabia oil price war during the COVID-19 pandemic. *Energy Economics*, 102, 105517. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105517>
- Macaraig, C. E., & Fenton, A. J. (2021). Analyzing the Causes and Effects of the South China Sea Dispute. *The Journal of Territorial and Maritime Studies*, 42–58.
- Macaulay, C. (2023). Natural Resource Renewability, Development, and Territorial Conflict. *Democracy and Security*, 19(3), 291–314. <https://doi.org/10.1080/17419166.2022.2136651>
- Maini, T. S. (2022, August 1). UAE's Soft Power and Its Potential as a Cricketing Hub. *The Geopolitics*. <https://thegeopolitics.com/uaes-soft-power-and-its-potential-as-a-cricketing-hub/>
- Majid, A. (2023, December 21). Top 50 biggest news websites in the world: Global news brand traffic slump in November post Google updates. *Press Gazette*. https://pressgazette.co.uk/media-audience-and-business-data/media_metrics/most-popular-websites-news-world-monthly-2/
- Mardones, C., & Madrid Becerra, N. (2020). Ex-post evaluation of the R&D tax incentive law in Chile. *Academia Revista Latinoamericana de Administración*, 33(3/4), 337–359. <https://doi.org/10.1108/ARLA-03-2019-0092>
- Mares, D. R. (with Columbia University). (2022). *Resource nationalism and energy policy: Venezuela in context*. Columbia University Press.
- Martinez, M. (2023, November 9). School spending and academic achievement in Chile: New evidence from vouchers for low-income families. *Policy That Matters: Making Public Services Work for All*. 2023 APPAM Fall Research Conference, Georgia, United States. <https://appam.confex.com/appam/2023/meetingapp.cgi/Paper/49646>

- Mezaya, R., Anggoro, Y., Jaluakbar, W., & Rahayu, W. A. (2021). Overview of Extractive Resources Management in Indonesia. In E. G. Pereira, R. Spencer, & J. W. Moses (Eds.), *Sovereign Wealth Funds, Local Content Policies and CSR: Developments in the Extractives Sector*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-56092-8>
- Mien, E., & Goujon, M. (2022). 40 Years of Dutch Disease Literature: Lessons for Developing Countries. *Comparative Economic Studies*, 64(3), 351–383. <https://doi.org/10.1057/s41294-021-00177-w>
- Mintrom, M., & Wanna, J. (2006). Innovative state strategies in the Antipodes: Enhancing the ability of governments to govern in the global context. *Australian Journal of Political Science*, 41(2), 161–176. <https://doi.org/10.1080/10361140600672410>
- Mohammed, M. (2018). Oil production and economic growth in Angola. *International Journal of Energy Economics and Policy (IJEEP)*, 8(2).
- Montambault Trudelle, A. (2023). The Public Investment Fund and Salman's state: The political drivers of sovereign wealth management in Saudi Arabia. *Review of International Political Economy*, 30(2), 747–771. <https://doi.org/10.1080/09692290.2022.2069143>
- Moore, I. (2025, May 14). Riches from Royalties: How Australia's states and territories depend on mining. *The Centre for Independent Studies*. <https://www.cis.org.au/publication/riches-from-royalties-how-australias-states-and-territories-depend-on-mining/>
- Morris, A. (2024). Inequality and education in Australia. *The Economic and Labour Relations Review*, 35(2), 221–242. <https://doi.org/10.1017/elr.2024.18>
- Moti, U. G. (2019). Africa's Natural Resource Wealth: A Paradox of Plenty and Poverty. *Advances in Social Sciences Research Journal*. <https://doi.org/10.14738/assrj.67.6814>
- Mueller, J. T. (2019). *Natural Resource Dependence: The Dual Dependence of Resource Rich Areas in Rural America*. 1–35.
- Muigua, K. (2020). Exploited, Poor and Dehumanised: Overcoming the Resource Curse in Africa. *Journal of Conflict Management and Sustainable Development*, 05(01). <https://journalofcmsd.net/wp->

- content/uploads/2020/10/Exploited-Poor-and-Dehumanise.pdf
- Mura, M., Castillo, I., Torres, D., Galleguillos Madrid, F. M., Gálvez, E., Gallegos, S., Castillo, J., Varas, M., Jamett, I., & Toro, N. (2025). Global Overview of the Lithium Market and Opportunities for Chile. *Resources*, 14(2), 33. <https://doi.org/10.3390/resources14020033>
- Murshed, S. M. (2018). *The Resource Curse*. Agenda Publishing; <https://e-resources.perpusnas.go.id:2077/login.aspx?direct=true&db=edsebk&AN=2143938&site=eds-live>
- Narh, J. (2023). The resource curse and the role of institutions revisited. *Environment, Development and Sustainability*. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-04279-6>
- Nasir, M. A., Al-Emadi, A. A., Shahbaz, M., & Hammoudeh, S. (2019). Importance of oil shocks and the GCC macroeconomy: A structural VAR analysis. *Resources Policy*, 61, 166–179. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.01.019>
- Nature Index. (2025). *Country/territory tables | Nature Index*. <https://www.nature.com/nature-index/country-outputs/generate/all/global>
- NBIM. (2006). *Government Pension Fund – Global Annual Report 2005*. Norges Bank Investment Management. <https://www.nbim.no/globalassets/reports/2005/2005-annual-report-eng.pdf>
- NBIM. (2025). *Government Pension Fund Global Annual report 2024*. Norges Bank Investment Management. https://www.nbim.no/contentassets/490f9f062cfc4694b12c45f4d04ab0a5/annual_report_2024.pdf
- Niu, S., & Wang, D. (2023). ‘Three Summits’ and the New Development of China-Arab States Relations in the New Era. *Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies*, 17(1), 15–30. <https://doi.org/10.1080/25765949.2023.2190610>
- Novoa, R. B. (2025). EVOLUTION OF INDUSTRIAL POLICY AND TECHNOLOGICAL ABSORPTION FOR INNOVATION IN CHILE: ANALYSIS OF THE PERIOD 1990-2022. *Journal of Innovations in Business and Industry*, 4(1), 41–54. <https://doi.org/10.61552/JIBI.2026.01.005>

- Nurunnabi, M. (2017). Transformation from an Oil-based Economy to a Knowledge-based Economy in Saudi Arabia: The Direction of Saudi Vision 2030. *Journal of the Knowledge Economy*, 8(2), 536–564. <https://doi.org/10.1007/s13132-017-0479-8>
- Nyatanyi, G., Rukundo, O., & Uwantegye, R. P. (2024). Standards for Sovereign Wealth Funds: The Santiago Principles and Beyond. In H. K. Baker, J. H. Harris, & G. F. Nakshbendi (Eds.), *The Palgrave Handbook of Sovereign Wealth Funds*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-50821-9>
- Oatley, T. (2019). *International Political Economy* (Sixth). Routledge.
- O'Brien, R., & Williams, M. (2020). *Global Political Economy* (6th Edition). Red Globe Press.
- Oniemola, P. K. (2016). Why Should Oil Rich Nigeria Make A Law for the Promotion of Renewable Energy in the Power Sector? *Journal of African Law*, 60(1), 29–55. <https://doi.org/10.1017/S0021855315000212>
- Ouni, Z., Bernard, P., & Plaisent, M. (2020). Sovereign Wealth Funds Definition: Challenges and Concerns. *Advances in Economics and Business*, 8(6), 362–376. <https://doi.org/10.13189/aeb.2020.080605>
- Özgül, H. (2019a). Sovereign Wealth Funds: The Case of Norway. In S. Oktar & Y. Taşkın, 34. *International Public Finance Conference* (pp. 241–251). Istanbul University Press. <https://doi.org/10.26650/PB/SS10.2019.001.037>
- Özgül, H. (2019b). Sovereign Wealth Funds: The Case of Norway. In S. Oktar & Y. Taşkın, 34. *International Public Finance Conference* (pp. 241–251). Istanbul University Press. <https://doi.org/10.26650/PB/SS10.2019.001.037>
- Paltrinieri, A., Pichler, F., & Miani, S. (2014). Sovereign Wealth Funds: A Case Study of Korea Investment Corporation. *Journal of Business and Economics*, 05(09).
- Papaioannou, M. G., & Rentsendorj, B. (2015). Sovereign Wealth Fund Asset Allocations—Some Stylized Facts on the Norway Pension Fund Global. *Procedia Economics and Finance*, 29, 195–199. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01122-3](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01122-3)
- Papyrakis, E. (2017). The Resource Curse - What Have We Learned from Two Decades of Intensive Research: Introduction to the

- Special Issue. *The Journal of Development Studies*, 53(2), 175–185. <https://doi.org/10.1080/00220388.2016.1160070>
- Parasie, N., & Bartenstein, B. (2024, November 13). Abu Dhabi's \$1 Trillion Fund Rejigs Strategy to Speed Up Deals. *Bloomberg*. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-13/uae-wealth-funds-abu-dhabi-s-1-trillion-adia-rejigs-strategy-to-speed-up-deals>
- Pawlak, K., & Kołodziejczak, M. (2020). The Role of Agriculture in Ensuring Food Security in Developing Countries: Considerations in the Context of the Problem of Sustainable Food Production. *Sustainability*, 12(13), 5488. <https://doi.org/10.3390/su12135488>
- Peipei, W., Eyvazov, E., Giyasova, Z., & Kazimova, A. (2023). The nexus between natural resource rents and financial wealth on economic recovery: Evidence from European Union economies. *Resources Policy*, 82, 103412. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.103412>
- Pepple, T. F. (2017). *THE EFFECTS OF THE NIGER DELTA CRISIS ON EDUCATIONAL RESOURCES, ATTITUDE TO SCHOOLING, AND ACADEMIC ACHIEVEMENT OF BASIC SCIENCE STUDENTS IN RIVERS STATE, NIGERIA*. 21(1).
- Perry, L. B. (2024). Educational choice in Australia. *Revue Internationale d'éducation de Sèvres*, 97. <https://doi.org/10.4000/13g8s>
- Persson, J. (2018). Increasing Economic Opportunity for Residents in the Niger Delta: A Problem Driven Political Economy Analysis. *The International Affairs Review*. <https://www.iar-gwu.org/print-archive/fj8yy35dkvsh543lfuslvxionpq5q0>
- Perumal, S. V. (2023, January 31). World Cup lifts Qatar's hotel rooms' yield about 300% in December. *Gulf Times*. <https://www.gulf-times.com/article/654554/business/world-cup-lifts-qatars-hotel-rooms-yield-about-300-in-december>
- PreventionWeb. (2010, August 6). *Ministerial conference on environment and development in Asia and the Pacific (MCED)*. PreventionWeb UN Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). <https://www.preventionweb.net/event/ministerial->

conference-environment-and-development-asia-and-pacific-mced

- Quacquarelli Symonds (QS). (2019, June 28). *The Strongest Higher Education Systems by Country—Overview*. QS. <https://www.qs.com/the-strongest-higher-education-systems-by-country-overview/>
- Rahman, Md. M., & Hossain, Md. E. (2025). Synergy of governance, finance, and technology for sustainable natural resource management. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 11(1), 100468. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2025.100468>
- Ribé, A. V. (2020). The Emirati recipe for an effective foreign policy. *Opinion Paper IEEE*, 145/2020. http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DI_EEO145_2020ALBVID_EUA-ENG.pdf
- Ritchie, H., Rosado, P., & Roser, M. (2024). *Breakdown of carbon dioxide, methane and nitrous oxide emissions by sector* [Dataset]. <https://ourworldindata.org/emissions-by-secto>
- Roche, L., Link, A., Marinova, S., Coroama, V., & Finkbeiner, M. (2025). S-LCA of lithium mining in Chile and its potential impacts on water and the local community. *The International Journal of Life Cycle Assessment*, 30(6), 1201–1228. <https://doi.org/10.1007/s11367-024-02378-8>
- Rojas Fabris, M. T., Salas, N., Rodríguez, J. I., Rojas Fabris, M. T., Salas, N., & Rodríguez, J. I. (2021). Directoras y directores escolares frente a la Ley de Inclusión Escolar en Chile: Entre compromiso, conformismo y resistencia. *Pensamiento Educativo*, 58(1), 1–12. <https://doi.org/10.7764/pel.58.1.2021.6>
- Rosales, A. (2018). Pursuing foreign investment for nationalist goals: Venezuela's hybrid resource nationalism. *Business and Politics*, 20(3), 438–464. <https://doi.org/10.1017/bap.2018.6>
- Ross, M. L. (2015). What Have We Learned about the Resource Curse? *Annual Review of Political Science*, 18(1), 239–259. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-052213-040359>
- Sager, A. (2025). Saudi Arabia's Diplomacy and the Changing World Order. *Gulf Research Center*. <https://www.grc.net/single-commentary/232>

- Salah Ovidia, J. (2018). State-led industrial development, structural transformation and elite-led plunder: Angola (2002–2013) as a developmental state. *Development Policy Review*, 36(5), 587–606. <https://doi.org/10.1111/dpr.12249>
- Saudi Gazette. (2025, June 30). PIF assets soar to \$1.15 trillion in 2024. *Saudi Gazette*. [https://www.saudigazette.com.sa/article/653078/SAUDI-ARABIA/PIF-assets-hit-\\$115-trillion-in-2024-amid-strong-returns-AI-and-tourism-growth](https://www.saudigazette.com.sa/article/653078/SAUDI-ARABIA/PIF-assets-hit-$115-trillion-in-2024-amid-strong-returns-AI-and-tourism-growth)
- Sayed, M. N., Ashour, G. H., & Abbas, N. A. (2021). THE IMPACT OF THE VOLATILITY IN OIL PRICES ON SAUDI ARABIA'S AND ALGERIA'S MILITARY EXPENDITURE: A COMPARATIVE STUDY. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 11(6), 180–190. <https://doi.org/10.32479/ijeep.11693>
- Schorr, B., & Damonte, G. (2021). A curse over the Andes? In G. Damonte & B. Schorr, *Andean States and the Resource Curse* (1st ed., pp. 3–35). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003179559-2>
- Shadab, S. (2021). The nexus between export diversification, imports, capital and economic growth in the United Arab Emirates: An empirical investigation. *Cogent Economics & Finance*, 9(1), 1914396. <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.1914396>
- Shadab, S. (2023). The New Arab Gulf: Evaluating the Success of Economic Diversification in the UAE. In M. M. Rahman & A. Al-Azm (Eds.), *Social Change in the Gulf Region* (Vol. 8, pp. 415–430). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-7796-1_25
- Siddiqui, S. A., & Afzal, M. N. I. (2022). Sectoral diversification of UAE toward a knowledge-based economy. *Review of Economics and Political Science*, 7(3), 177–193. <https://doi.org/10.1108/REPS-07-2021-0075>
- Sinclair, L., & Coe, N. M. (2024). Critical mineral strategies in Australia: Industrial upgrading without environmental or social upgrading. *Resources Policy*, 91, 104860. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.104860>
- Singh, S., Deep Sharma, G., Radulescu, M., Balsalobre-Lorente, D., & Bansal, P. (2024). Do natural resources impact economic growth: An investigation of P5 + 1 countries under sustainable

- management. *Geoscience Frontiers*, 15(3), 101595. <https://doi.org/10.1016/j.gsf.2023.101595>
- Solsvik, T. (2022, February 27). Norway's sovereign wealth fund to vote against Apple management's pay plan. *Reuters*. <https://www.reuters.com/technology/norways-sovereign-wealth-fund-vote-against-apple-managements-pay-plan-2022-02-27/>
- South China Morning Post. (2024, August 2). Saudi Arabia wealth fund signs US\$50 billion deals with 6 Chinese institutions. *South China Morning Post*. <https://www.scmp.com/business/banking-finance/article/3273010/saudi-arabia-wealth-fund-signs-us50b-agreements-6-top-chinese-institutions>
- Stanley, L., Castaneda, F., & Segovia, N. (2024). Sovereign Wealth Funds' investments and climate change. *CIRIEC Working Paper*, 2024/06. <https://www.ciriec.uliege.be/wp-content/uploads/2024/10/WP2024-06.pdf>
- Steigum, E. (2013). *Sovereign wealth funds for macroeconomic purposes* (No. 04; Rapport till Finanspolitiska Rådet). BI Norwegian Business School.
- Steinveg, B. (2024). Small States in World Politics: Norwegian Interests and Foreign Policy Challenges in the Arctic. *Arctic Review on Law and Politics*, 15. <https://doi.org/10.23865/arctic.v15.5125>
- Sweeney, J. L. (1993). Economic Theory of Depletable Resources: An Introduction. In J. L. Sweeney & A. V. Kneese (Eds.), *Handbook of Natural Resource and Energy Economics* (Vol. 03, pp. 759–854). Elsevier.
- Taguchi, H., & Khinsamone, S. (2018). Analysis of the 'Dutch Disease' Effect on the Selected Resource-Rich ASEAN Economies. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 5(2), 249–263. <https://doi.org/10.1002/app5.233>
- Tamayo-Galarza, G. N., Ortíz-Henríquez, R. E., Vallejos-Rojas, B. I., & Rueda-Fierro, I. A. (2025). Beyond financing innovation: The rise of non-financial barriers to innovation in emerging economies, evidence from Chilean companies from 2007 to 2016. *Journal of Technology Management and Innovation*, 20(3), 41–58.

- The Economist. (1977, November 26). The Dutch disease. *The Economist*.
<https://www.uio.no/studier/emner/sv/oekonomi/ECON4925/h08/undervisningsmateriale/DutchDisease.pdf>
- The US EIA. (2024). *Country Analysis Brief: Saudi Arabia*. The United States Energy Information Administration.
- Touati, K., & Ben-Salha, O. (2024). Are Natural Resources Harmful to the Ecology? Fresh Insights from Middle East and North African Resource-Abundant Countries. *Sustainability*, 16(11), 4435. <https://doi.org/10.3390/su16114435>
- Tuck, N. (2025, May 28). Norway rejects GPFG ban on OPT investments. *European Pensions*.
<https://www.europeanpensions.net/ep/Norway-rejects-GPFG-ban-on-OPT-investments.php>
- Tyszkiewicz, R. (2025, May 14). Could Norway's Wealth Fund Do More on Sustainability? *Nordsip*.
<https://nordsip.com/2025/05/14/could-norways-wealth-fund-do-more-on-sustainability/>
- Uchenna Bartholomew Nwokoma, Kalu Samuel Obasi, & Dim, K. N. (2022). *Swamped with Poverty and Agony: Oil Exploration and Unemployment of the Natives in the Niger Delta*.
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.6987271>
- Ufimtseva, A. (2019). Governing Extractive Industries. *NOKOKO*, 07.
- Ulrichsen, K. C. (2021, September 9). The US-Saudi 'special' relationship 20 years after 9/11. *ALJAZEERA.Com*.
<https://www.aljazeera.com/opinions/2021/9/9/the-us-saudi-special-relationship-20-years-after-9>
- UNCTAD. (2023, July 18). *Productive Capacities Index*.
<https://unctadstat.unctad.org/datacentre/dataviewer/US.PC.I>
- UNDP. (n.d.). *Human Development Index (HDI)* [Dataset]. Retrieved July 31, 2025, from <https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index#/indicies/HDI>
- UNDP. (2025). *Human Development Report*. United Nations.
<https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2025reporten.pdf>
- UNPRI. (2019). *An Introduction to Responsible Investment for Asset Owners*. The United Nations (UN) Principles for Responsible

- Investment (PRI).
<https://www.unpri.org/download?ac=6520>
- U.S. Department of Agriculture, C. H. (n.d.). *The Economic Impact of Climate Change on Northwest Farms* [US Government Website]. U.S. Department of Agriculture (USDA) Climate Hubs. Retrieved January 21, 2025, from <https://www.climatehubs.usda.gov/hubs/northwest/topic/economic-impact-climate-change-northwest-farms>
- US-Saudi Business Council. (2023, September 5). *Saudi Arabia's Soaring Investment Appetite in U.S. Startups: A Growing Trend*. <https://ussaudi.org/saudi-arabias-soaring-investment-appetite-in-u-s-startups-a-growing-trend/>
- Valdes, R. (2021). Sub-national economic effects of the resources sector in Chile. *Journal of Applied Economics*, 24(1), 141–153. <https://doi.org/10.1080/15140326.2021.1880243>
- Valenzuela, J. P., & Montecinos, C. (2017). Structural Reforms and Equity in Chilean Schools. In J. P. Valenzuela & C. Montecinos, *Oxford Research Encyclopedia of Education*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.108>
- VAN DE GRAAFF, W. J. E., VAN GEUNS, L., & BOERSMA, T. (2018). THE TERMINATION OF GRONINGEN GAS PRODUCTION—BACKGROUND AND NEXT STEPS. *Energy Policy - Columbia University*.
https://www.energypolicy.columbia.edu/sites/default/files/pictures/CGEP_Groningen-Commentary_072518_0.pdf
- Van Maurik Matuk, F. A., Verschuuren, B., Morseletto, P., Krause, T., Ludwig, D., Cooke, S. J., Haverroth, M., Maeesters, M., Mattijssen, T. J. M., Keßler, S., Lanza, T. R., Milberg, E., Ming, L. C., Hernández-Vélez, C. A., Da Silva, K. M. T., Souza, M. P. V., Souza, V. O., Fernandes, J. W., & Dos Reis Carvalho, B. L. (2023). Advancing co-production for transformative change by synthesizing guidance from case studies on the sustainable management and governance of natural resources. *Environmental Science & Policy*, 149, 103574. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.103574>
- Vivares, E. (2020). Introduction. In *The Routledge Handbook to Global Political Economy: Conversation and Inquiries*. Taylor & Francis Group.

- Wang, C., Walsh, S. D. C., Weng, Z., Haynes, M. W., Summerfield, D., & Feitz, A. (2023). Green steel: Synergies between the Australian iron ore industry and the production of green hydrogen. *International Journal of Hydrogen Energy*, 48(83), 32277–32293. <https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2023.05.041>
- Ward-Glenton, H. (2023, July 6). Qatar Airways reports record revenues, bolstered by FIFA World Cup. *CNBC*. <https://www.cnbc.com/2023/07/06/qatar-airways-reports-record-revenues-bolstered-by-fifa-world-cup.html>
- Westhoek, H., Ingram, J., Berkum, S. van, Özay, L., & Hajer, M. A. (2016). *Food systems and natural resources*. United Nations Environment Programme.
- Willis, K. (2023). Development as modernisation: Rostow's *The Stages of Economic Growth*. *Geography*, 108(1), 33–37. <https://doi.org/10.1080/00167487.2023.2170073>
- Wimelius, H., Sandberg, J., Olsson, M., & Gunhaga, M. (2023). Navigating the volatile world of digital entrepreneurship. *Business Horizons*, 66(6), 789–803. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2023.05.001>
- WIPO. (2024). *Global Innovation Index 2024: Unlocking the Promise of Social Entrepreneurship* (1st ed). World Intellectual Property Organization.
- World Bank. (n.d.). *Total Natural Resources Rent (% of GDP)* [Dataset]. Retrieved July 31, 2025, from https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.TOTL.RT.ZS?most_recent_value_desc=true
- Wynn, K., Liu, M., & Cohen, J. (2022). Quantifying the economy-wide returns to innovation for Australia. *Australian Economic Papers*, 61(3), 591–614. <https://doi.org/10.1111/1467-8454.12262>
- Xiaoman, W., Majeed, A., Vasbieva, D. G., Yameogo, C. E. W., & Hussain, N. (2021). Natural resources abundance, economic globalization, and carbon emissions: Advancing sustainable development agenda. *Sustainable Development*, 29(5), 1037–1048. <https://doi.org/10.1002/sd.2192>
- Xie, J., Xia, Z., Tian, X., & Liu, Y. (2023). Nexus and synergy between the low-carbon economy and circular economy: A systematic and critical review. *Environmental Impact Assessment Review*, 100. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2023.107077>

- Yang, T.-Y., Chen, S.-H., Yang, Y.-T., & Chang, H.-H. (2022). Relationship between crude oil price and production levels—An empirical study of OPEC and non-OPEC states. *Frontiers in Environmental Science*, 10, 933431. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.933431>
- Yi-chong, X., & Leiva, D. (2021). Chile: A Successful Story in Latin America? In *The Political Economy of Natural Resource Funds*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-78251-1>
- Yikun, Z., Woon Leong, L., Cong, P. T., Abu-Rumman, A., Al Shraah, A., & Hishan, S. S. (2023). Green growth, governance, and green technology innovation. How effective towards SDGs in G7 countries? *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 36(2), 2145984. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2022.2145984>
- Zhao, C. (2023). Is low-carbon energy technology a catalyst for driving green total factor productivity development? The case of China. *Journal of Cleaner Production*, 428. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.139507>
- Zhou, L., Zhou, Y., De Vries, W. T., Liu, Z., & Sun, H. (2024). Collective action dilemmas of sustainable natural resource management: A case study on land marketization in rural China. *Journal of Cleaner Production*, 439, 140872. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2024.140872>
- Zhu, Q., Huang, S.-Z., & Koompai, S. (2024). Digital transformation as a catalyst for green innovation: An Examination of high-tech enterprises in China's Yangtze River Delta. *Sustainable Futures*, 8, 100277. <https://doi.org/10.1016/j.sftr.2024.100277>
- Zou, Q., Yi, C., Wang, K., Yin, X., & Zhang, Y. (2022). Global LNG market: Supply-demand and economic analysis. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 983(1), 012051. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/983/1/012051>
- Zwaan, F., Alves, T., Cadenas, P., Gouiza, M., Phethean, J., Brune, S., & Glerum, A. (2023). *(D)rifting in the 21st century: Key processes, natural hazards and geo-resources* [Preprint]. Tectonic plate interactions, magma genesis, and lithosphere deformation at all scales/Structural geology and tectonics, paleoseismology, rock physics, experimental deformation/Tectonics. <https://doi.org/10.5194/egusphere-2023-2548>

2021). العجوزة, ا.ع.م. & ابوزيد, ا.ص. (Africa: A Land of Wealth and a Land of Poverty: Why the Richest Resource Continent Suffers from Poverty. 46-1), 1(12, *مجلة السياسة والاقتصاد*.
<https://doi.org/10.21608/jocu.2021.61897.1102>

PROFIL PENULIS

Ir. Mohamad Bawazeer, IPU., merupakan dosen praktisi pada mata kuliah Ekonomi Politik Sumber Daya Alam, dan Politik Bisnis Internasional di FISIP UPN Veteran Jakarta, berkarir di dunia perminyakan sejak menyelesaikan studi perminyakan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1980, berperan aktif dalam berbagai asosiasi profesi dan industri perminyakan di tingkat nasional dan internasional, dalam beberapa tahun terakhir dipercaya sebagai Ketua Kadin Indonesia Komite Tetap Timur Tengah & OKI dan ikut terlibat dalam banyak kerjasama bisnis dan investasi dengan negara-negara Timur Tengah & OKI, menulis buku “Ekonomi, Politik, dan Peluang Bisnis di Negara-Negara Teluk,” yang diterbitkan pada 2021 lalu.

Andi Kurniawan adalah dosen Hubungan Internasional (HI) FISIP UPN Veteran Jakarta, menyelesaikan studi HI di Universitas Jember (S1) dan Universitas Indonesia (S2), menempuh program pra-doktoral di University of Sheffield, United Kingdom, dan melanjutkan studi doktoral di Departemen Politik dan Hubungan Internasional, University of York, UK, melalui dukungan beasiswa Indonesia LPDP, memiliki minat kajian ekonomi politik sumber daya alam, kerjasama perdagangan dan investasi di Selatan Global, serta Big Data dalam HI.

KAMI HADIR DENGAN BERBAGAI PAKET
PENERBITAN YANG SESUAI KEBUTUHAN ANDA
STARDIGITAL PUBLISHING

*"Karya buku adalah investasi masa depan,
menulis cara terbaik untuk mengikat ilmu"*

KIRIM NASKAH & TERBITKAN BUKU SEKARANG

Whatsapp
0812-6007-4406

Informasi Lebih Lanjut
www.stardigitalpublishing.com

IKAPI
Indonesian KAPPA Association
PT. Star Digital Publishing
No. Anggota IKAPI: 202/DIY/2024



PT. Star Digital Publishing adalah perusahaan bergerak di bidang Penerbitan Buku Berkedudukan di Bantul-Yogyakarta-Indonesia dengan alamat website www.stardigitalpublishing.com merupakan web/situs resmi kami PT. Star Digital Publishing sebagai media untuk menerbitkan buku-buku karya berkualitas dan terbaik, serta penerbit menjamin aktif dan dapat diakses secara berkesinambungan.

Visi kami adalah menjadi jembatan bagi penulis dan pembaca, memberikan platform yang mendukung kreativitas dan inovasi dalam dunia literasi ilmu pengetahuan. Kami berusaha untuk menerbitkan karya-karya yang tidak hanya menginspirasi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat di Indonesia maupun di dunia.

Badan hukum dan tercatat dalam pangkalan data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum:

NOMOR : AHU-059267.AH.01.30.Tahun 2024

Kegiatan Usaha : 58110 - Penerbitan Buku

PT. Star Digital Publishing Berkedudukan di BANTUL-Yogyakarta-Indonesia

Anggota IKAPI: No. 202/DIY/2024

Email:

ptstardigitalpublishing@gmail.com

Contact :

Admin 1: 0812-6007-4406

Admin 2: 0813-1881-5928

Hormat Kami,

Redaksi: PT. Star Digital Publishing

(Amanah, Melayani Sepenuh Hati)

Transformasi Ekonomi Politik Sumber Daya Alam

Dari Kutukan Menjadi Kekuatan

Buku “Transformasi Ekonomi Politik Sumber Daya Alam : Dari Kutukan Menjadi Kekuatan” membahas bagaimana sumber daya alam yang sering dianggap sebagai kutukan bagi negara berkembang, justru dapat menjadi kekuatan strategis jika dikelola dengan baik. Melalui pendekatan ekonomi politik global, buku ini menguraikan konsep-konsep seperti resource curse, Dutch Disease, dan soft power, serta menghadirkan studi kasus dari berbagai negara seperti Norwegia, Nigeria, Indonesia, dan Rusia. Penulis menekankan pentingnya tata kelola yang efektif, diversifikasi ekonomi, dan investasi pada sumber daya manusia.

Setiap bab menyajikan analisis mendalam mengenai strategi pengelolaan SDA dan dampaknya terhadap kekuatan politik serta diplomasi internasional. Buku ini menawarkan wawasan penting bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi, untuk memahami bahwa SDA bukanlah kutukan, melainkan aset strategis yang dapat memperkuat posisi ekonomi dan politik suatu negara.

Penulis :

Ir. Mohamad Bawazeer, IPU
Andi Kurniawan



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA



StarDigital Publishing
www.stardigitalpublishing.com

ISBN 978-634-7521-34-7



9

786347

521347